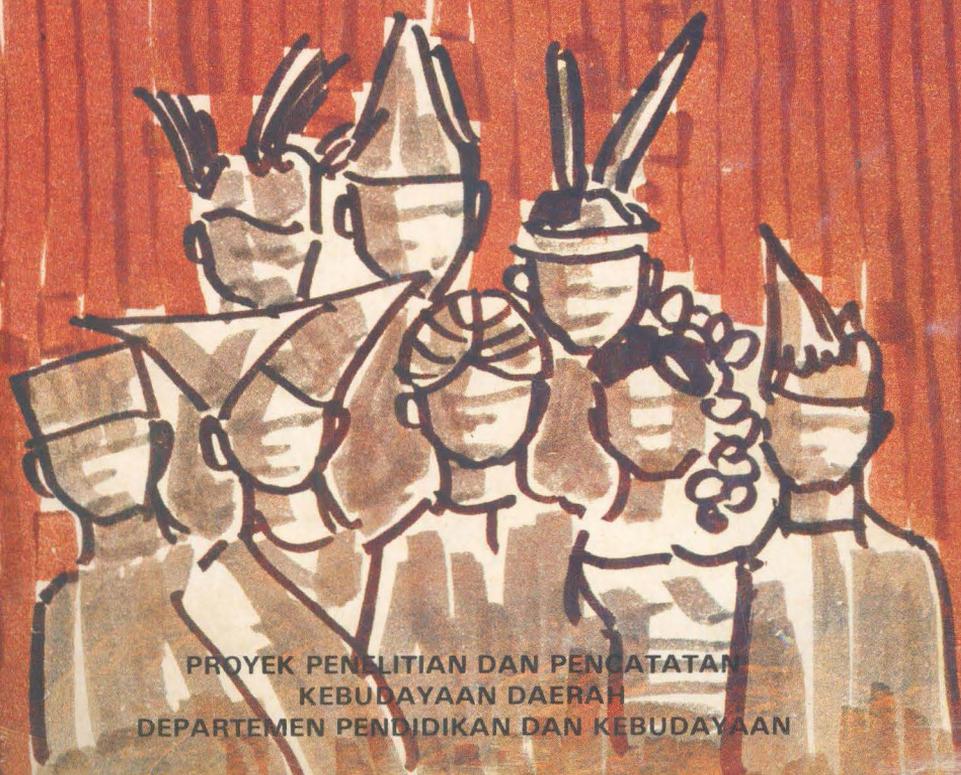


Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusatenggara Timur

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1978/1979

PERPUSTAKAAN
Direktorat Kebudayaan dan Pendidikan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala
NO.INDUK 2103 a Hadind
TGL. 1 Maret 1984

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Masalah	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Peneliti- an	3
F. Masalah yang Dihadapi Dalam Rangka Pelak- sanaan Penelitian	4
G. Hasil Akhir	5
BAB II. KEADAAN DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19	7
A. Pertumbuhan Pemerintahan di Nusa Tenggara Timur	7
B. Pemerintahan	14
C. Sosial Budaya	18
D. Alam Pikiran dan Kepercayaan	20
E. Kehidupan Ekonomi	23
BAB III. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900—1928	26
A. Pengaruh Politik Kolonial Belanda dan Desen- tralisasi di Daerah	
1. Daerah Sumba	27
2. Daerah Flores	30
3. Daerah Timor	31
B. Kegiatan Masyarakat yang Relevan dengan atau pun yang Merupakan Embrio dari Proses Jaman Kebangkitan Nasional di Daerah	39
C. Interaksi di Daerah dengan Kegiatan Par- tai/Organisasi	41
1. <i>Politik</i>	41
2. <i>Organisasi Sosial</i>	44
3. <i>Organisasi Wanita</i>	45
4. <i>Agama</i>	45
5. <i>Pendidikan</i>	47
6. <i>Seni Budaya</i>	48

7.	<i>Kepemudaan dan Kepanduan</i>	49
8.	<i>Pers</i>	49
9.	<i>Koperasi</i>	50
D.	Keadaan di Daerah Sekitar Perang Dunia I (1914—1918) dan Pendirian Volksraad	
1.	<i>Sikap Pemerintah Hindia Belanda</i>	50
2.	<i>Hubungan dengan Volksraad</i>	52
E.	Perjuangan di Daerah	53
1.	<i>Interaksi dengan pemogokan di sekitar tahun 1923</i>	53
2.	<i>Interaksi dengan pemberontakan tahun 1926—1927</i>	53
3.	<i>Sikap masyarakat terhadap asas non-koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda</i> .	54.
4.	<i>Interaksi dengan Permufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)</i>	54
5.	<i>Interaksi dengan Sumpah Pemuda</i>	56
6.	<i>Kegiatan masyarakat pada berbagai kehidupan</i>	57
BAB IV. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN		
1928—1942		
A.	Pengaruh Politik Pemerintah Hindia—Belanda Tahun ± 1930	
1.	<i>Politik keras terhadap gerakan non-koperasi</i>	61
2.	<i>Undang-Undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie)</i>	62
B.	Depresi Ekonomi di Daerah	63
C.	Interaksi Terhadap Kegiatan Partai/Organisasi	64
D.	Keadaan di Daerah Menjelang Keruntuhan Pemerintah Hindia Belanda dan Kedatangan Tentara Jepang	66
1.	<i>Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia di daerah menjelang Perang Dunia II</i>	66
2.	<i>Keadaan masyarakat</i>	67
3.	<i>Sikap masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda</i>	72

4. <i>Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di Daerah pada saat terakhir</i>	73
E. <i>Kedatangan Pasukan Pendudukan Jepang</i> ...	75
1. <i>Propaganda Jepang yang terasa di Daerah</i> .	75
2. <i>Waktu kedatangan Jepang</i>	76
3. <i>Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintahan Hindia Belanda</i>	78
4. <i>Sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia</i> ..	80
5. <i>Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang</i> ..	83
BAB V. PENUTUP	87
<i>Indeks</i>	91
<i>Daftar Bacaan</i>	99
<i>Daftar Informan</i>	103

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

”Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional”.

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat-istiadat Daerah dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN,
- Geografi Budaya Daerah dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritera Rakyat Daerah dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P. dan K. di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Peneitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseum Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P. dan K. Propinsi Nusa Tenggara Timur,
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kupang Nusa Tenggara Timur,
3. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur,
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur,
5. Tim penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari:
 - 1). M. Widyatmika Sebagai Ketua
 - 2) B. Datty sebagai Sekretaris
 - 3) Sukendro sebagai Anggota
 - 4) Niti Suroso sebagai Anggota
 - 5) E. Kopong sebagai Anggota
 - 6) A.M. Zesi sebagai Anggota
 - 7) P.C. Kudu sebagai Anggota
 - 8) M. Askuan sebagai Anggota
 - 9) D.A. Patty sebagai Anggota
 - 10) D. Billy sebagai Anggota
 - 11) Y. Wulangening sebagai Anggota
 - 12) J. Frans sebagai Anggota
6. Tim Penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota :
 1. Prof. Dr. Haryati Subadio
 2. Abdurrachman Surjomi hardjo
 3. A.B. Lapien
 - Ketua : Sutrisno Kutoyo
 - Sekretaris : M. Soenjata Kartadarmadja
 - Anggota :
 1. Anhar Gonggong
 2. Mardanas Safwan
 3. Masjkuri

4. Surachman
 5. Muchtaruddin Ibrahim
 6. Sri Sutjiatiningsih
 7. Frans Hitipeuw
 8. S. Sumardi
7. Editor : M. Soenjata Kartadarmadja
Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo
NIP. 130117589

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Zaman Kebangkitan Nasional merupakan sebahagian dari proses pergerakan dan perjuangan Kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang penting, karena **dasar-dasar** dari kenegaraan dan kebudayaan Indonesia tercermin **pada** zaman itu.

Proses Pergerakan dan Perjuangan Kemerdekaan Nasional itu sendiri adalah terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah dengan berbagai corak ragamnya. Karena itu perlu diadakan penelitian dan pencatatan serta penulisan tentang Sejarah Kebangkitan Nasional di daerah-daerah secara lebih luas, mendalam dan terperinci untuk lebih mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai zaman itu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sendirinya mempunyai kebhinnekaan budaya, demikian juga mengenai masalah proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan di daerah. Dari kebhinnekaan kegiatan perjuangan di daerah itulah nantinya akan terjangkau ketunggalkaannya.

Oleh karena itu suatu penelitian yang menjangkau pokok-pokok persoalan berhubungan dengan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Nasional di daerah adalah sangat perlu.

B. MASALAH

Dalam rangka penelitian berkenaan dengan sejarah pergerakan dan perjuangan kemerdekaan di daerah ini terutama pokok-pokok persoalan yang akan terjangkau adalah:

1. Bagaimanakah situasi di daerah sebelum terjadinya pergerakan nasional?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong timbulnya pergerakan nasional di daerah?
3. Kapanakah pergerakan nasional timbul dan berkembang di daerah, serta sampai seberapa jauh terdapat hubungan antara pergerakan yang ada di daerah dengan pergerakan nasional pada umumnya?
4. Bagaimana proses pergerakan dan coraknya yang ada di dae-

rah Nusa Tenggara Timur?

5. Siapakah tokoh-tokoh dan apakah peranannya?
6. Bagaimanakah pengaruh pergerakan Nasional di daerah perkembangan ke arah pembentukan negara Nasional Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan daripada penelitian adalah berkaitan dengan pokok-pokok persoalan di atas. Dengan kata lain penelitian ini berusaha menjawab pokok-pokok persoalan yang berkenaan dengan sejarah pergerakan Nasional di Daerah Nusa Tenggara Timur. Secara terperinci berusaha menjawab atau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Situasi di daerah Nusa Tenggara Timur menjelang timbulnya pergerakan nasional.
- b. Faktor-faktor pendorong timbulnya pergerakan Nasional di NTT.
- c. Waktu timbulnya serta perkembangan sejarah pergerakan nasional di daerah NTT dan hubungannya dengan pergerakan di lain daerah.
- d. Proses dan corak pergerakan nasional di daerah NTT.
- e. Tokoh-tokoh dan peranannya.
- f. Pengaruh pergerakan nasional di daerah bagi perkembangan ke arah pembentukan negara Nasional Indonesia.

Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Penyediaan data penunjang dalam rangka pembentukan Sejarah Nasional pada umumnya dan sejarah pergerakan daerah pada khususnya.
- b. Sebagai bahan bagi pembentukan dan pembinaan kebudayaan Nasional.
- c. Sebagai bahan bagi segenap pihak yang berminat mempelajari sejarah pergerakan Nasional di daerah.
- d. Sebagai bahan bagi usaha ke arah penelitian lanjutan.

D. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup pencatatan dan penelitian tematis Sejarah Kebangkitan Nasional di daerah adalah:

1. Dari segi waktu maka ruang lingkup penelitian itu adalah meliputi peristiwa-peristiwa kira-kira dari tahun 1900 sampai tahun 1942. Atau dari menjelang tumbuhnya pergerakan nasional sampai dengan zaman Jepang.
2. Adapun segi-segi bahan meliputi segi kehidupan pemerintah, kenegaraan, masyarakat, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama, kepemudaan, kepanduan, pers, organisasi profesional, kewanitaan dan koperasi yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur.

E. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

1. Pemilihan daerah penelitian

Dalam rangka penelitian ini atas pertimbangan tehnik tidak seluruh daerah Nusa Tenggara Timur dijadikan lokasi penelitian. Namun untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi yang diharapkan dapat mewakili daerah Nusa Tenggara Timur. Ke tiga daerah tersebut adalah daerah dengan lokasi di pulau Timur dengan kota Kupang, SoE dan Kefamenanu sebagai pusat pengamatan. Di pulau Sumba adalah kota Waingapu dan Waikabubak dan di pulau Flores kota Ende.

Daerah-daerah tersebut dipilih mengingat pada masa lampau menjadi pusat pemerintahan Belanda (terutama kota Kupang, Ende dan Waingapu). Karena pada umumnya pergerakan berpusat di kota-kota kabupaten, maka lokasi penelitian tidak mencakup sampai tingkat desa-desa di luar kota kabupaten.

2. Penentuan sumber data

Untuk pelaksanaan penelitian ini sumber-sumber yang digunakan adalah:

a. Sumber sekunder

Sumber sekunder ini adalah berupa buku-buku, brosur, arsip, dan sumber-sumber tertulis yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur.

Adapun penentuan sumber-sumber ini terbatas pada yang ada di NTT serta yang dapat memberikan informasi berhubungan dengan pergerakan Nasional di NTT.

b. Sumber primer

Sumber primer adalah berupa informan kunci. Adapun informan kunci ini dipilih berdasarkan pengetahuannya dan pengalamannya yang berhubungan dengan pergerakan nasional di NTT. Informan ini terutama adalah para tokoh yang pernah aktif ikut dalam pergerakan nasional di daerah dan juga tokoh-tokoh yang erat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kurun waktu 1900 – 1942. Namun atas pertimbangan praktis, tokoh-tokoh yang berada di luar daerah penelitian tidak dijadikan sumber informan.

c. Prosedur pelaksanaan pengumpulan data

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data dilakukan kegiatan-kegiatan persiapan dalam rangka pendalaman pokok-pokok persoalan, materi serta tehnik penelitian lapangan selama dua bulan, yakni bulan Juni dan Juli 1978. Dalam persiapan selama dua bulan tersebut, termasuk juga kegiatan penyusunan *research design* dan pedoman pertanyaan.

Untuk pelaksanaan tugas lapangan dipilih dosen dan mahasiswa tingkat doktoral pada Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Undana.

Pengumpulan data dijalankan selama satu bulan, yakni pada tanggal 10 Agustus 1978 sampai 11 September 1978. Pengumpulan data dilaksanakan dengan jalan wawancara berpedoman.

d. Analisa dan penulisan

Analisa dilaksanakan selama satu bulan pada bulan September 1978. Sedangkan penulisan konsep dan diskusi dilaksanakan pada bulan Oktober dan Nopember 1978.

Analisa dilaksanakan secara kualitatif dengan jalan komparatif dan selektif terhadap bahan yang tersedia. Adapun penafsiran dan tehnik penulisan terutama dilakukan dengan berpedoman pada TOR yang telah disusun oleh Tim Pusat di Jakarta.

F. MASALAH YANG DIHADAPI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Sangat terbatasnya sumber tertulis yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Arsip-arsip yang ada sering tersebar dan dimiliki oleh individu-individu, sehingga hal ini sangat menyu-

litkan pelaksanaan pengumpulan data sekunder.

2. Kerangka penelitian dan pedoman yang disusun oleh tim pusat terlalu bersifat umum. Bahkan sering tidak relevan dengan situasi di daerah. Hal ini nampak susahya mengenai pokok yang berhubungan dengan *Volksraad*, pemogokan sekitar tahun 1923, MIAI, Gapi, Parindra, Partindo, PNI Baru, Petisi Soetardjo. Di beberapa daerah misalnya di Flores, terutama Ende, justru organisasi politik baru muncul sesudah tahun 1942.
3. Keadaan geografi NTT dan luas daerah yang terdiri dari pulau-pulau, menyulitkan untuk mengadakan koordinasi dan pengawasan lapangan bagi petugas lapangan.
4. Ternyata di beberapa tempat di NTT pergerakan justru mulai timbul sesudah zaman Jepang.

G. HASIL AKHIR

Naskah ini aslinya disusun oleh Tim Daerah Nusa Tenggara Timur dengan mendasarkan pola suatu kerangka yang dibuat oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Kemudian dalam suatu lokakarya naskah ini mengalami penyempurnaan dan pada akhirnya dilakukan editing. Dalam melakukan editing ini ada tiga hal yang diperhatikan, materi atau bahan, cara penyajian/pendekatan dan segi bahasa. Pada materi diadakan perbaikan, sesuai dengan permasalahannya. Sedangkan pada cara penyajian/pendekatan, selain diperhatikan segi sistematika, juga diusahakan agar asas regiosentrisme sejauh mungkin didekati. Pada penulisan sejarah daerah sudah wajar ditempuh pendekatan serupa itu. Mengenai kebahasaan dilakukan perbaikan terutama pada segi susunan kalimat dan ejaan.

Pada akhirnya naskah ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan *terms of reference* (cakupan tugas) yang dimaksud. Selanjutnya naskah ini dengan kelebihan dan kekurangannya, hendaknya dilihat sebagai hasil usaha perintisan.

BAB II

KEADAAN DAERAH PADA AKHIR ABAD KE - 19

A. PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN DI NTT

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur adalah suatu propinsi yang terbentuk sejak tahun 1962. Sebelum terbentuk suatu daerah propinsi, daerah Nusa Tenggara Timur telah mengalami berbagai perkembangan dalam pemerintahan.

Daerah Nusa Tenggara Timur terdiri dari pulau-pulau besar, kecil di antaranya pulau Sumba, pulau Flores, pulau Timor, pulau Alor, pulau Pantar, pulau Adonara, pulau Lomblen, pulau Solor, pulau Rote, pulau Sabu dan beberapa pulau kecil lainnya. Pada masa lampau di tiap pulau itu tidak ada kesatuan pemerintahan. Di tiap-tiap pulau, beberapa daerah kecil diperintah oleh raja-raja kecil yang satu dengan yang lainnya berdiri sendiri-sendiri dan sering bermusuhan. Keadaan yang demikian ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan daerah Nusa Tenggara Timur.

Beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur pernah dikuasai atau pun mendapatkan pengaruh dari daerah lainnya. Kerajaan Majapahit dalam rangka mengembangkan politik persatuan Nusantara yang dipelopori oleh Mapatih Gajah Mada pernah menguasai beberapa daerah yang strategis di antaranya pulau Solor dan sekitarnya, pulau Sabu, dan pulau Sumba.¹⁾

Dengan menurunnya pengaruh kekuasaan Majapahit sesudah wafatnya Mapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, penguasaan daerah di Nusa Tenggara Timur mengendor. Dengan berkembangnya kekuasaan Islam di wilayah Indonesia Timur, terutama kerajaan Ternate, Gowa dan Bima, kerajaan-kerajaan ini juga menanamkan pengaruhnya di beberapa daerah di NTT di antaranya di pulau Flores bagian barat, daerah sepanjang pantai dan Flores Timur mendapat pengaruh kerajaan Gowa. Demikian juga unsur kekuasaan Bugis-Makasar, pernah berpengaruh di pulau Timor yakni sekitar tahun 1642, terutama di Belu Selatan. Hubungan

1) Slamet Mulyono: Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, B.P. Jakarta 1963, hal. 49

dengan kerajaan Wewiku Wehale di Belu dan Mena telah dilakukan oleh unsur kekuasaan Bugis-Makasar.

Di Pulau Flores bagian barat sesudah perjanjian Bungaya, masuk juga pengaruh kekuasaan Bima. Sedangkan di bagian timur pulau Flores, Alor, Pantar, pengaruh kekuasaan Ternate juga dirasakan. Namun pengaruh tersebut di atas tidak banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di NTT. Raja-raja setempat tetap menjalankan kekuasaan.

Portugis yang pada tahun 1511 telah merebut Malaka, mengirimkan misi-misinya ke daerah Nusa Tenggara Timur, terutama ke pulau Flores dan pulau Timor untuk memperkokoh kedudukan di tempat-tempat yang strategis didirikan benteng-benteng untuk menghadapi kekuasaan Islam. Tahun 1566 benteng Lohayong di pulau Solor didirikan, kemudian tahun 1596 benteng di pulau Ende dan tahun 1640 benteng di Kupang.²⁾

Namun usaha Portugis menyebarkan kekuasaan di NTT diikuti juga oleh Belanda. Tahun 1613 Belanda berhasil merebut benteng Portugis di Solor. Antara Portugis dan Belanda terjadi persaingan dan masing-masing berusaha mengadakan persekutuan dengan raja-raja setempat. Dengan kekuatan dan taktiknya Belanda berhasil menggeser pengaruh Portugis di pulau Flores dan Timor bagian Barat.

Pada tanggal 6 Juni 1735 Belanda dengan akal yang licik berhasil mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Timor, Solor dan Sumba yang memberikan monopoli dagang pada Belanda dan mengakui kedaulatan Belanda. Usaha-usaha tersebut dilanjutkan terus sehingga dari tahun 1900 sampai 1927 telah terjadi 73 buah kontrak *korte verklaring* dengan raja-raja kecil.

Untuk mengatasi persaingan antara Portugis dengan Belanda dan agar masing-masing leluasa menyebarkan pengaruh, maka diadakan Perjanjian Lisabon pada tanggal 10 Juni 1893 yang ditandatangani 1 Oktober 1904 dengan menetapkan pembagian wilayah, yakni Portugis menguasai daerah Timor Timur dan Belanda menguasai wilayah Nusa Tenggara Timur.³⁾

2) *Sejarah Gereja Katolik, Indonesia*, jilid I, Arnoldus Ende, hal. 370, 375 dan hal. 396.

3) *Indische Staatsblad* 1984 no. 81
Indische Staatsblad 1906 no. 194
Indische Staatsblad 1909 no. 214

Untuk melaksanakan pemerintahan di Nusa Tenggara Timur, Belanda berdasarkan *Zelf Bestuur Regelen* tahun 1909, 1919, 1927 dan 1938 yang tercantum dalam *Indische Staatsblad* 1916 no.331 dan tahun 1916 no. 372, menetapkan terbentuknya wilayah pemerintahan keresidenan Timor dan daerah takluknya (*Residentie Timor en Onderhorigheden*) dengan pusatnya di Kupang. Wilayah keresidenan Timor dan daerah takluknya terdiri dari tiga afdeeling, 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja.⁴⁾

1. Afdeeling Timor dan pulau-pulaunya

Afdeeling Timor dan pulau-pulaunya berpusat di Kupang. *Afdeeling* ini terdiri dari enam *onderafdeeling*, yakni: *Onderafdeeling* Kupang dengan ibukota Kupang, terdiri dari daerah-daerah gubernemen dan swapraja-swapraja, yakni daerah gubernemen Kupang, daerah swapraja Amarasi, swapraja Kupang, swapraja Fatuleu dan swapraja Amfoang. *Onder afdeeling* Rote dengan ibu kota Baa, terdiri dari swapraja Rote dan swapraja Sabu.

Onderafdeeling Zuid Midden Timor atau Timor tengah Selatan dengan ibukotanya SoE, terdiri dari tiga swapraja yakni swapraja Nollo, swapraja Amanuban dan swapraja Amanatun.

Onder-afdeeling Noord Midden Timor atau Timor Tengah Utara dengan ibu kota Kefamenanu, terdiri dari swapraja Beboki, swapraja Insana dan swapraja Miomaffe.

Onder-afdeeling Belu dengan ibu kota Atambua, hanya terdiri dari sebuah swapraja, yakni swapraja Belu.

Onder-afdeeling Alor dengan ibu kota Kalabahi, terdiri dari tujuh swapraja, yakni swapraja Barnusa, swapraja Pantar Matahari Naik, swapraja Kui, swapraja Kelana, swapraja Batulolong dan swapraja Purunan.

2. Afdeeling Flores

Afdeeling Flores dengan ibu kotanya Ende, terdiri dari lima *onder-afdeeling*, yaitu:

Onder-afdeeling Ende dengan ibu kota Ende, terdiri dari swapraja Ende dan swapraja Lio.

Onder-afdeeling Flores Timur dan kepulauan Solor dengan

4) Ch. Kana: *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor*, Skripsi Jurusan Sejarah, FK Undana, 1969, hal. 48.

ibu kotanya Larantuka, terdiri dari swapraja Larantuka dan swapraja Adonara.

Onder-afdeeling Maumere dengan ibu kotanya Maumere, terdiri dari swapraja Sikka dan daerah takluknya.

Onder-afdeeling Ngada dengan ibu kotanya Bajawa, terdiri dari tiga swapraja yakni swapraja Ngadh'a, swapraja Riung dan swapraja Nage-Keo.

Onder-afdeeling Manggarai dengan ibu kotanya Ruteng terdiri dari sebuah swapraja yakni swapraja Manggarai.

3. **Afdeeling Sumbawa dan Sumba.**

Afdeeling Sumbawa dan Sumba ibu kotanya Raba (Bima), terdiri dari empat *onder-afdeeling* yakni:

Onder-afdeeling Bima dengan ibu kotanya Bima (Raba) terdiri dari swapraja Bima dan swapraja Dompu.

Onder-afdeeling Sumbawa dengan ibu kotanya Sumbawa Besar, terdiri dari swapraja Sumbawa.

Onder-afdeeling Sumba Timur dengan ibu kotanya Waingapu, terdiri dari tujuh swapraja, yakni: swapraja Kanatang, swapraja Lewa Kambera, swapraja Tabundung, swapraja Melolo, swapraja Rendi Mangeli, swapraja Wajjelu dan swapraja Masu Karera.

Onder-afdeeling Sumba Barat dengan ibu kotanya Waikabuhak, terdiri dari sembilan swapraja, yakni swapraja Lauuli, swapraja Laura, swapraja Wajjewa, swapraja Wanokaka, swapraja Mamboro, swapraja Kodi, swapraja Anakalang, swapraja Lamboya, swapraja Umbu Ratu Nggay.

Dengan kedatangan pasukan Jepang yang berhasil menguasai wilayah Indonesia, maka terjadi perubahan pemerintahan di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*) yang berkedudukan di Makasar. Dalam lapangan pemerintahan Indonesia bagian Timur dikepalai oleh *Minseibu* yang berkedudukan di Makasar. Sedangkan daerah Nusa Tenggara merupakan suatu *Syoo Sunda Syu* yang berada di bawah *Minseibu Cokan* dengan kedudukan di Singaraja. Di samping *Minseibu Cokan* terdapat Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut *Syoo Sunda Sukai Iin*. Di antara anggota *Syoo Sunda Sukai Iin* yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah H.A.Koroh dan I.H. Doko.

Adapun pemerintahan di NTT tidak banyak mengalami perubahan. Di NTT terdapat tiga *Ken* yang menggantikan tiga *afdeeling* yakni: Timor *Ken*, Sumba *Ken*, dan Flores *Ken*. Tipp

Ken dikepalai oleh *Ken Kenriken*. Tiap *Ken* terdiri dari beberapa *Bunken* yang dikepalai oleh *Bunken Kanriken* yang merupakan penggantian istilah *onder-afdeeling* yang ada. Di bawah *Bunken* adalah *swarpaja-swapraja*.

Setelah Jepang menyerah, untuk daerah Kota Kupang diserahkan kepada Dr. A. Gakeler sebagai wali kota, Tom Pello dan I.H.Doko. Hal ini berlangsung sampai tentara Sekutu mendarat dan NICA memboncong di belakangnya. Akhirnya NICA mengambil alih pemerintahan di mana pejabat-pejabat pemerintahan Belanda sebelum perang dunia kembali memegang kekuasaan.

Pada 24 Desember 1946 sebagai hasil Konferensi Denpasar, berdirilah Negara Indonesia Timur yang terdiri dari 14 daerah. Di antara 14 daerah tersebut, tiga daerah adalah daerah di NTT, yakni Sumba, Timor dan Flores. Keresidenan Timur dan daerah takluknya diperintah oleh seorang residen. Namun pada tanggal 20 Oktober 1949 dilakukan penyerahan seluruh kekuasaan asisten residen serta sebagian kekuasaan residen kepada Kepala Daerah Timur dan kepulauannya yakni H.A.Koroh. Penyerahan ini berlaku juga untuk daerah Sumba dan Flores.

Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah No.21 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.59) terbentuk Propinsi Administratip Sunda Kecil. Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Propinsi Sunda Kecil. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No.9 tahun 1954 nama Sunda Kecil diubah menjadi Nusa Tenggara.⁵⁾

Berdasarkan Undang-Undang No.64 tahun 1958, Propinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi tiga daerah Swatantra Tingkat I, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Adapun daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terdiri dari daerah Flores, daerah Sumba dan daerah Timur dan kepulauannya. Sedangkan batas-batas wilayah NTT sebelah utara adalah laut Flores, sebelah Timur wilayah Propinsi Maluku dan Timor Timur, sebelah selatan Samudra Indoensia dan Laut Timor, sedang sebelah barat Samudra Indonesia dan wilayah Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II, di Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur maka untuk daerah Tingkat I NTT terdiri dari 12 Daerah Tingkat II. Adapun ke 12

5) *Inspeksi Land Use NTT*: Laporan Inventarisasi Land Use NTT, 1967 hal. 1.

Daerah Tingkat II di NTT adalah:

Daerah Tingkat II Manggarai, dengan ibu kotanya Ruteng. Daerah ini merupakan bekas wilayah swapraja Manggarai yang terletak di pulau Flores bagian barat. Batas-batas wilayahnya sebelah Utara adalah Laut Flores, sebelah Timur adalah Daerah Tingkat II Ngada, sebelah Selatan Laut Sabu dan sebelah Barat wilayah Nusa Tenggara Barat.

Daerah Tingkat II Kupang, dengan ibu kota Kupang. Daerah ini meliputi bekas wilayah swapraja Amarasi, Kupang, Fatuleu, Amfoang, daerah swapraja Rote dan Sabu. Adapun batas-batas wilayahnya sebelah utara adalah Laut Sabu, sebelah Timur adalah Daerah Tingkat II Timur Tengah Selatan, sebelah selatan Laut Timur, sebelah Barat Laut Sabu.

Daerah Tingkat II Timur Tengah Selatan di Pulau Timor, dengan ibu kotanya SoE. Daerah ini meliputi wilayah bekas swapraja Mollo, Amanatun dan Amanuban, Batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, sebelah Timor Daerah Tingkat II Belu, sebelah selatan Laut Timor dan di sebelah Barat darah Tingkat II Kupang.

Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara di Pulau Timor, dengan ibu kotanya Kefamenanu. Daerah ini meliputi bekas wilayah swapraja Miomaffo, Biboki dan Insana. Batas wilayah di sebelah utara wilayah OEkusi (daerah Timor Timur) dan selat Ombay, di sebelah Timur wilayah Tingkat II Belu, di sebelah selatan wilayah daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan dan di sebelah barat dengan daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan dan Kupang.

Daerah Tingkat II Belu, dengan ibu kota Atambua terletak di pulau Timor. Batas-batas wilayah sebelah utara adalah Selat Ombay sebelah timur adalah wilayah Timor Timur, sebelah Selatan adalah Laut Timur dan sebelah barat adalah wilayah daerah Tingkat II Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan.

Daerah Tingkat II Alor, yang meliputi Swapraja Barnusa, Pantar Matahari Naik di Pulau Pantar dan Swapraja Alor, Kui, Kolana, Batulolong, Pureman di pulau Alor. Ibu kota Daerah Tingkat II Alor adalah Kalabahi. Adapun batas-batas wilayah sebelah utara Laut Flores, sebelah Timur wilayah Timor Timur, sebelah selatan Selat Ombay dan Laut Sabu, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Alor.

Daerah Tingkat II Flores Timur, dengan ibu kotanya Larantuka. Daerah ini meliputi wilayah bekas swapraja Larantuka dan

swapraja Adonara. Batas-batas wilayah Daerah Tingkat II Flores Timur di sebelah utara Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan selat Alor, dan Daerah Tingkat II Alor. Sebelah selatan adalah Laut Sabu dan sebelah barat adalah wilayah Daerah Tingkat II Sikka. Wilayah Flores Timur termasuk pulau Flores bagian timur, pulau Solor, pulau Lomblen dan pulau Adonara.

Daerah Tingkat II Sikka, dengan ibu kota Maumere.

Daerah ini meliputi wilayah bekas swapraja Sikka di pulau Flores bagian Tengah. Adapun batas wilayahnya di sebelah utara Laut Flores, sebelah Timur daerah Tingkat II Flores Timur, sebelah selatan Laut Sabu dan sebelah Barat wilayah Daerah Tingkat II Ende.

Daerah Tingkat II Ende, dengan ibu kota Ende.

Wilayahnya meliputi wilayah bekas swapraja Ende dan swapraja Lio di pulau Flores bagian tengah. Batas-batas wilayah Daerah Tingkat II Ende di sebelah utara adalah Laut Flores, di sebelah timur adalah Daerah Tingkat II Sikka, sebelah selatan Laut Sabu dan sebelah barat dengan Daerah Tingkat II Ngada.

Daerah Tingkat II Ngada, dengan ibu kotanya Bajawa.

Daerah ini terletak di pulau Flores bagian barat yang wilayahnya meliputi bekas swapraja Ngada, Nage-Keo dan Riung. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Flores sebelah Timur Daerah Tingkat II Ende, sebelah selatan Laut Sabu dan sebelah Barat wilayah Daerah Tingkat II Manggarai.

Daerah Tingkat II Manggarai, dengan ibu kotanya Ruteng. Daerah ini meliputi wilayah bekas swapraja Manggarai yang terletak di pulau Flores bagian barat. Batas-batas wilayahnya, sebelah utara Laut Flores, sebelah Timur wilayah Daerah Tingkat II Ngada, sebelah selatan Selat Sumba dan sebelah barat wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat.

Daerah Tingkat II Sumba Barat, dengan ibu kotanya Wai-kabubak. Daerahnya meliputi wilayah bekas swapraja Laura, Waijewa, Kodi, Lauli, Memboro, Umbu Ratu Nggay, Anakalang, Wanokaka dan Lamboya, yang terletak di pulau Sumba. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Selat Sumba, sebelah timur wilayah daerah Tingkat II Sumba Timur, sebelah selatan dan sebelah barat adalah Samudra Indonesia.

Daerah Tingkat II Sumba Timur, dengan ibu kotanya Wai-

ngapu. Wilayah Sumba Timur yang terletak di Pulau Sumba meliputi wilayah bekas swapraja Kanatang, Lewa Kambera, Takundung, Melolo, Rendi Mengili, Waijelu dan Masukarere. Batas-batas wilayah Sumba Timur, sebelah utara adalah Selat Sunda, sebelah Timur Laut Sabu, sebelah selatan Samudra Indonesia dan sebelah barat adalah wilayah daerah Tingkat II Sumba Barat.

B. PEMERINTAHAN

Keadaan pemerintahan di daerah pada akhir abad 19, terutama di daerah Dawan di pulau Timor, daerah Sumba di pulau Sumba, dan daerah Ende Lio di pulau Flores pada umumnya masih tetap berlangsung sistim pemerintahan tradisional. Hal ini disebabkan pada masa akhir abad 19 pengaruh pemerintah Belanda belum meluas, di mana pada akhir abad 19 dan awal abad 20 Belanda baru secara intensip meluaskan pengaruhnya.

Dari tiga daerah yang diteliti dalam hal sistim pemerintahan tradisional terdapat perbedaan. Di daerah Dewan pada masa itu terdapat kurang lebih sembilan buah kerajaan yakni : Kupang, Amfoang, Amarasi, Molio, Amanuban, Amanatun, Miomaffe, Biboki dan Insana.

Tiap kerajaan di perintah oleh seorang raja yang disebut juga *Atupas*, yang berfungsi juga sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi dalam kerajaan dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kekuasaannya, sebagai pemutus terakhir setiap perkara, mengatur dan mengawasi setiap pejabat bawahan yang dilimpahkan kekuasaannya. Atupas juga mengatur pertahanan, keamanan dalam wilayah kekuasaannya baik ke dalam maupun ke luar dan sebagai wakil dewa yang tertinggi.

Di bawah Atupas terdapat pejabat yang disebut *Usif*. Tiap kerajaan mempunyai beberapa keusifan.

Adapun jabatan usif ini terdapat dua macam yakni : *Usif Mone* yang merupakan bangsawan yang melakukan tugas-tugas di luar istana, yakni membantu Atupas dalam melakukan (mengurus) kepentingan umum, sebagai penghubung antara Atupas dan *Amaf* serta *Toana*. Mengangkat dan menghentikan *Tobe* yang bertugas mengawasi tanah.

Sedangkan *Usif Nanan* adalah kaum bangsawan yang melakukan tugas di dalam istana. Adapun tugas-tugasnya adalah menyampaikan perintah dan urusan dari Atupas kepada Usif

Mone, dan menyampaikan laporan dari Usif mone kepada Atupas. Mengumpulkan para Usif mone bila ada pertemuan di istana Atupas dan menerima serta meneruskan *Mausufa* (hasil bumi) kepada Atupas. Di bawah usif terhadap petugas yang disebut *Amaf* yang merupakan kepala suku, yang dapat dibedakan atas Amaf mone dan Amaf nanan. Amaf mone merupakan pembantu dari Usif mone dalam hal-hal tugas ke luar. Di antaranya adalah sebagai pembantu Usif mone, mengurus *Mausufa* (pemberian hasil bumi) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Atupas melalui Usif nanan. Menerima dan menjalankan perintah Atupas kepada rakyat (Toana) dari Amaf Nanan yang diterima melalui Usif Nanan. Melaporkan kegiatan melalui Amaf Nanan dan Usif Nanan kepada Atupas.

Amaf Nanan adalah kepala suku yang melakukan tugas membantu Usif Nanan untuk menerima laporan dari Amaf Mone kepada Atupas melalui Usif Nanan. Menerima dan menyampaikan perintah Atupas melalui Usif nanan kepada rakyat, serta mengumpulkan para Amaf mone bila ada urusan atau pesta di istana. Dalam kenyataan, sebetulnya jabatan Amaf mone dan amaf nanan dipegang oleh seorang, demikian juga jabatan usif mone dan nanan.

Di samping pejabat usif dan amaf, maka masih dijumpai suatu jabatan khusus dalam sistim pemerintahan adat Dawan. Adapun petugas khusus itu adalah :

1. *Meo* yang merupakan hulubalang atau panglima perang.
2. *Mafefa* yakni juru bicara adat yang membantu tugas Atupas, usif dan amaf.
3. *Tobe* yakni Tuan tanah yang bertugas mengurus tanah dan pemberian hasil bumi dari golongan rakyat biasa (toana).

Adapun bagan struktur pemerintahan Dawan adalah sebagai berikut :

Adapun tokoh-tokoh pemerintahan pada akhir abad ke 19 dari daerah Dawan untuk kerajaan Amanuban rajanya Bill Nöpe (1864 - 1910). Kerajaan ini terdiri dari tujuh usif yakni NoE Benu, NoE Sambet, NoE Liu, NoE Beba, NoE Muke, NoE Siu dan NoE Meto. Kerajaan Amanatun dengan rajanya *Muti Banu-naek* (1868 - 1922), terdiri dari empat usif, yakni NoE Bokong, NoE Bena, NoE Bone dan NoE Nunumuti.

Kerajaan Miomaffo dengan rajanya Tokono (1873 - 1904) yang memiliki delapan usif, yakni NoE Toko, Aplal, Naktimu, Bekomi, Tunbaba, Neumuti, dan Minulak.

Kerajaan Insana dengan rajanya *Maklafu Nenobahlas* (1858 - 1908) yang memiliki lima usif, yakni Sukun, Meubesi, Oelolok, Ainan, Tafiniman. Kerajaan Biboki dengan rajanya *Tambesi Manleon* (1878 - 1911) yang memiliki lima usif yakni OEtasi, Bukifan, Usletu, Harneno dan Taito. Kerajaan Mollo dengan rajanya *Tahukemtasi* (1838 - 1906).

Kerajaan Amfoang dengan rajanya *Elisabeth Tilnom* (1897 - 1917) Kerajaan Amarasi dengan rajanya *Rasi Koroh* (1888 - 1910). Sedangkan di Kupang sendiri sebenarnya terdapat banyak kerajaan kecil, yakni Fatuleu di bawah *Sobe Sonbait* (1889 - 1911). Sonbai kecil di bawah *Bastian Nisoni* (1898 - 1917). Kerajaan Funay di bawah *L. Funay* (1897 - 1917), Tabenu di bawah *B.H. Tanof* (1887 - 1917), Amabi di bawah *N. Djabi* (1889 - 1917), Amabi OEfeto di bawah *Leo Ammanu* (1896 - 1917) dan Somau di bawah *R. Bisinglising* (1895 - 1917).

Di daerah Ende Lio pada waktu itu terdapat lima buah kerajaan, yakni Kerajaan Tanarea dengan rajanya *Kakadupa*, kerajaan Ende dengan rajanya *Pua Nato*, kerajaan Ndona dengan rajanya *Baki Bani* dan kerajaan Lise dengan rajanya *Pius Rasi Wangge*. Sebenarnya pengertian raja dalam arti yang sebenarnya kurang dikenal dan istilah ini adalah berkembang kemudian dengan adanya pengaruh Belanda, di mana beberapa penguasa adat yang menandatangani kontrak pendek dengan Belanda diakui sebagai raja. Sebelumnya sistem pemerintahan adalah didasarkan pada kesatuan adat, yang mana jabatan *Mosalaki* dalam sistem pemerintahan adat sangat penting, yakni *Mosalaki Puu Ine Ame* sebagai pemegang pemerintahan dan kepercayaan, *Ria Bewa* merupakan pejabat hakim adat. Dalam menjalankan pemerintahan *Mosalaki Puu* masih dibantu dengan *Mosalaki-mosalaki* yang lebih rendah derajatnya, yakni *Mosalaki Tu Tego*

Taga Mido yang memegang tugas mengontrol. Namun dalam perkembangan kemudian pada akhir abad ke 19, maka dikenal raja, di bawah raja ada *punggawa* dan *kapitan*. Kapitan adalah menggantikan kedudukan Mosalaki, sedangkan struktur yang terbawah adalah kepala kampung, kemudian rakyat.

Di daerah Sumba seperti halnya di daerah Flores pengertian raja adalah sangat terbatas, yakni berupa penguasa-penguasa wilayah pemerintahan yang agak besar merupakan pemerintahan atas desa. Kerajaan-kerajaan yang ada di Sumba di antaranya adalah Umalulu dengan rajanya Umbu Maramba, Rendi Mangili dengan rajanya Umbu Hina Hunggawati, Waijelu dengan rajanya Umbu Tentu Takawau, Mahu Karera dengan rajanya Umbu Ndawa Hawula, Lewa Kambera dengan rajanya Taralandu, kemudian Umbu Tunggu Yama Kareminjawa dan Umbu Biditan. Kerajaan Kandatang dengan rajanya Umbu Hai Relunggu Hadambiwa, Tabundung dengan rajanya Umbu Pandingara, Laura dengan rajanya Ama Mbiri Kalimbang, Momboro dengan rajanya Umbu Pombu Saramoni, Kodi dengan rajanya Mbangido Rija Kanda, Wewewa dengan rajanya Mete Umbu Pati, Lauli dengan rajanya Umbu Ngailu Beku, kerajaan Wanokaka dengan rajanya Baju Padeangu, Lamboya dengan rajanya Kedu Mato dan Anakalangu dengan rajanya Umbu Ngailu Dedi.⁶⁾

Dengan demikian di Sumba terdapat lebih dari 15 kerajaan kecil yang terpisah-pisah. Di bawah kerajaan kecil yang diperintah raja ini adalah langsung membawahi desa-desa dengan kepala pemerintahan desanya.

Namun demikian pada akhir abad ke 19 telah mulai terasa meluasnya pengaruh pemerintahan Belanda yang di pulau Flores telah mulai menempatkan alat kekuasaannya berpusat di Ende dengan seorang Kontrolir yang di Sumba dengan pusat kedudukan di Waingapu yang kesemuanya berada di bawah kekuasaan Residen yang berkedudukan di Kupang. Beberapa kontrolur di Sumba pada akhir abad ke 19 di antaranya Pluim Meztz yang pada tahun 1879 menjabat kontrolur di Sumba. Sedang di Ende Couvreur sebagai kontrolur pertama baru ada pada tahun 1906. Hal ini disebabkan karena sebenarnya pada akhir abad ke 19 Belanda belum berhasil menanamkan seluruh kekuasaannya di Nusa Tenggara Timur. Hanya beberapa tempat penting yang

6) Umbu H. Kapita, Sejarah Perkembangan Ketentaraan di Daswati II Sumba Timur, hal. 53 - 63

strategis dijadikan pusat pemerintahan dengan pusatnya di Kupang. Di antaranya residen yang menjabat pada akhir abad ke 19 adalah Residen de Villeneuve yang pada tahun 1890 digantikan oleh Hooykamer dan kemudian residen Vijzlaar.⁷⁾

Sebetulnya pada masa ini hampir tidak ada produk perundang-undangan yang dihasilkan di daerah. Yang menonjol adalah usaha perluasan kekuasaan Belanda dengan memperkenalkan taktik melalui ikatan *Korte verklaring* kepada raja-raja atau penguasa kecil yang mengakui kekuasaan Belanda dengan imbalan diakui sebagai raja, diberi tongkat kebesaran, bendera Belanda dan surat kontrak yang harus ditebus dengan hilangnya kedaulatan mereka.

C. SOSIAL DUBAYA

1. Pendidikan

Pada masa akhir abad ke 19 beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur telah terdapat Lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini pada umumnya adalah erat hubungannya dengan penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan.

Pada tahun 1863 pater G. Metz merintis ke arah lembaga pendidikan teratur yang dijalankan oleh Misi. Perbaikan selanjutnya terjadi pada tahun 1872 ketika di Larantuka Bruder van de Biggeler memimpin sekolah Misi yang ada, bahkan pada tahun 1873 didatangkan seorang guru dari Ambon bernama Lamber Tahamata yang pada waktu itu mengasuh 70 murid.⁸⁾

Pada tahun 1900 telah terdapat 5 buah sekolah Katolik di Flores dengan murid 276 siswa laki-laki dan 413 wanita, sedangkan di Timor terdapat 2 sekolah Misi dengan jumlah murid 94 anak.⁹⁾

Di Sumba, sekolah-sekolah baru dibuka pada tahun 1877 berupa *volkschool* di Kambaniru dan Melolo oleh zending yang bekerja di daerah Sumba. Sedangkan di daerah pulau Timor pendidikan dirintis oleh Zending. Pada tahun 1825 di pulau Rote telah terdapat beberapa sekolah lokal, yakni di Landu, Termanu, Talae, Baa, Thii, Dengka dan oEnale. Sebagian besar guru-gurunya adalah orang Rote sendiri. Pada tahun 1847 telah diangkat seorang pemuda Rote bernama P. Pello sebagai pembantu penyebar agama dan penilik sekolah. Pada tahun 1851 sekolah Zending di Rote

7) Sejarah Gereja Katolik, 2, 1972, hal 126 - 131

8) Ibid, hal. 115

9) Ibid, hal. 251

di tutup. ¹⁰⁾ Namun demikian pada tahun 1857 di Rote telah ada 18 buah sekolah. Pada tahun 1862 telah terdapat 18 *Gouvernement Onderwijzers*, 11 *Negory Onderwijzers* dan 21 *Helpers*. Pada tahun 1871 telah terdapat 18 sekolah pemerintah dan 16 sekolah desa. Guru-guru pada waktu itu pada umumnya adalah orang Ambon. Untuk kepentingan tenaga guru van der Chijs mengusulkan didirikan sekolah guru di Kupang. Namun usaha ke arah itu tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu untuk pendidikan guru banyak orang Rote dikirim ke Ambon. Lulusan pertama dari sekolah ini untuk orang-orang asal Rote adalah tahun 1877. ¹¹⁾ Sehingga pada tahun 1884 telah banyak orang Rote yang menjadi guru.

2. SENI BUDAYA

Keadaan seni budaya daerah pada akhir abad ke 19 tidaklah jauh berbeda dengan keadaan masa sebelumnya. Tetapi pada masa akhir abad ke 19 diperkaya dengan unsur-unsur budaya yang datang dari luar.

Di bidang seni ikat, cara-cara menenun ikat secara tradisional masih tetap berlangsung, dalam rangka memenuhi kebutuhan pakaian sehari-hari dan upacara adat. Seperti tenun untuk sarung wanita, sarung laki-laki, selimut dan selendang. Motif-motif berdasarkan motif bunga seperti bentuk roset, motif ikal, motif geometris, motif reptil, dalam bentuk kulit reptil antara lain kulit ular dan motif gambar badan reptil seperti cecak, ular, buaya. Di samping itu juga terdapat motif dalam bentuk gambar hewan seperti burung, ayam, kuda, udang. Dijumpai juga motif daun, pohon dan tengkorak. Hanya saja antara satu dengan yang lainnya daerah terdapat perbedaan, misalnya daerah Sumba lain dengan Flores atau Timor. Bahkan di tiap pulau juga terdapat beberapa variasi seperti Sumba Barat dan Sumba Timur. Demikian pula di daerah Dawan di Timor ada motif Amarasi, Fatuleu, Amanuban, Mollo, Amanatun, Insana dan sebagainya. Di Flores pun tiap-tiap suku, bahkan sub suku juga terdapat perbedaan-perbedaan. Namun secara garis besar motif geometris dan reptil menonjol di daerah Dawan dan suku-suku di Flores. Di Sumba motif binatang cukup menonjol. Motif-motif tersebut dibuat dengan dua cara yakni tehnik ikat dan tehnik

10) Fox, Dr. J. Harvest of the Palm Soceological Change in EASTERN Indonesia, hal 130 - 131.

11) Ibid, hal 147

sulam (songket). Kain-kain ini sangat penting artinya dalam upacara-upacara adat.

Dalam bidang seni tari dan seni suara juga tidak banyak mengalami perubahan. Seni tari dan suara pun erat hubungannya dengan upacara adat. Tari-tari ini dapat digolongkan. Walaupun dikenal juga bentuk seni tari yang tidak ada hubungannya dengan upacara adat. Tari-tari ini dapat digolongkan yang bercorak perang/bela diri, ritual, pergaulan muda mudi, berhubungan dengan produksi, misalnya panen dan sebagainya. Suatu hal yang nampak agak berbeda dengan masa-masa sebelumnya adalah di bidang perhiasan dan alat-alat musik makin diperkaya dengan unsur-unsur baru, misalnya : sebangsa gitar kecil, perhiasan kepala, ikat pinggang, pedang dengan mata uang logam Belanda dan Portugis. Dalam bidang seni suara atau seni syair, maka syair-syair adat tetap memegang peranan penting dalam upacara-upacara. Dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen dan Katolik maka berkembang pula nyanyian-nyanyian gereja/rohani dan kesenian lain yang ada hubungannya dengan segi keagamaan. Mulai berkembang pula pengenalan tulisan, baik Latin melalui sekolah-sekolah agama, tulisan Bugis/Makasar dan huruf Arab bagi daerah pantai yang memeluk agama Islam seperti daerah Ende dan beberapa daerah pantai di Flores.

D. ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN

Alam pikiran dan kepercayaan tradisional yang mendasarkan adanya kekuatan gaib, dan roh nenek moyang merupakan kepercayaan yang masih dominan. Di mana dalam kepercayaan ini ditandai juga adanya siklus upacara-upacara yang berhubungan dengan daur hidup dan pertanian serta pemujaan bulan dan matahari dalam wujud dewa-dewa tertinggi dengan berbagai istilah, antara lain : *Uis Neno* di daerah Dawan, *Dua Nggae* di Ende, namun unsur-unsur kepercayaan asli ini semakin hari semakin terdesak dengan berkembangnya agama Islam di pantai-pantai, agama Kristen dan Katolik.

Agama Islam pada masa-masa sebelumnya telah berkembang di pulau Solor, Adonara, Lomblen, Pantar, Alor, dan Flores sepanjang pantai, pada abad ke 19 meluas juga ke Timor dan Sumba. Tokoh-tokoh agama Islam yang berjasa mengembang-

kan agama Islam adalah Syarif Abubakar bin Abdurahman Alqodri, Abdurahim dari Bengkulu, Pangeran Suryo Mataram, Pangeran Ali Basyah Abdul Mahmud Gandakusuma, Dipati Amir Bahron, Hamzah Bahren, K.H. Muhammad Azzad bin Alwan.

Syarif Abubakar bin Abdurrachman Alqodri adalah putra saudara Sultan Pontianak yang terlibat perdagangan budak. Ia dibuang ke Sumba tahun 1836 dan menjadi penyebar agama Islam di Sumba. Di samping itu pedagang-pedagang serta pelaut Bugis, Makasar, Buton dan Bima berperan juga dalam menyebarkan agama Islam.

Abdurrachman dari Bengkulu datang ke Timor melalui Sumbawa. Dia merupakan pendiri pertama Mesjid. Batubesi Kupang.¹²⁾ Mesjid tersebut dipindahkan beberapa kali dan terakhir dipindahkan ke Airmata, Kupang tahun 1812.

Pangeran Suryo Mataram, adalah bekas pejuang dalam Perang Diponegoro yang dibuang ke Kupang tahun 1830. Ia berhasil meng-Islamkan keluarga bangsawan Tanof, setelah membawa salah seorang putra keluarga Tanof, yakni Enus Tanof ke Jawa dan akhirnya memeluk agama Islam. Di samping itu terdapat bekas anak buah pangeran Diponegoro yang lain yakni Pangeran Ali Basyah Abdul Makhmud Gandakusumo. Ia kawin dengan anak keluarga oEmaten dan mempunyai pengaruh bagi perkembangan agama Islam di Timor.

Amir Bahren dan Hamzah Bahren adalah tokoh agama dari Bangka. Karena terlibat perang dengan pemerintah Belanda di Bangka mereka dibuang ke Kupang tahun 1860.¹³⁾

Ia berjasa menyebarkan agama Islam di Kupang dan mendirikan Mesjid Bonipoi di Kupang. Di beberapa daerah pantai seperti sekitar teluk Kupang, daerah Pariti, di Sumba, di Tapil kecamatan Melolo, di pulau Pemana, pulau Babi di Kabupaten Sikka dan daerah pantai pulau Flores, peranan dari suku Bugis, Makasar, Wajo dan Buton dalam mengembangkan agama Islam cukup besar. Di daerah tersebut terdapat kampung-kampung Bugis, Wajo, Makasar atau Buton yang merupakan kampung-kampung Islam.

Di samping agama Islam, agama Katolik di akhir abad ke-19 juga sangat berkembang. Dalam sejarah perkembangannya

12) Monografi NTT Daerah Timor, Rote, Sabu, Jilid I, Proyek Media Keb. Dep. P dan K, 1975, hal. 32.

13) Ibid, hal. 37.

antara kedua agama ini sering menimbulkan bentrokan dan persaingan terutama di daerah pulau Flores. Agama Katolik semula dikembangkan oleh Misionaris Portugis. Pada tahun 1804 di daerah NTT hanya terdapat delapan orang Misionaris dan tahun 1811 tinggal seorang. Bahkan sesudah tahun 1834 untuk sementara tidak ada seorang Misionaris pun. ¹⁴⁾

Para dominikan diusir dari semua daerah, hal ini disebabkan karena waktu itu di Portugal pemerintahannya bersifat anti Katolik. Pada tahun 1838 dengan dihapuskannya Keuskupan Malaka, Nusa Tenggara Timur dimasukkan dalam keuskupan Goa. Dengan demikian terdapat beberapa iman yang dikirim ke Dili. Dari sinilah dikunjungi paroki di Larantuka dan Sikka di Flores. Pada tahun 1862 diseluruh Flores terdapat 11.055 orang Katolik yang pada tahun 1873 meningkat menjadi 18.757 orang. ¹⁵⁾

Pada tahun 1887 ketika Don Lorens menjadi raja Larantuka, ia mempunyai andil besar dalam ikut menyebarkan agama Katolik. Pada waktu itu tenaga misionaris bertambah banyak. Pater Kraayvanger tiba tahun 1876, dan tahun 1883 mendirikan Missi di Timor. Pater Schweiten tiba tahun 1883 dan kemudian pada tahun 1888 mendirikan Missi di Sumba. Pada tahun 1884 pasis Missi telah berkembang pula ke Konga dan Wure, sehingga perkembangan agama Katolik makin maju. Jumlah pemeluk agama Katolik pada tahun 1890 di Larantuka 6.279 orang, Maumere, Koting, Sikka 11.550, Timor 1.124 orang dan Lora Sumba 610 orang. Pada tahun 1895 jumlah pemeluk agama Katolik di Larantuka 7.903 orang yang pada tahun 1900 menjadi 7.501 orang saja. Sedangkan di Maumere, Koting, Sikka pada tahun 1895 pemeluk Katolik menjadi 10.547 orang dan tahun 1900 turun menjadi 8.426 orang.

Di Timor pemeluk agama Katolik tahun 1895 sebanyak 1648 dan tahun 1900 menjadi 1.872 orang. Sedangkan di Laora (Sumba) pemeluk Katolik tahun 1895 ada 926 orang.

Agama Kristen Protestan seperti halnya kedua agama di atas, pada akhirnya abad ke 19 mengalami perkembangan yang pesat. Gereja Kristen Protestan di Nusa Tenggara Timur berada di bawah *Nederland Zending Genootschap* dari tahun 1814-1860,

14) Sejarah Gereja Katolik Indonesia, jilid I, hal. 413

15) Ibid, jilid II, hal. 106

kemudian sesudah tahun 1860 merupakan bagian dari gereja negara dan berada di bawah *Indische Kerk*.

Tokoh-tokoh gereja pada akhir abad ke-19 di daerah Timor adalah Donselaar dan J.J. Nicks Donselaar yang bekerja di Timor sejak *Nederland Zending Genootschap*, masih tetap bekerja di Timor sampai wafatnya pada tahun 1883 J.J.Nicks ditempatkan di Babau dan bekerja di sana antara 1874 dan 1894.¹⁷⁾ Pada tahun 1890 di Rote ditempatkan Dr. J.J. Le Grand, yang terdapat 18 jemaat dengan 7.000 anggota.

Di Sumba agama Kristen dirintis oleh Pendeta J.J. Van Alphen, yang dikirim oleh *Nederland Gereformeerde Zending Vereniging* ke Sumba tahun 1881 dan bertempat tinggal di Melolo. Pada tanggal 1 Juli 1884 usaha pekabaran injil di Sumba diambil alih oleh Zending der Christelijk Gereformeerde Kerk dengan pendeta tetap J.J. van Alphen. Pada tahun 1887 ia pindah ke Kambaniru. Pada bulan Agustus 1890 datang di Sumba pendeta W. Pos dan tinggal di Melolo. Ia melayani orang-orang Kristen dari Sabu. Pada tahun 1892 tiba di Sumba pendeta C. de Bruyn yang menggantikan J.J. van Alphen.¹⁸⁾

Pada abad ke- 19 agama Kristen hanya berkembang di pulau Rote, Sabu, Timor dan Sumba, sedangkan di pulau Flores merupakan daerah perkembangan agama Katolik. Walaupun perkembangan agama Katolik, Kristen Protestan dan Islam pada akhir abad ke- 19 semakin baik tetapi sebagian besar penduduk belumlah terjangkau oleh ajaran-ajaran agama tersebut. Penduduk sebagian besar masih tetap melaksanakan kepercayaan asli, di mana pemujaan arwah nenek moyang dan mahluk-mahluk supernatural tetap memegang peranan penting dalam kehidupan mereka. Rumah adat yang merupakan rumah suku dan rumah keramat tempat menyimpan benda-benda pusaka masih merupakan pusat kegiatan upacara-upacara.

E. KEHIDUPAN EKONOMI

Kehidupan ekonomi di daerah pada akhir abad ke- 19 tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan bahwa pada masa ini Belanda baru berusaha dengan lebih giat untuk menyebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

17) Dr. F.L. Cooley : Benih yang tumbuh, jilid II Arnoldus 1976, hal. 45

18) U.H. Kapita : Sejarah Perkembangan Ketentaraan di Daswati II Sumba Timur, 1962, hal. 22.

Kehidupan ekonomi penduduk tetap berdasarkan pertanian perladangan berpindah dan jagung, umbi-umbian serta kacang-kacangan sebagai tanaman pokok. Perkebunan-perkebunan besar seperti di daerah Indonesia bagian barat tidak dikenal. Hasil pertanian penduduk hanya untuk kepentingan konsumsi.

Di samping bertani, beternak merupakan mata pencaharian yang penting. Hewan-hewan yang dipelihara terutama adalah kerbau, kuda, babi, kambing, unggas. Ternak sapi baru dimasukkan ke daerah ini pada awal abad ke-20. Peternakan yang diselenggarakan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri terutama dalam hubungannya dengan upacara-upacara adat, antara lain upacara kematian, perkawinan dan upacara lainnya. Pasar pada waktu ini belum berkembang, hanya beberapa tempat penting di pinggir pantai yang strategis terdapat pusat-pusat pasar.

Barang dagangan yang dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur adalah lilin, madu, kayu cendana, batu lola. Sedangkan barang dari luar adalah barang-barang pecah belah, manik-manik dan barang kelontong.

Namun dengan mulai berkembangnya penguasa Belanda, kehidupan ekonomi penduduk yang sangat rendah akibat cara-cara bertani yang tradisional, semakin berat rakyat ikut menderita akibat adanya kerja rodi dan pajak-pajak yang dikenakan kepada rakyat, di samping tanggungan secara adat yang tetap berlangsung.

Hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat kurang, disebabkan belum adanya jalan-jalan darat yang menghubungkan daerah dengan daerah lainnya. Mengingat pola pemukiman penduduk yang cenderung tinggal di puncak-puncak gunung dan bukit maka ketertutupan daerah pedalaman sangat terasa akibatnya bagi perkembangan ekonomi penduduk. Daerah-daerah yang agak terbuka adalah daerah-daerah pantai yang memiliki pelabuhan-pelabuhan alam. Daerah semacam ini dengan perahu-perahu layar sering berhubungan dengan dunia luar. Namun mengingat kebanyakan daerah-daerah pantai yang strategis pada masa akhir abad ke-19 adalah dikuasai pemerintahan penjajahan Belanda maka secara keseluruhan tidak banyak artinya bagi perkembangan ekonomi penduduk daerah-daerah pantai.

Kehidupan penduduk dalam mengusahakan mata pencaha-

rian hidup, penggunaan alat-alat tradisional yang sangat sederhana masih merupakan ciri utama abad ini. Dalam bertani alat bajak dan cangkul belum dikenal. Penduduk hanya menggunakan dua potong tongkat kayu untuk mengolah tanah yang disebut *togal* (digging stick)

Demikian pula hasil-hasil pertanian yang sebagian besar untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup, diolah dengan alat-alat yang sangat sederhana. Tembikar, alat-alat dari kayu tempurung, tanduk merupakan alat rumah tangga yang penting di samping tempat yang berupa anyaman dari daun lontar atau bantan.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900 - 1928

A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI DI DAERAH

Pengaruh politik kolonial Belanda dan desentralisasi di daerah Nusa Tenggara Timur kurang begitu terasa. Hal ini berbeda dengan situasi di wilayah Indonesia bagian Barat, khususnya pulau Jawa, karena pada masa ini belum seluruhnya daerah Nusa Tenggara Timur dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Oleh karena itu pada masa ini pemerintah kolonial Belanda yang telah mulai menanamkan kekuasaan penting di beberapa tempat seperti Kupang, Waingapu, berusaha mempersatukan daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur dalam kekuasaan pemerintahan Belanda. Usaha-usaha ke arah hal tersebut di antaranya yang penting adalah mengadakan kontrak-kontrak pendek dengan seluruh pemerintahan raja-raja secara bersama-sama atau bergantian (berurutan).

Di samping itu diadakan pula ekspedisi-ekspedisi ke arah pedalaman yang sering dibarengi dengan kekuatan militer dan tindakan kekerasan. Akibatnya terjadi perlawanan demi perlawanan di beberapa daerah. Perlawanan-perlawanan ini erat hubungannya dengan usaha menolak campur tangan pemerintah kolonial Belanda yang berusaha menanamkan kekuasaannya dan menarik pajak serta kerja rodi. Untuk memperlancar politik persatuannya dan sistem pemerintahannya, maka jalan-jalan mulai dibangun dan hal yang demikian sangat membutuhkan tenaga rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Dalam bidang desentralisasi pemerintahannya kurang dirasakan, kecuali dalam hal pembentukan sistem pemerintahan daerah yang berada di tangan residen yang berpusat di Kupang. Sedang beberapa daerah yang berhasil dikuasai kemudian dijadikan salah satu rangkaian dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda yakni dari residen, asisten residen, kontrolur dan

raja-raja.

Perlawanan rakyat di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur antara tahun 1900 - 1928, agak berbeda dengan keadaan di daerah Indonesia bagian Barat di mana pada umumnya perlawanan terhadap Belanda sesudah tahun 1900 sudah sangat kurang, sebaliknya di NTT pada masa ini perlawanan-perlawanan masih sering terjadi.

1. Daerah Sumba

a. Perang Lambanapu

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 1901 sebagai akibat penolakan tuntutan membayar denda yang dilakukan oleh Belanda. Raja-raja di beberapa daerah Sumba terutama Raja Lewa Kambara yaitu Umbu Tunggu Maramba yang menolak tuntutan membayar denda oleh Belanda dianggap terlalu dibuat-buat karena raja-raja tidak pernah melakukan hak *tawan karang*.¹⁹⁾ Belanda yang mengutus Bakker untuk menuntut denda atas perampokan kapal-kapal asing yang kandas mendapat tantangan raja Taralandu yang bergelar I Taralandu I Jangga Mbulu. Dijelaskan pada utusan yang dikirim Residen Esser, bahwa kapal asing yang kandas tidak dirampas tetapi ditolong sampai dapat diberangkatkan lagi ke Jawa. Demikian juga larangan memungut bea pelabuhan yang dikeluarkan oleh residen Belanda dengan perantaraan kontrolur Roos tidak dikirimkan oleh Raja Taralandu karena ia merasa berhak berbuat demikian di dalam wilayah kekuasaannya. Raja Taralandu merasakan campur tangan Belanda sudah merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Namun kontrolur Belanda tidak dapat berbuat apa-apa, karena kekuatan Belanda hanya terdiri dari 21 opas polisi yang bersenjata karaben.²⁰⁾

Perjuangan Raja Taralandu dilanjutkan oleh putra saudara raja yang kemudian menggantikannya, yakni Umbu Tunggu Jama Karemin Jawa atau Biditan bersama putranya Umbu Nggaba Landupraingu atau Umbu Hau mara dan Umbu Diki Purandawa atau Umbu Parameha. Pada 25 Agustus 1901 tibalah kapal perang *Jawa* di pelabuhan Waingapu dan kemudian datang pula kapal uap *Pelikaan* yang mengangkut residen dari Kupang de-

19) P. Nyoko : Kabupaten Sumba Timur, Skripsi jurusan Sejarah
FK Undana, 1969, hal. 86.

20) Ibid, hal. 86

ngan pasukan.

Pada 27 Agustus 1901 Kapten Dijk dengan pasukan yang terdiri dari serdadu yang berasal dari suku Sabu, Ende, Bugis sebagai pembantu, melakukan penyerangan ke Lambanapu sebagai pusat pemerintahan kerajaan Lewa Kampera. Akibat kekuatan dan persenjataan yang tidak seimbang raja Lambanapu dengan pengikut-pengikutnya terpaksa melarikan diri kepedalaman. Pasukan Belanda merampas harta rakyat dan raja serta tempat kediaman raja dibakar. Namun demikian raja Umbu Biditan serta Umbu Haumara dan Umbu Rameha baru menyerah pada tahun 1907, kemudian dibuang ke Padang.

b. Perang Kananggar.

Perlawanan ini terjadi karena tuntutan pembayaran pajak dan kerja rodi yang dirasakan berat.

Rakyat Kananggar mengangkat senjata di bawah pimpinan Umbu Nai Lalu atau I Landu Wulang I Janggamenang dan Umbu Nai Keba atau Umbu Marahongu pada tahun 1908. Namun perang ini tidak berlangsung lama. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Steiff ²¹⁾ berhasil membujuk Umbu Nai Lalu untuk ditinggalkan sebagai raja Masu Karera.

c. Perang Mangili.

Perang Mangili terjadi pada tahun 1908, adanya kerja rodi dan pajak yang dikenakan kepada rakyat oleh kekuasaan Belanda. Adapun pemimpin peperangan ini adalah Umbu Tunggu Wuku. Namun akhirnya mereka dapat ditangkap oleh pasukan Belanda dengan jalan tipu muslihat. Umbu Tunggu Wuku akhirnya dibuang ke seberang. ²²⁾

d. Perlawanan Watulade di Wewewa

Pada bulan Agustus 1909 di Wewewa terjadi perlawanan yang dilakukan penduduk desa Watulade. Dalam perlawanan ini Letnan de Neewe luka parah. ²³⁾ Karena lukanya de Neewe terpaksa dirawat di Jawa. Perlawanan ini dapat dipadamkan oleh pasukan Belanda. De Neewe yang telah sembuh setelah kembali ke Sumba terbunuh dalam peristiwa perlawanan di Lamboya pada waktu sedang memungut pajak. Perlawanan ini

21) Ibid

22) U.H. Kapita : Sejarah Perkembangan Ketentaraan Daswati II Sumba Timur, hal. 48 - 49.

23) Loc. Cit.

dipimpin oleh Tadu Moli.

e. Perlawanan Kodi

Perlawanan yang terjadi pada tahun 1911 ini dipimpin oleh Rato Loghe Kandua raja kerajaan Kodi. Sebab perlawanan adalah karena soal pajak dan rodi yang dirasakan terlalu berat bagi rakyat. Untuk memadamkan pemberontakan ini dikirimkan pasukan di bawah pimpinan seorang komandan bernama Dijkman.²⁴⁾ Dalam perlawanan ini banyak anggota pasukan Belanda yang terbunuh. Pasukan Belanda mendapat perlindungan Raja Mbangedo sehingga tidak mengalami kehancuran. Bala bantuan pasukan oleh Belanda telah dikirimkan dengan pemimpinnya Letnan Barendsur. Raja Rato Loghe dengan kemenakannya bernama Dera Wuda berhasil ditangkap dan ditahan di Mamboro. Raja Rato Loghe, karena menderita siksaan akhir meninggal dunia. Namun rakyat Kodi tetap menjalankan perlawanan dipimpin oleh Wonakaka dengan cara gerilya. Perlawanan ini akhirnya menjaral pula ke Waimangura yang merupakan tempat asal dari istri Wonokaka. Pada bulan Desember 1912 sebagian besar pasukan Letnan Barendsur terbunuh. Namun Letnan Barendsur sendiri lolos karena pertolongan raja Waimangura yang bernama Rato Ndimu dan seorang kepala sekolah bernama Enos Wadu. Rato Ndimu sebenarnya adalah mertua dari Wonokaka, namun Wiri Mbulu yang merupakan istri Wonokaka dan anak Rato Ndimu meninggalkan Wonokaka dan akhirnya kawin dengan Letnan Barendsur. Perlawanan Wonokaka akhirnya mengalami kemunduran lebih-lebih setelah salah seorang istrinya tertembak mati dan Wiri Mbulu kawin dengan Letnan Barendsur. Dengan perantara raja Laora yang bernama Ama Mbiri Kalembang, Wonokaka menyerahkan diri dan dibuang ke seberang.

f. Perang Lai Nyanyar (Tabundung)

Pada tahun 1917 timbul suatu perlawanan rakyat Tabundung terhadap kekuasaan Belanda. Perlawanan ini berlatar belakang adanya penolakan pajak dan kerja rodi yang dikenakan oleh pemerintah Belanda. Pemimpin perlawanan adalah Hina Andumara. Namun perlawanan ini tidak berlangsung lama, setelah pasukan Belanda dikirim untuk mengatasi perlawanan

24) Ibid, hal. 49.

Hina Andumara.

g. Peristiwa Landurang di Napu.

Pada tahun 1925 terjadi perlawanan di Napu yang dilaksanakan oleh Reku Landurang. Rakyat di bawah pimpinan Reku Landurang menolak membayar pajak dan kerja rodi pada Belanda. Dalam perlawanan ini didukung pula oleh Umbu Ndilu Danguramba raja dari Napu dan Umbu Nai Tahu raja Kapunduk. Namun perlawanan berhasil dipadamkan dan kedua raja tersebut diturunkan oleh Belanda. Swapraja Napu dan Kapunduk dihapuskan serta digabungkan dengan swapraja Kanatang.

2. Daerah Flores

a. Perlawanan Motang Rua

Perlawanan ini terjadi di daerah Manggarai yang dipimpin oleh Kraeng Motang Rua. Pada tanggal 18 Oktober 1907 kapten H. Christoffel dibantu oleh Letnan G.D. Spander, pembantu Letnan Saragouw dan Saymina mengadakan suatu perjalanan ekspedisi ke Manggarai dari pusat kedudukan Belanda di Ende.²⁵⁾

Rombongan pasukan Belanda ini berjumlah 50 orang dan mendarat di Mborong. Tanggal 19 Oktober 1907 pasukan Belanda melanjutkan perjalanan ke Ruteng ibu kota Manggarai. Ekspedisi ini bermaksud menangkap Kraeng Beo Ame Enggong dan Kraeng Wanggur yang dianggap mau melakukan perlawanan setelah terjadi perang saudara di Manggarai antara kedua tokoh tersebut melawan Mengko Medewong, Daeng Hema dan Masyomi.

Karena kedatangan pasukan Belanda yang mendadak, Kraeng Beo Ame Enggong berhasil ditangkap dan dibawa ke Ende lalu ke Kupang, kemudian karena tidak terbukti kesalahannya dia dibebaskan kembali.

Pasukan Belanda yang berhasil menangkap Kraeng Beo Ame Enggong melanjutkan usahanya untuk menangkap Kraeng Motang Rua yang melakukan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan karena ketidak-puasan akan kedatangan pasukan Belanda dan kekejaman terhadap pemikul beban. Pertempuran terjadi di Benteng Wake pusat kedudukan Kraeng Motang Rua dalam menghadapi pasukan Belanda. Pasukan patroli Belanda di ba-

25) D. Hemo : Sejarah Perlawanan Kraeng Motang Rua melawan Belanda di Manggarai, 1972, hal. 20

wah pimpinan Manafe Tallo dengan kekuatan 50 orang mengalami kekalahan. Untuk membalas kealahannya itu, Belanda mengirim ekspedisi kedua pada tanggal 15 Juni 1908 di bawah pimpinan Letnan G.D. Spander dengan kekuatan 120 pasukan ia dan 60 orang hukuman. Pertempuran terjadi di Copu dan Kraeng Motang Rua mengalami kekalahan. Namun Motang Rua pantang menyerah, barulah dengan akal yang licik Motang Rua dapat ditangkap. Pada tahun 1908 dia dibuang ke Kupang kemudian ke Bima dan Nusa Kambangan. Tahun 1912 Motang Rua dipindah ke penjara Cipinang, Jakarta, tahun 1919 dipindahkan ke Palembang dan tahun 1923 dipindahkan ke Aceh.

b. Perlawanan di Daerah Ngada.

Serangkaian perlawanan di Ngada terjadi sebagai reaksi terhadap ekspedisi yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 12 Agustus 1907 di bawah pimpinan Kapten H. Christoffel dengan 8 brigade Marsose ²⁶⁾

Perlawanan penduduk terjadi di Rowa, Sara, Mengulewa dan Rakalaba, Langa dan kampung-kampung lainnya. Pada tahun 1909 penduduk Soa yang mengadakan perlawanan menyerah. Tetapi perlawanan terjadi lagi di Raja pada bulan Juni 1909 namun berhasil dipadamkan oleh pasukan Belanda. Perlawanan mencapai puncaknya pada tahun 1910 akibat pajak yang berat yang dibebankan kepada penduduk. Di Lejo pecah perlawanan di bawah pimpinan Lewa Wula. Perlawanan berlangsung sampai tahun 1913. Namun setelah perlawanan di Lejo dipadamkan, pada tahun 1916 sampai 1917 berkobar pula perlawanan di Watuapi. ²⁷⁾ Perlawanan ini di bawah pimpinan Nipa Do karena rasa ketidak-puasan akan makin besarnya pengaruh Belanda dan pajak sejak kerja rodi yang berat. Namun perlawanan ini pun akhirnya berhasil dipadamkan setelah mengalami perlawanan di Nangapanda, Kotawake, Wagh'a, Teokodo dan Keli Luja.

3. Daerah Timor.

Pada awal abad ke-20 kekuasaan Belanda tidak saja mendapat perlawanan di pulau Sumba dan Flores tetapi juga di pulau

26) Nuwa Tiwa, 1976, hal. 33.

27) L.M. Tuewedo : Sejarah Perlawanan Rakyat Watuapi terhadap Belanda 1916 - 1917 Kupang, 1976, hal. 124.

Timor. Serangkaian perlawanan di berbagai tempat timbul dalam rangka menentang Belanda. Pada tahun 1907 terjadi perlawanan di Bakuin Almenalesa dan Fotilo.

Pada tahun 1907 terjadi Perang Kolbano di bawah pimpinan Boy Kapitan, dengan menimbulkan korban 19 anggota pasukan Belanda.

Tahun 1908 di Retirai (Lidak), Meo Moruk Pah Sunan melakukan perlawanan. Tahun 1910 terjadi perlawanan di Takan di bawah pimpinan Meo Asa Metan dan di Niki-Niki. Perlawanan-perlawanan tersebut pada umumnya adalah karena adanya rasa ketidak puasan akibat makin meluasnya pengaruh Belanda, pajak-pajak yang harus dibayar oleh penduduk dan campur tangan Belanda yang semakin besar. Namun perlawanan demi perlawanan akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda. Hal ini disebabkan karena persenjataan pasukan Belanda lebih lengkap serta pada umumnya perlawanan-perlawanan tersebut terpisah-pisah dan tidak ada hubungan satu dengan lainnya. Sering dalam memperlemah kedudukan lawan-lawannya, Belanda menjalankan politik memecah belah di antara sesama kekuatan yang menentang kekuasaan Belanda.

Suatu perlawanan yang terbesar ialah yang dilakukan oleh Sonbai, namun dengan akal yang licik dan politik memecah belah akhirnya perlawanan Sonbai berhasil dipatahkan pula oleh Belanda pada tahun 1906. Sobe Sonbai III ditangkap dan dibuang ke Sumba. Perlawanan Sonbai dimulai sejak sebelum tahun 1800 di bawah Buab Sonbai. Kemudian perlawanan makin meningkat di bawah pimpinan Sobe Sonbai II pada tahun 1823. Dengan demikian perlawanan ini adalah merupakan perlawanan yang terbesar dan paling lama yang dialami Belanda untuk daerah Timor.

Setelah pemerintah kolonial berhasil memadamkan perlawanan demi perlawanan di beberapa daerah serta mengadakan kontrak-kontrak maka pemerintah kolonial Belanda berhasil mempersatukan daerah Nusa Tenggara Timur dalam pemerintahannya.

Dari tahun 1900 sampai tahun 1927 pemerintah kolonial Belanda telah mengadakan 73 buah kontrak *korte verklaring* dengan raja-raja kecil di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur. ²⁸⁾

28) Mededeelingen, Seri A, no 3, 1929, hal 665 - 686

Di antara raja-raja yang menandatangani kontrak *korte verklaring* pada tahun 1900 ialah Usif Amapaha raja Biboki Timur, La Usuf Pua Natek Raja Ende, Malakari raja Pureman Alor. Pada tahun 1901 raja-raja yang menandatangani kontrak adalah Umbu Janggatara raja Kapunduk, Ratu Loghe Kendua raja Kodi keduanya dari Sumba. Pada tahun yang sama Belanda telah mengadakan kontrak kenaikan pajak dengan 20 raja-raja daerah. Di antara raja-raja tersebut adalah Liwu, raja Lamakera, Kalake raja Lohayong, Pating Belo raja Terong, Adiraja Amakala, Petor Pua Mamek Bestuur Riung, Tulimau raja Alor, Kulieman raja Bornusa, Go Amakale I raja Kui, Mau Tuku raja Kolana, Malakari raja Puriaman dari Alor, Lisilanu Au Nini raja Amfoang Naikliu, Baki Manuk raja Amfoang, usif Amapaka raja Biboki, Rasi Koroh raja Amarasi di Timor. Perjanjian yang sama dilakukan pula antara pemerintah kolonial Belanda dengan raja-raja : Umbu Lai Dundu dari Kapunduk, Umbu Tunibang dari Napu, Umbu Lai Sumbu dari Tarmanuk, Umbu Hina-Hama soko dari Melolo, Umbu Hina Marumata raja Rendeh Umbu Tangga Amabulu dari Laora, Ratu Sumba Dondong dari Kodi, ratu Loge Kendua dari Kodi Besar dan Umbu Tunggu Wamapsain dari Tabundung.²⁹⁾

Akhirnya dibentuklah wilayah hukum keresidenan Timor dan daerah takluknya yang terdiri dari tiga *afdeeling*, 15 *onder afdeeling* dan 48 swapraja. Pembagian mana ditentukan dalam *Staasblad* 1916 No. 331 dan 1916 No. 372.

Dari 48 swapraja yang ada, 45 buah berada di wilayah pulau Sumba, Flores dan Timor menjalankan pemerintahan berdasar 2 *Zelfbestuur Regelen*.

Jadi struktur pemerintahan di daerah pada masa 1900 - 1928 adalah sebagai berikut :

Residen sebagai kepala keresidenan. *Afdeeling* dikepalai oleh Asisten Residen. *Onder-afdeeling* dikepalai oleh kontrolur dan *Gezaghebber* yang kesemuanya adalah pangreh praja kolonial Belanda. Sedangkan di bawahnya adalah swapraja-swapraja yang diperintah oleh raja-raja.

Adapun ketiga *afdeeling* dengan 15 *onder afdeeling* dalam keresidenan Timor dan daerah takluknya adalah sebagai berikut:

- 1). *Afdeeling Timor* dengan pulau-pulaunya dengan ibu

29) Mededeelingen, Seri A, Ibid.

kota Kupang, memiliki enam onder afdeeling, yaitu :

Onder-afdeeling Kupang, dengan ibu kotanya Kupang, terdiri dari daerah-daerah gubernemen dan swapraja, yakni daerah gubernemen Kupang, daerah swapraja Amarasi, Kupang, Fatuleu dan Amfoang.

Onder-afdeeling Rote, dengan ibu kotanya Baa, terdiri dari swapraja Rote dan Sabu.

Onder-afdeeling Zuid Midden Timor (Timor Tengah Selatan) dengan ibu kotanya SoE, terdiri dari swapraja Mollo, Amanuban dan Amanatun.

Onder-afdeeling Noord Midden Timor (Timor Tengah Utara) dengan ibu kotanya Kefamenanu, meliputi swapraja Biboki, Insana dan Miomaffo.

Onder-afdeeling Belu dengan ibu kotanya Atambua, memiliki sebuah swapraja yakni Belu.

Onder-afdeeling Alor dengan ibu kotanya Kalabahi, meliputi tujuh swapraja yakni swapraja Barnusa, Pantar Matahari Naik, Alor, Kui, Kolanan, Batulolong dan Pureman.

2). *Afdeeling Flores*, dengan ibu kotanya Ende, terdiri dari lima *onder afdeeling* yakni Ende, Flores, Timur, Maumere, Ngada dan Manggarai.

Onder-afdeeling Ende, dengan ibu kotanya Ende meliputi swapraja Ende dan Lio.

Onder-afdeeling Flores Timur dan kepulauan Solor, dengan ibu kotanya Larantuka, meliputi Swapraja Larantuka dan swapraja Adonara.

Onder-afdeeling Maumere, dengan ibu kotanya Maumere, meliputi swapraja Sikka dan daerah takluknya.

Onder-afdeeling Ngada, dengan ibu kotanya Bajawa, meliputi swapraja Ngadh'a, Riung dan Nage Keo. Sedangkan *onder afdeeling* Manggarai dengan ibu kotanya Ruteng, meliputi swapraja Manggarai.

3). *Afdeeling Sumbawa dan Sumba*, dengan ibu kotanya Raba (Bima). *Afdeeling* ini terdiri dari empat *onder afdeeling* yakni *onder afdeeling* Bima, Sumbawa, Sumbawa Timur dan Sumbawa Barat.

Onder afdeeling Bima, dengan ibu kotanya Raba (Bima) meliputi swapraja Bima dan Dompu.

Onder afdeeling Sumbawa, dengan ibu kotanya Sumbawa Besar meliputi wilayah swapraja Sumbawa.

Onder afdeeling Sumba Timur, dengan ibu kotanya Wai-ngapu, meliputi tujuh wilayah swapraja yakni swapraja Kanatang, swapraja Lewa Kampera, Tabundung, Melolo, Waijelu, Rendi Mangili dan Masu Karere.

Onder afdeeling Sumba Barat, dengan ibu kotanya Wai-kabubak, meliputi sembilan swapraja yaitu swapraja Laora, Laoli, Waijewa, Waimangura, Kodi, Memboro, Umbu Ratu Nggai, Anakalang, Wanokaka dan Lamboya.

Dengan adanya sistem pemerintahan keresidenan tersebut, maka raja-raja tidak lagi mempunyai kedaulatan, sebab raja-raja hanya merupakan pejabat dalam suatu struktur pemerintahan kolonial Belanda. Timbul gelaran-gelaran baru yang berhubungan dengan jabatan pemerintahan, misalnya di tingkat desa di daerah Dawan, amaf timbul *Ketemukungan*, beberapa *Temukung* merupakan *Kefetoran* dan beberapa kefetoran menjadi suatu swapraja.

Dalam hal ini sesuai dengan kepentingan politik kolonial Belanda, sering terjadi beberapa swapraja dihapuskan atau digabungkan, misalnya enam buah kerajaan kecil di Kupang pada tahun 1917 digabungkan dalam kerajaan Kupang, yaitu Sonbai kecil, Funay, Tabenu, Amabi, Semau, Amabi Oefeto. Pada tahun 1916 kerajaan Rendi dan Mangili di Sumba digabungkan. Tahun 1915 Tananglia digabungkan dengan kerajaan Namboro dan Mbukam-bera dengan kerajaan Kodi. Tahun 1932 sebagai wilayah kerajaan Napu digabungkan dengan kerajaan Umbu Ratunggai dan sebagian bersama kerajaan Kapunduka digabungkan dengan kerajaan Kanatangu.³⁰⁾

Penggabungan-penggabungan tersebut tidaklah terbatas pada kerajaan-kerajaan tersebut di atas, tetapi juga bagi kerajaan-kerajaan yang lainnya yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Umumnya kerajaan-kerajaan yang mengalami penggabungan atau penghapusan adalah kerajaan-kerajaan yang menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

Beberapa raja-raja yang dikenal pada masa itu di antaranya untuk daerah Sumba adalah : Kerajaan Umalulu/Melolo Umbu

30) JU. H. Kapita, 1976, op. cit., hal. 56 - 57.

Hia Maramba Hamataki di Pau. Sedang *raja bantu* adalah Umbu Tai Rawambaku alias Umbuna i Kora di Paranigu dan Umbu Tai Tanggurani alias Umbu Kudu di Ngengadi. Kerajaan Rindi Mangili rajanya Umbu Hina Marumata di Parai Yamangu, sedang raja bantunya adalah Umbu Lumu Rihiamoku alias Umbuna i Pura di Kapa (Mangili). Kerajaan Wajelu rajanya Umbu Teulu Atakawan di Baingu dan raja bantu Umbu Kalambaru Parahi di Kabanda. Kerajaan Mahu Karera dengan rajanya Umbu Ndawa Hawula alias Umbuna i Laki di Kanonggaru.

Raja bantunya adalah Umbu Haru Halomatu alias Parawangu di Tanarangu, Karera dan Umbu Katanga Takanjanji alias Taranggaba di Lai Ronja, Mahu Barat. Raja-raja tersebut adalah raja-raja dalam kerajaan yang masuk wilayah kekuasaan *Onder afdeeling Sumba Timur*.

Sedangkan raja-raja dalam kerajaan yang termasuk kekuasaan *Onder afdeeling Sumba Tengah* yang pada tahun 1922 digabungkan ke dalam *onder afdeeling Sumba Timur* adalah kerajaan Lewa Kambera dengan rajanya Umbu Tunggu Yama Karemjawa dengan raja bantu Umbu Nggaba Landuparanigu atau Umbu Haumara di Kawangu dan Umbu Ndai Litiata atau Umbu Tanahamba di Lewa Paku. Kerajaan Tabundung dengan rajanya Umbu Tunggu Namuparanigu alias Pindingara. Raja bantunya adalah Umbu Kandubu Hawula alias Umbuna i Luta di Parai Kareha. Kerajaan Kanatang dengan rajanya Umbu Retangu Hadambewa alias Umbuna i Haru. Raja bantunya adalah Umbu Hunga Hama alias Umbuna i Ndawa di Rakawatu.

Kerajaan Napu dengan rajanya Umbu Landukura di Napu dan raja bantu Umbu Horungu Tanggukonda atau Umbuna i Kaliangu di Ndakurangu. Kerajaan Kapunduk dengan rajanya Umbu Nggaba Mekengukonda alias Umbuna i Taku.

Adapun raja-raja dalam wilayah *onder afdeeling Sumba Barat Utara* dan *Sumba Barat Selatan* yang kemudian menjadi *onder afdeeling Sumba Barat* adalah: Kerajaan Laora dengan rajanya Mbulu Kalumbang Danggungara alias Ama Mbiri Kalumbang dan raja bantunya Mboyo Taka di Tanariwu. Kerajaan mamboro rajanya Umbu Pombu Sarammi dan raja bantunya Umbu Mbeju di Mbolubokatu. Kerajaan Kodi dengan rajanya Nderaa Wula di Tahiko.

Kerajaan Mbangedo rajanya adalah Rija Kanda dan raja-raja bantunya adalah Rato Kuri di Rara, Rato Pakerengo di Ende

dan Rato Kalinga di Nggaura. Kerajaan Wewewa dengan rajanya Mete Umbu Pati di Elopada dan raja bantunya Rato Dimu di Lenggara dan Rato Dighala Atu di Manola.

Kerajaan Laoli dengan rajanya Umbu Nggailu Beku di Parai **Rami**, raja bantunya adalah Dangi Lede di Weetabara dan Umbu **Giku** Wolika di Wubangga. Kerajaan Wanokaka rajanya Baju Padedangu di Waihura. Kerajaan Lamboya dengan rajanya Kedu Moto. Sedangkan kerajaan Anakalang rajanya Umbu Ngailu Dedi di Makatakiri dan raja bantunya Umbu Babu Marambanjara di Parawatana. Adapun kerajaan Lawanda dengan rajanya Umbu Siwa Sambawali di Parai Malowi. Di antara nama-nama raja tersebut terdapat juga raja yang melakukan perlawanan kepada Belanda, misalnya Umbu Biditan dari kerajaan Lewa Kambera.³¹⁾

Adapun tokoh-tokoh di pihak pemerintahan kolonial Belanda di Sumba adalah Letnan Rijnders yang menjabat sebagai *Gezaghebber* sipil dan Militer pada tahun 1906 berkedudukan di Waingapu, dengan tugas mengamankan Sumba. Dalam melaksanakan tugasnya ia menampilkan Sersan Abbenk di Mamboro sebagai *post houder* dan Letnan de Neeve ditempatkan di Waikabubak. Letnan Rijnders selama enam tahun bekerja dan berhasil mengamankan perlawanan raja-raja di Sumba. Di antaranya perlawanan raja Lewa tahun 1907, 1908 perlawanan Mahu Karera, 1910 perlawanan di Mangili, 1911 perlawanan Kodi. Pada tahun 1912 Letnan Rijnders menyerahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil di bawah kontrolur A.J.L. Covreur.³²⁾

Kontrolur A.J.L. Covreur sebelum menjalankan pemerintahan di Sumba melakukan penyelidikan tentang keadaan susunan masyarakat seluruh Sumba. Sesudah terbentuknya *afdeeling* Sumba, A.J.L. Covreur menjabat sebagai asisten residen di Sumba.

Adapun tokoh-tokoh pemerintahan tradisional di daerah Dawan pulau Timor adalah sebagai berikut :

Kerajaan Amfoang rajanya adalah Elisabeth Tilnoni 1898 - 1927 yang kemudian digantikan oleh L. Manoch. Raja Kerajaan Amarasi pada tahun 1881 - 1910 adalah Rasi Koroh 1910 - 1917 raja Ishak Koroh, 1917 - 1926 Alexander Koroh dan sejak 1926 adalah raja Hendrik Koroh. Raja Hendrik Koroh merupakan seorang tokoh pemerintahan Timor.

31) U.H. Kapita : Ibid, hal. 51 - 52.

32) U.H. Kapita : Loc. Cit.

Kerajaan Fatuleu pada 1889–1911 yang menjadi raja adalah Sobe Sonbai, yang terkenal karena melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1911–1924 yang menggantikan menjadi raja adalah Chr. Taiboko dan sejak 1925 yang menjadi raja N. Nisoni.

Kerajaan Biboki yang menjadi raja pada tahun 1878–1911 adalah Tambesi Manlean, kemudian digantikan Kaubauk. Sedangkan raja kerajaan Insana dari 1858–1918 adalah Maklafu Nenoaklasi, kemudian digantikan Dominikus Taolin. Kerajaan Amanuban pada tahun 1864–1910 diperintah oleh raja Bell Nope, kemudian digantikan oleh Pae Nope. Raja kerajaan Amanatun tahun 1868–1922 adalah Muti Banunaek sedangkan raja kerajaan Miomaffe tahun 1873–1904 adalah Tokono, kemudian Kefi Lelang. Raja Mollo adalah Lai Akun, Sonbai Kecil diperintah oleh Bastian Nisoni 1898–1917, Funai diperintah oleh L. Funai 1897–1917, Amabi dengan rajanya N. Djabi 1889–1917, Amabi Oefeto diperintah oleh Leo Amnanu 1896–1917. Tabenu diperintah oleh B.H. Tanof 1887–1917, sedangkan Semau diperintah R. Bissing Lissing 1895–1917.

Adapun tokoh-tokoh pemerintahan kolonial Belanda di antaranya adalah:

Di Timur Tengah Utara pada tahun 1912–1921 ialah Letnan Stenis dan tahun 1921–1928 adalah Pende Ulars. Di daerah Timur Tengah Selatan di antaranya Telep 1912–1922, van den Wals 1922–1926 dan Briton 1926–1929. Sedangkan residen-residen yang pernah menjabat di Kupang antara lain Wijselaar pada tahun 1902. Kemudian ia digantikan oleh Heckler. Residen-residen selanjutnya antara lain de Rovy, Maijer.

Di daerah Flores tokoh-tokoh pemerintahan kolonial Belanda di antaranya Kapten H. Christoffel yang berjasa dalam mengadakan ekspedisi ke wilayah Barat Flores dan menaklukkan perlawanan-perlawanan di Mangarai dan Ngada.

Pembantu-pembantunya antara lain Letnan G.D. Spander, Letnan Saragouw dan Sayminan. Sedangkan kontrolur pertama yang berkedudukan di Ende yakni A. Covreur yang kemudian tahun 1909 digantikan oleh A. Hens. Pejabat ini kemudian pernah naik kedudukannya sebagai Asisten Residen *afdeeling Flores* di Ende. Sedangkan yang pernah menjabat sebagai *Gezaghebber* di Ende adalah van Suchtelen.

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAU PUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI PROSES JAMAN KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH

Kegiatan masyarakat yang ada hubungan atau merupakan embrio dari proses zaman kebangkitan nasional di daerah terutama adalah perkembangan pendidikan. Timbulnya sistem pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur adalah erat hubungannya dengan penyebaran agama Kristen Protestan dan Roma Katolik. Di mana untuk kepentingan agama pihak Zending dan misi mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Timbulnya lembaga-lembaga pendidikan ini maka memungkinkan anak-anak tidak saja belajar agama tetapi juga mengenal sistem pendidikan modern. Nantinya dari anak-anak yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada banyak yang melanjutkan sekolah ke lain daerah di luar NTT. Di samping itu juga banyak yang menjadi guru-guru dan pegawai. Dari kalangan mereka inilah nantinya yang merupakan perintis dan pemimpin pergerakan di daerah. Sekolah-sekolah di Sumba sebenarnya telah mulai ada pada tahun 1877 di Melolo dan Kambaniru.

Pada tahun 1908, Dr. Wielengá menjelajah Sumba Barat untuk peninjauan pembukaan sekolah. Pada tahun 1909 di Memboro dibuka sekolah rakyat (*volkschool*) dan tahun 1910 di Loura. Pada tahun 1909 Dr. J.F. Colenbrander tiba di Sumba dan menggiatkan pembukaan sekolah. Pada tahun 1910 dibuka juga sekolah rakyat di Lai Handangu, tahun 1912 di Waijelu, 1913 di Mangili dan Rendi serta di Kananggar.

Pada tahun 1913 tiba di Sumba seorang ahli pendidikan bernama van Dijk sebagai pengawas teknis pendidikan *School Opziener*.³³⁾ Pada masa ini para pendeta bertindak sebagai pengelola sekolah (*School Beheerder*). Berdasarkan *Sumba Regelen (Sumba Contract)* dalam *Staatsblad* tahun 1913 No. 309, memberi hak kepada Zending untuk menyelenggarakan sekolah rakyat mulai dengan 4 kelas. Tahun 1914 di Payeti dibuka sebuah *Standaarschool* sebagai penampung anak-anak terbaik dari *Volkschool*. Kemudian dibuka pula sebuah *Normaal Cursus* sebagai sekolah calon guru. Dengan dibukanya sekolah-sekolah tersebut

33) U.H. Kapita: *Sumba di dalam jangkauan Jaman*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1976, hal. 62-63.

maka banyak anak-anak yang dapat menikmati pendidikan lebih tinggi. Di mana pada tahun 1920 dibuka pula sebuah *Standaard-school* di Tanggoo/Karuni. Pada tahun 1924 di Komi, Karuni dibuka sebuah sekolah Theologia yang disebut *Theologische opleidingschool*. Di antara para pimpinan sekolah *Standaardschool* di Karuni yang dikenal adalah Caspar Pery tahun 1920, J. Chr. Rajah tahun 1924. Sedangkan sekolah di Payati tahun 1914 dipimpin oleh J.W. Tupu, tahun 1919 oleh Abraham Saparena dan tahun 1924 oleh DU. Latuparisa. Di antara pemimpin-pemimpin sekolah nantinya adalah dikenal sebagai pemimpin organisasi politik atau pergerakan.

Sekolah-sekolah di daerah pulau Timor terutama di daerah suku Dawan juga mengalami perkembangan. Pada periode 1900–1928 di Daerah Timor Tengah Selatan telah ada 16 buah sekolah yang dibuka, sedangkan di Timor Tengah Utara 14 buah sekolah rakyat (*volkschool*). Di antara sekolah-sekolah tersebut adalah didirikan di Kapan tahun 1910, pada tahun 1912 didirikan di Nevokoko, Pene dan Niki-Niki. Tahun 1913 di ToE, Ningkalo dan Putain. Dalam tahun 1916 di Ofu dan Bijeli. Tahun 1917 di Manufui dan Oepopo, tahun 1918 di Unianfatu dan Nifa. Tahun 1926 di Pesan, tahun 1927 di Sei dan tahun 1928 di Tobu.

Adapun sekolah rakyat yang didirikan di wilayah Timor Tengah Utara adalah di Neotoko tahun 1912, di Kefa dan Nahnano tahun 1916, di OELolo, Sufa tahun 1918, di NoEmuti dan Aplal tahun 1920, di Maubesi, Manumean, Manufui, Fautoin tahun 1925 dan di Tes, OEkui dan Eban tahun 1928.

Di daerah Kupang telah ada pula sekolah-sekolah rakyat yang dibuka sebanyak 22 buah. Pada tahun 1902 di Baa, Rote didirikan sebuah STOVIL yang kemudian pada tahun 1926 di pindahkan ke Kupang. Pendeta-pendeta yang memimpin Stovil di antaranya Dr. Le Grand, Dr. De Vries, Dr van de Waltrink dan Dr. Dopei.³⁴⁾

Di samping sekolah-sekolah tersebut sampai tahun 1923 di daerah Timor terdapat pula *vervolgschool* dan *Gouvernement Schakel School*. Pada waktu itu terdapat pula sebuah *Europeesche Lagere School*. Pada tahun 1923 dibuka juga *Christelijke Hollands*

34) F.L. Cooley: *Benih yang tumbuh*, jilid II, Arnoldus, Ende, 1976, hal. 45.

InLandsche School di Kupang yang pada tahun 1925 ditutup dan diganti dengan *Christelijke School*.

Adapun kegiatan pendidikan di daerah Flores dijalankan oleh Misi Katolik. Di Manggarai sekolah rakyat didirikan tahun 1911 yakni di Reo dan Labuhan Bajo. Pada tahun 1913 Misi mulai membuka sekolah-sekolah. Pada tahun 1915 telah terdapat 32 buah sekolah Misi dengan 70 tenaga guru dan 3000 murid. Pada tahun 1919 meningkat menjadi 70 buah sekolah dengan guru sejumlah 158 orang dan murid 6300 anak. Di samping sekolah desa yang hanya mengajarkan membaca, menulis, berhitung dan agama didirikan pula *standardschool* yang mendidik anak-anak dalam masa pendidikan 6 tahun.

Pada tahun 1919 dibuka pula sekolah pendidikan guru dua tahun yang disebut *Normaal Cursus* di Larantuka dan Lela didirikan Sekolah Kepandaian Putri dan tahun 1924 dibuka sekolah pertukangan di Ende dan tahun 1928 sekolah pertukangan Santo Yosef. Antara tahun 1919-1930 jumlah sekolah desa yang dibuka Misi di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 271 buah dengan 466 tenaga guru dan 25.384 murid.³⁵⁾

Pada tahun 1926 di Sikka didirikan *Seminari Menengah* yang pada tahun 1929 dipindahkan ke Todabelu.³⁶⁾

C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI

1. Politik.

Kegiatan partai ataupun organisasi politik di daerah pada masa 1900–1928 antara lain adalah:

a. *Timorsch Verbond*

Perkumpulan *Timorsch Verbond* didirikan atas inisiatif seorang guru, yakni D.S. Pello di Makasar pada tahun 1922. Organisasi ini dipimpin oleh J.W. Amalo sebagai Ketua Pengurus besar yang berkedudukan di Makasar. *Timorsch Verbond*. Dalam anggaran dasarnya sebenarnya bertujuan memajukan de-

35) *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, 3b, hal 1122.

36) F. Dhewi Beo: *Sejarah Perkembangan Persekolahan di Ngada*, Skripsi F.K. Undana, 1971, hal 25-26.

raja rohani dan jasmani dari para anggotanya, khususnya dari kaum Timor.³⁷⁾ Jelaslah bahwa asas dan tujuan dari *Timorsch Verbond* adalah merupakan suatu perkumpulan sosial. Tetapi dalam perkembangannya, *Timorsch Verbond* dalam segala tindakannya dan keyakinannya sudah menjadi partai politik yang tegas-tegas mencampuri soal ketatanegaraan. Dengan tindakan-tindakannya akhirnya menimbulkan kegoncangan-kegoncangan bagi pemerintah kolonial Belanda. Di samping itu juga menyadarkan semangat harga diri di antara anggotanya selaku manusia. Hal ini membawa pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya. Dua kejadian penting yang menarik ialah peristiwa Karuni di Sumba dan peristiwa Sabu. Kontrolur pemerintahan Kolonial Belanda di Sumba yang berkedudukan di Karuni bernama Dannenberger berhasil dihadapkan ke pengadilan Justisi di Makasar. Demikian juga seorang pejabat *Gezaghebber* bernama Israel yang berkedudukan di Sabu. Kedua pejabat pemerintah kolonial Belanda itu dituduh menganiaya beratus-ratus rakyat. Kekejaman kedua pejabat tersebut berhasil dibongkar berkat keberanian ketua cabang *Timorsch Verbond* di Karuni, Sumba yang bernama C.Piry dan Ketua cabang di Sabu yang bernama S.W. Tanya. Dari hasil pengadilan Justisi di Makasar kedua pamong praja pemerintah kolonial Belanda tersebut diputuskan dijatuhi hukuman dipecat dari jabatannya.

Sudah barang tentu kejadian yang demikian sangat menggemparkan karena petugas pemerintahan kolonial dijatuhi hukuman oleh pejabat hukum kolonial pula. Dengan demikian nama *Timorsch Verbond* menjadi sangat populer di kalangan rakyat, karena keberanian mengungkapkan peristiwa kekejaman pemerintah kolonial. Tetapi sebaliknya pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa *Timorsch Verbond* adalah suatu perkumpulan yang dapat membahayakan kedudukan Belanda. Oleh karena itu untuk membatasi pengaruhnya, dikeluarkan larangan bagi anggota-anggota tentara menjadi anggota *Timorsch Verbond*.

Timorsch Verbond mengadakan konggresnya yang pertama pada tahun 1925 di Makasar. Dalam konggres yang pertama ini telah dikunjungi oleh beratus-ratus utusan cabang dari berbagai kota di seluruh daerah Hindia Belanda di mana terdapat kaum

37) I.H.Doko.: *Nusa Tenggara Timur Dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* Masa Baru, Bandung, 1973, hal. 64.

Timor. Di samping perutusan Cabang-cabang dari *Timorsch Verbond*, dalam konggres dihadiri pula oleh berbagai utusan berbagai organisasi politik di daerah-daerah lain. Dalam konggres ini telah dikupas nyata-nyata soal politik dan pemerintahan. Dengan media massanya yang bernama *Suluh Timor* telah termuat uraian dan karangan-karangan yang hangat. Akibatnya *Timorsch Verbond* oleh pihak pemerintah kolonial Belanda dianggap atau dicap merah (komunis). Untuk membatasi ruang gerak organisasi ini pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan larangan dan ancaman bagi pegawai-pegawai yang aktif menjadi pengurus organisasi. Para pegawai yang menjadi pengurus cabang, banyak yang menjadi korban, antara lain dipecat dari jabatannya, diturunkan pangkatnya atau di pindahkan.

Berkat hasil perjuangan *Timorsch Verbond* berhasil didirikan HIS untuk anak-anak bumiputera di Kupang. Namun sekolah ini dan ELS ditutup pada tahun 1925 atas reaksi *Perserikatan Timor*. Atas ancaman-ancaman dari pihak yang berkuasa seperti yang tersebut di atas dan terjadinya pertentangan-pertentangan di dalam tubuh organisasi, maka sesudah konggres yang pertama di Makasar, *Timorsch Verbond* lumpuh.

b. *Perserikatan Timor*

Perserikatan Timor didirikan pada tahun 1925 oleh C. Frans, seorang *Hoofd Commies* di Kantor Residen di Kupang. Organisasi ini bersifat kooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda. *Perserikatan Timor* mempunyai cabang di Waingapu, Sumba. Karena sifatnya yang kooperasi, maka dalam banyak hal partai ini bertentangan dan bersaing dengan *Timorsch Verbond*.

Perserikatan Timor dalam pergerakannya mendapat dukungan sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Partai ini memiliki media masa sebagai salah satu alat kegiatannya yang bernama pula *Perserikatan Timor*. Biaya mass media ini pun didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam tulisan-tulisan yang dikenal selalu menghantam dan menyerang aksi-aksi yang dilakukan *Timorsch Verbond*.

Perserikatan Timor dalam bidang pendidikan berhasil memperjuangkan pembukaan sebuah *Schakelschool* pada tahun 1925, sebagai ganti HIS yang ditutup.

Persaingan *Perserikatan Timor* dan *Timorsch Verbond* sangat menguntungkan Belanda dan merugikan pergerakan di

daerah. Pemerintah kolonial Belanda yang mengetahui situasi tersebut menarik keuntungan dan membantu Perserikatan Timor yang lebih kooperasi dan dapat digunakan untuk melemahkan *Timorsch Verbond*.

c. Kerapatan Timor Evolusi

Di samping kedua organisasi politik di atas, pada tahun 1924 berdiri *Kerapatan Timor Evolusi*. Pendiri organisasi ini adalah J.W. Toepoe dan Christian Pandie. Namun partai ini tidak bertahan lama karena Christian Pandie memisahkan diri dan bersama-sama dengan haji Datuk Batuah, Natar Nazamuddin yang keduanya bekas pejuang di Aceh yang dibuang ke Timor. M.B.MoE dan M. Amtiran mendirikan sebuah partai baru yang diberi nama *Serikat Timor*, yang berasas sosialis. Tidak lama setelah berdiri, Serikat Timor diganti namanya dengan *Serikat Rakyat*. Partai ini mempunyai media massa yang bernama *Api*.

Dari partai-partai yang ada pada masa ini seperti tersebut di atas jelaslah bahwa baik secara formal maupun tidak terdapat petunjuk adanya hubungan dengan daerah lain. *Timorsch Verbond* sendiri pusatnya di Makasar dan cabangnya tidak terbatas di Nusa Tenggara Timur. Kerapatan Timor Evolusi, dua pendirinya yakni H. Datuk Batuah dan Natar Nazamuddin adalah pejuang dari Aceh dan Sumatra Barat yang dibuang ke Timor. Sedangkan Christian Pandie sendiri adalah anggota Partai Komunis di Jawa.

2. Organisasi Sosial

Seperti telah dikemukakan di atas salah satu organisasi sosial yang menonjol adalah *Timorsch Verbond*. Namun organisasi sosial ini dalam perkembangan kegiatan kemudian berubah menjadi organisasi politik, sekitar tahun 1925.

Di samping organisasi tersebut pada tahun 1910 di Timor, Kupang telah berdiri sebuah organisasi sosial yakni *Timor Studiefonds* di bawah pimpinan pendeta J. Sjoen. Sesuai dengan namanya aktivitas organisasi ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan bidang pendidikan. Tetapi sayang organisasi ini tidak berumur panjang.

Di Sumba pendeta dari *Zending der Gereformeerde Kerken* juga disamping bertugas di bidang agama juga mempraktekan perawatan kesehatan. Pada tiap-tiap pos *Zending* dibuka poliklinik.

Di Kambaniru sudah ada poliklinik sejak tahun 1894, di Melolo tahun 1898, di Payeti sejak 24 Desember 1914. Sebagai kelanjutan poliklinik ini pada tahun 1912 dibuka Rumah Sakit di Payeti. Di Tanggoo/Karuni, Dr. Krijger membuka poliklinik sejak 1913 dan pada tahun 1916 telah dibuka pula sebuah Rumah Sakit sederhana. Di Sumba Barat tahun 1924 telah diusahakan pembangunan Rumah Sakit di Waikabubak. Untuk maksud tersebut telah datang Dr. J. Berg pada tahun 1925 yang memulai dengan Rumah Sakit darurat.³⁸⁾

3. Organisasi Wanita

Organisasi wanita yang ada pada periode 1900–1928 sangat terbatas, di antaranya yang diketahui adalah *Protestansche Vrouwen Vereeniging*. Organisasi ini mempunyai aktivitas di bidang agama dan sosial di daerah Timor. Sedangkan di Sumba pada tahun 1930 muncul organisasi wanita yang bernama *Persatuan Kaum Ibu Kristen Ora Et Labora*.

Organisasi-organisasi tersebut sangat terbalas aktivitasnya terutama dalam rangka memajukan kaum wanita. Organisasi ini pun tidak berumur panjang.

4. Agama

Kegiatan pengembangan agama pada periode 1900–1928 mengalami kemajuan yang pesat baik dalam pengembangan agama Kristen Protestan, Katolik dan Islam.

Perkembangan agama Protestan pada masa ini berpusat di daerah Timor dan kepulauannya serta pulau Sumba. Di Sumba kalau masa sebelumnya pengembangan agama Kristen berada di bawah *Zending Christelijke Gereformeerde Kerk*, diambil alih oleh *Zending der Gereformeerde Kerken*.

Di Sumba sidang Jemaat Kambaniru dilayani oleh Dr. C. de Bruijn dan sidang Jemaat Kelolo oleh Dr. W.Pos, Dr. D.K. Wielenga membuka pos Zending di Payeti pada tanggal 30 September 1907. Pada tahun 1909 tiba di Sumba Dr. J.F. Colenbrander untuk mengisi lowongan Dr. W.Pos di Melolo yang pulang ke negeri Belanda. Dr. Colenbrander menggiatkan usaha pembukaan sekolah-sekolah di Sumba.

38) U.H. Kapita, *op. Cit.*, 1976, hal. 54.

Pada tahun 1912 datang Dr. L.P. Krijger khusus diutus ke Sumba Barat mengisi lowongan tugas Dr. Wielenga. Dr. Krijger menempati posnya di Karuni. Dengan demikian sampai tahun 1913 di Sumba terdapat 4 pos Zending yakni Kambaniru, Melolo, Payeti, dan Karuni.³⁹⁾

Sedangkan untuk daerah Timor pada tahun 1910 ditempatkan seorang Predikant *Voorzitter* di Kupang yang memimpin gereja di seluruh Keresidenan Timor, yaitu Dr. Willem Back. Dia mengusahakan pekabaran Injil di pulau Alor pada tahun 1911 dan berhasil membaptis 100 orang. Antara tahun 1915–1916 yang menjabat sebagai *Predikant Voorzitter* ialah Visser. Hulp Predikant pada waktu itu, Dr. Groothuis berkedudukan di Babau.⁴⁰⁾ Ia berusaha menterjemahkan Injil ke dalam bahasa Timor. Pada tahun 1916, Injil baru mulai masuk ke pedalaman Timor. Antara tahun 1916–1919 yang menjabat *Predikant Voorzitter* ialah Dr. R.W.F. Kijtenbeit, yang membagi pulau Timor atas delapan resort. Di Alor untuk pertama kali ditempatkan seorang pendeta tahun 1911, yakni Dr. Ten Carte, yang kemudian pada tahun 1918 diganti oleh Dr. Sinkhuize, 1921 oleh Hehanusa, 1923–1924 oleh van Daalen dan 1925–1926 oleh W. Akerman.

Di pulau Timor pada tahun 1922 tiba Dr. P. Middelkoop yang banyak melakukan penyelidikan bahasa dan adat istiadat daerah Timor, dan menterjemahkan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Timor.

Pada tahun 1925 di seluruh keresidenan Timor terdapat satu *Predikant Voorzitter* yang berkedudukan di Kupang dan membawahi tujuh wilayah (resort) yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Hulp Predikant* yakni wilayah Kupang terdiri dari 27 Jemaat dengan 8721 anggota, wilayah Camplong, wilayah Kapan dengan 1 jemaat, 500 anggota, wilayah Baa (Rote) dan Sabu terdiri dari 43 jemaat dengan 32724 anggota, sedang wilayah-wilayah lain adalah Kalabahi (Alor), Wawuli dan Serwaru.⁴¹⁾

Dalam perkembangan agama Katolik masa sesudah tahun 1900 mengalami perkembangan yang pesat di bawah asuhan misionaris Yesuit. Suatu fase baru dimulai pada tahun 1913 dengan berdirinya *Prefektur Apostolik Nusa Tenggara* dengan Prefek pertama Mgr. P. Noyen svd. Dengan demikian pekerjaan Misioner

39) U.H. Kapita, *Ibid*, hal. 62

40) F.L. Cooley: *Benih yang tumbuh*, jilid II, 1976, hal. 46.

41) *Ibid*, hal. 46.

naris di Nusa Tenggara makin lancar. Pada waktu itu Flores masih belum termasuk dalam prefek tersebut dan baru pada tahun 1914 Prefek P. Noyen svd mengadakan perjalanan ke Flores dan Timor serta sangat terkesan akan hasil-hasil Misi. Kemudian P. Noyen svd menulis laporan kepada *Generalat Societas Verbi Divini (SVD)* di Steyl, bahwa sangat diperlukan tambahan tenaga misionaris di Maumere dan Larantuka.

Telah ada gagasan untuk menggantikan pekerjaan Misionaris dari tangan *Ordo Yesuit* ke *Ordo Societas Verbi Divini ((SVD)*. Dengan rencana pertama penggantian akan dimulai di bagian barat Flores kemudian di bagian Timur. Namun karena di Eropa meletus Perang Dunia I, rencana tersebut mengalami keterlambatan.

Pada waktu itu juga terjadi perubahan di mana pusat Prefektur Apostolik Nusa Tenggara dipindahkan ke Ende. Oleh karena itu pada tahun 1915 telah dipersiapkan gedung-gedung pusat Missi di Ndona (Ende).

Pada tahun 1915 P.W. Boach svd yang bekerja di Timor sejak tahun 1913 pindah ke Larantuka, dan merupakan tenaga SVD yang pertama di Flores. Pada tahun 1916 dua orang Pater, bruder dan lima zuster akan bertolak dari Steyl untuk bekerja di Nusa Tenggara Timor. Dengan demikian secara perlahan-lahan pekerjaan misionaris Yesuit digantikan oleh misionaris svd.

Dalam tahun 1922 Prefektur Apostolik Ende menjadi *Vikariat Apostolik*. Dan pada tahun 1923 terjadi pembaharuan kontrak antara Misi dengan pemerintahan kolonial Belanda tentang sekolah-sekolah. Pada waktu itu telah terdapat 25000 umat Katolik.⁴²⁾

Agama Islam sesudah tahun 1900 mengalami perkembangan juga, terutama di daerah-daerah pantai di pulau Flores, Sumba, Solor, Alor, Kupang, Rote, dan Sabu. Namun tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah umat Islam pada waktu itu.

5. Pendidikan

Organisasi pendidikan yang ada pada masa ini sangat erat hubungannya dengan Misi Katolik dan Zending. Hal ini disebabkan pendidikan yang ada sebagian besar dirintis oleh Zending dan Misi

42) *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*, 3A, 1973, hal. 1094, 1095, 1096.

dalam rangka pengembangan agama. Namun dalam perkembangan selanjutnya sebagai akibat Politik Etis, maka tidak hanya masalah pendidikan yang ditangani oleh Zending dan Misi semakin berkembang, tetapi juga pemerintah mulai mendirikan gedung-gedung sekolah pula.

Di daerah Timor, dua organisasi pendidikan yang terkenal adalah *Pengurus Persekolahan Kristen Timor* yang dibentuk tahun 1912 di Kupang dengan cabangnya di SoE. Organisasi ini didirikan dalam rangka mengelola sekolah-sekolah rakyat (*Volkschool*) yang telah banyak didirikan oleh Zending di Timor.

Dari periode tahun 1900–1928 *Pengurus Persekolahan Kristen Timor* (PPKT) telah berhasil mengelola 16 buah sekolah rakyat.

Di samping itu pada tahun 1914 berdiri pula *PAPKAT* (*Pengurus Persekolahan Katolik Timor*) yang berkedudukan di Belu dengan cabangnya Di OElolok, dan telah berhasil mendirikan dan mengelola 14 buah sekolah rakyat (*Volkschool*).

6. Seni Budaya

Keadaan Seni Budaya pada periode tahun 1900–1928, baik seni tari, seni suara, seni ikat, tidak banyak mengalami perubahan. Kesenian tradisional tetap hidup di kalangan penduduk. Namun dengan semakin berkembangnya agama Kristen dan Katolik, maka semakin berkembang juga pengenalan huruf Latin dan nyanyian kerohanian (gereja). Sandiwara berdasarkan cerita keagamaan mulai dikenal juga, terutama dalam hubungannya dengan upacara-upacara gerejani. Kalau masa-masa sebelumnya di bidang seni bangunan penduduk hanya mengenal seni bangunan tradisional yakni rumah berbentuk panggung dengan atap dari rumput atau ijuk, kecuali rumah di daerah Dawan (Timor) yang tidak berbentuk panggung, mulai dikenal bentuk-bentuk bangunan non tradisional, berupa rumah-rumah ibadat yang dalam hal ini berupa rumah-rumah gereja, mesjid dan juga rumah-rumah tinggal yang berbentuk segi empat, atap seng dan sebagainya.

Mulailah suatu fase baru dengan dikenalnya rumah bentuk asing, *ume kase* (menurut istilah Dawan) yang menembus bentuk-bentuk tradisional, di mana rumah tinggal berfungsi sebagai tempat tinggal semata-mata. Berbeda dengan rumah tradisional yang mempunyai kaitan erat dengan faktor kepercayaan, faktor suku dan sebagainya. Pada bentuk-bentuk baru ini tidak dikenal

lagi adanya tiang-tiang agung tersuci, dapur di dalam rumah, ruang suci, tempat menyimpan benda-benda keramat dan sebagainya.

Dalam bidang musik mulai dikenal alat-alat musik baru berupa gitar yang dibuat sendiri, meniru alat-alat musik yang datang dari luar. Di pusat-pusat kota mulai dikenal permainan orkes, musik Barat dan dansa.

7. Kepemudaan dan kependuan

Organisasi kepemudaan dan kependuan pada masa ini **belum** berkembang, karena para pemuda pada waktu itu lebih **banyak** terjun pada organisasi politik dan sosial. Organisasi kepemudaan dan kependuan baru berkembang sesudah masa tahun 1928.

8. Pers

Di daerah Nusa Tenggara Timor antara tahun 1900–1928 **telah** mulai timbul juga kegiatan pers daerah, yang pada umumnya berkaitan dengan organisasi politik yang ada.

Pers daerah yang ada antara lain adalah *Pewarta Timor* yang dipimpin oleh N.Poru, *Cermin Timor* dipimpin oleh K.Jami. Kedua media massa ini terbit empat kali dalam sebulan atau berupa mingguan dan mulai terbit pada tahun 1926 di Kupang.

Di samping itu *Timorsch Verbond* mempunyai media massa bernama *Suluh Timor*. Media massa ini berbahasa Melayu dan terbit tiap bulan sekali. *Suluh Timor* ini menyuarakan perjuangan *Timorsch Verbond* dan tersebar di kalangan para anggota dan simpatisan yang terdapat di berbagai daerah NTT dan luar daerah. Sedangkan C. Frans yang merupakan tokoh *Perserikatan Timor* mendirikan Pers bernama *Perserikatan Timor*. Serikat Rakyat yang radikal di bawah pimpinan Christian Pandie mendirikan bernama *Api* sebagai saluran suara perjuangan Serikat Rakyat.

Pertumbuhan Pers daerah tersebut sangat tergantung pada organisasi induknya. Dalam arti selama organisasi induknya berkembang, maka persnya juga ikut berkembang. Pers daerah mempunyai peranan sangat besar, tidak saja menyuarakan kegiatan organisasi tetapi juga memberi kesadaran yang lebih luas terutama di kalangan orang terdidik. Hal ini disebabkan karena pers tersebut berusaha menjangkau tidak semata-mata pada anggota

organisasi yang bersangkutan saja, tetapi juga merupakan sumber informasi non pemerintah dan bisa tersebar ke berbagai daerah.

9. Koperasi

Pada tahun 1910 pernah timbul semacam gerakan koperasi yang dipelopori oleh C.Frans, dengan nama *Toko Kemajuan Timor*. Modal dari usaha ini beberapa ratus ribu yang dipungut dari seluruh anggota masyarakat dalam keresidenan Timor. Sayangnya usaha yang bagus ini tidak berumur panjang karena bangkrut.

D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 – 1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD

1. Sikap pemerintah Hindia Belanda

Pecahnya Perang Dunia I (1914 – 1918) membawa pengaruh besar pada situasi kolonial dan menimbulkan masalah-masalah baru tentang masa depan kolonial. Pada Umumnya suasana di antara rakyat cukup baik, bahkan dari mana-mana disampaikan pernyataan setia kepada pemerintah Belanda. Di samping pernyataan loyalitas itu juga timbul persoalan sekitar cara-cara mempertahankan pemerintah Hindia Belanda.

Panitia yang kemudian didirikan dan dikenal sebagai Panitia *Indie Weerbaar* (India berketahanan) terdiri atas berbagai perserikatan pribumi yang terkemuka.⁴³⁾

Timbullah pada masa ini politik asosiasi dengan tujuan hendak menyalurkan aliran-aliran/paham dalam masyarakat pribumi dan menjembatani paham yang berlawanan, tiruan atau penyesuaian. Masyarakat Hindia Belanda perlu bertindak dengan berlandaskan pada persamaan kedudukan dan saling hormat menghormati. Alat yang sangat utama untuk mencapai sistem asosiasi itu ialah pengajaran. Salah satu tujuan dalam sistem asosiasi itu ialah pengembangan kebudayaan Belanda, antara lain melalui pengajaran. Meskipun pengajaran adalah tugas pokok pemerintah, tetapi inisiatip swasta hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang. Dengan menyebar luaskan pengajaran bahasa Belanda, dapatlah pelajar diharapkan dapat berpikir secara Barat.

Sudah barang tentu keadaan demikian sangat berpengaruh

43) Sartono Kartodirdjo *et al*, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V, 1975, hal. 65.

terhadap keadaan politik kolonial Belanda di daerah-daerah. Di satu segi, politik kolonial Belanda kelihatan lunak dan baik hati dengan memberi keleluasaan perkembangan pendidikan, tetapi dengan tujuan yang menguntungkan. Dan hal ini juga berlaku di daerah Nusa Tenggara Timur. Pada periode 1914-1918 justru pendidikan berkembang dengan pesat karena banyak sekolah-sekolah rakyat dan Standardschool dibuka baik di pulau Timor, Sumba dan Flores seperti telah diuraikan di atas. Namun masa ini pemerintah kolonial Belanda juga bertindak tegas terhadap usaha-usaha yang bersifat menentang pemerintah.

Seperti juga telah diuraikan sebelumnya justru antara tahun 1914-1918 bahkan sampai tahun 1926 masih terdapat perlawanan dari raja-raja di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Antara lain perlawanan pada tahun 1914 di distrik Probur, Alor dan daerah Atimelang, tahun 1915 terjadi perlawanan di kerajaan Kui Alor, tahun 1916 terjadi perlawanan di jasad Kabola Alor. Perlawanan-perlawanan ini terjadi dalam rangka menentang pemerintah kolonial Belanda yang dianggap terlalu banyak mencampuri urusan kebebasan penduduk dan penguasa tradisional. Demikian juga perlawanan di Watuapi yang dipimpin oleh Nipa Do dan Kepa Bui di daerah Ngada Flores, perlawanan Kraeng Motang Rua di Manggarai. Tahun 1917 terjadi perang Tabundung di Sumba, tahun 1925 di Napu dan tahun 1926 di Haing di Tanganang, Sumba. Namun semua perlawanan tersebut di atas dengan segera dapat ditindak tegas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Satu persatu pemimpin yang menjadi pimpinannya diturunkan dari kedudukannya atau pun ditangkap dan dibuang ke luar daerah. Pada masa ini pemerintah kolonial Belanda sibuk melaksanakan taktik dalam rangka mempersatukan daerah dengan mendekati raja-raja dengan perjanjian *korte verklaring*.

Pemerintah kolonial Belanda berhasil membentuk struktur pemerintah berdasarkan *zelfbestuur Regelen*, di mana seluruh pemerintahan raja-raja dipersatukan di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial dalam bentuk suatu keresidenan Timor dan daerah takluknya yang meliputi pulau Timor, Sumba, Flores, dan Sumbawa. Seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya keresidenan Timor dengan daerah takluknya terdiri dari tiga *afdeeling* yakni Timor, Flores dan Sumbawa, Sumba dengan 15 *onderafdeeling* dan 45 swapraja.

Pada masa ini struktur pemerintahan di daerah terdiri atas residen, asisten residen, kontrolur dan *gezaghebber* merupakan

aparatus pamong praja pemerintah kolonial Belanda. Kontrolur sebagai kepala *onder-afdeeling* dibantu pamong praja bumi putera berpangkat *bestuur assistent*. Kemudian di bawah pejabat ini ialah raja atau *Zelfbestuur*, *fettor* atau *kapitan*, temukung, kemudian rakyat. Dengan menandatangani *korte verklaring* raja-raja yang sebelumnya berdaulat, menjadi bawahan Belanda dan harus tunduk kepada Belanda. Raja-raja yang menandatangani *korte verklaring* diberi piagam, tanda kebesaran berupa tongkat berkepala perak atau emas, bendera Belanda. Kalau pada masa sebelumnya masih ada beberapa raja yang bebas, pada periode 1914-1918 seluruhnya telah berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

2. Hubungan dengan Volksraad

Dengan adanya politik etis yang bertujuan memajukan rakyat dan karena makin bertambah besarnya biaya administrasi, ada gagasan untuk menghapuskan dualisme dan menggantikan pejabat Belanda dengan pejabat Indonesia. Pejabat Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai perluasan tetapi sebagai alat administrasi yang telah dibebaskan dari bimbingan pejabat Belanda (*Ontvoogding*).

Salah satu bentuk pelaksanaan dan pemberian otonomi kepada Hindia Belanda yaitu persiapan mendirikan *Dewan Rakyat*. Pada tahun 1913 de Waal Malefijt mengusulkan pendirian suatu *Dewan Kolonial* yang anggotanya terdiri atas 29 orang, di antaranya anggota-anggota Dewan Hindia, 11 anggota dipilih oleh *Dewan Lokal*, sebagian mewakili kepentingan Belanda dan sebagian lain diangkat, untuk membela kepentingan pribumi. *Volksraad* atau Dewan Rakyat menjadi badan perwakilan yang beranggotakan 39 orang di mana 19 orang anggotanya diangkat oleh pemerintah.

Badan ini mempunyai kekuasaan Legislatif tetapi hanya memberi advis antara lain mengenai masalah keuangan. Pada tahun 1920, jumlah anggota menjadi 49 orang, di antaranya 24 dipilih dan 24 diangkat termasuk 8 pribumi.⁴⁴⁾

Dengan berdirinya *Volksraad* tersebut diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga daerah Nusa Tenggara Timur. Kaum pergerakan di Nusa Tenggara Timur mengikuti dengan sekama. Namun pada saat pertama belum ada aktivitas serta hubung-

44) Sartono Kartodirdjo, *ibid*, hal 51.

an dengan *Volksraad*. Barulah kemudian Perserikatan **Kebangsaan Timor** dalam kegiatannya antara lain aksi Indonesia **Berparlemen**, aksi mendapatkan keanggotaan *Volksraad* untuk seorang kaum Timor yang dicalonkan adalah A.Koroh, raja Amarasi, kemudian Dr.W.Z.Johannes.⁴⁵⁾ Namun usaha ini tidak berhasil.

E. PERJUANGAN DI DAERAH

1. Interaksi dengan pemogokan di sekitar tahun 1923

Di bawah pemerintahan (gubernur) jenderal Fock dilaksanakan politik penghematan yang dilaksanakan secara ketat sehingga menyebabkan pengangguran pada lapisan tenaga kerja. Semua bidang dari kesejahteraan rakyat, pertanian, kesehatan rakyat, peternakan, perikanan dan perdagangan, juga mengalami kemunduran.

Peraturan-peraturan itu menimbulkan kekecewaan, bahkan kekesalan kaum pelajar. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh pergerakan murni dilancarkan pemogokan sebagai protes terhadap tindakan pemerintah. Pada bulan Januari 1922, pemogokan terjadi di pegadaian dan bulan Mei 1923 dilakukan oleh pegawai kereta api di kota-kota di Jawa. Reaksi pemerintah sangat keras, hak berapat dicabut, dan seribu pekerja dipecat. Dalam pemogokan ini terlibat anggota-anggota Sarikat Islam dan PKI.

Walaupun peristiwa tersebut tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur tetapi ada pengaruhnya. Sesudah peristiwa tersebut, seorang tokoh anggota PKI dari Jawa tetapi putera asal NTT bernama Christian Pandie pulang ke Kupang. Christian Pandie adalah termasuk tokoh pergerakan yang nantinya mendirikan organisasi *Kerapatan Timor Evolusi*, kemudian membentuk Serikat Timor akhirnya diubah menjadi Serikat Rakyat.

2. Interaksi dengan pemberontakan tahun 1926-1927

Pada tahun 1926 terjadi pemberontakan di Jakarta, disusul dengan tindakan-tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Barat meletus pemberontakan pada 1 Januari 1927 yang digerakan oleh PKI dengan cepat dapat dipadamkan oleh pemerintah Belanda, yang membawa akibat tidak saja PKI tetapi juga bagi kaum pergerakan pada umumnya

45). I.H.Doko: *Ibid*, hal. 51

mengalami penindasan luar biasa. Akibat pemberontakan PKI terasa pengaruhnya di Nusa Tenggara Timur di mana Christian Pandie, N.B. MoE, M. Amtiran yang mendirikan Sarikat Rakyat ditangkap dan dibuang karena ternyata Christian Pandie dan kawan-kawannya mengadakan pertemuan-pertemuan untuk merencanakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Christian Pandie dibuang ke Sawahlunto, M.B.MoE ke Cipinang, M. Amtiran ke Bima, J. Laiskodat dipenjarakan di NoElmina selama 4 bulan bersama-sama beberapa anggotanya. Anggota-anggota Sarikat Rakyat dari pulau Semau saja yang terlibat ada 61 orang dengan J. Laiskodat sebagai pemimpin. Di samping itu juga anggota-anggota dari daerah lain. Sadu Oematan dikenakan tahanan rumah dan kantor Sarikat Rakyat dibakar.

Di samping peristiwa di Kupang, maka pengaruh pemberontakan PKI terasa juga di Lamahala, Flores Timur terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Gewali Nuha. Namun dengan kekerasan pemberontakan dapat ditindas dan semua laki-laki dewasa ditangkap serta dibuang ke luar daerah antara lain ke Digul.

3. Sikap masyarakat terhadap asas non koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Di Nusa Tenggara Timur asas non koperasi dipelopori oleh organisasi *Timorsch Verbond* dengan tokoh-tokohnya, D.S.Pella, J.W.Amallo, E.R.Herewila, S.W.Tanya, C.Pery yang mendapat sambutan masyarakat termasuk tokoh pemerintahan Tradisional yakni raja Amarasi H.A.Koroh dan Raja Kupang A.Nisoni. Lebih-lebih dengan keberanian *Timorsch Verbond* mengungkapkan penindasan yang dilakukan pejabat kolonial Belanda di Karuni (Sumba). Kontrolur Dannenberger, di Sabu oleh *Gezaghebber* Israil. Berkat pengadilan Yustisi Makasar kedua tokoh Belanda itu dipecat dari jabatannya.

4. Interaksi dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Organisasi di daerah yang mempunyai hubungan dengan PPPKI adalah *Timorsch Verbond*. Sesudah kongres yang pertama tahun 1925, *Timorsch Verbond* mengalami kelumpuhan akibat perpecahan dan tindasan Belanda. M.H.Pello ayah Tom Pello telah berusaha menghidupkan kembali aktivitas *Timorsch Verbond* yang lumpuh. Ia mengorbankan kedudukannya sebagai pendeta

Protestan demi melanjutkan perjuangan *Timorsch Verbond*. Namun usahanya sia-sia sampai tahun 1930 *Timorsch Verbond* tetap lumpuh.

Berkat kehangatan politik di Indonesia, terutama mengenai diri Ir. Soekarno es pada akhir 1930, maka J.J. Bakker seorang bekas pemimpin *Timorsch Verbond*, yang telah kembali belajar dari Singapura bersama J.W. Amalo membangun kembali *Timorsch Berbond* di Surabaya. Beberapa cabang *Timorsch Verbond* di keresidenan Timor berdiri pula. *Timorsch Verbond* kembali menunjukkan kegigihannya dengan mengungkapkan peristiwa Della di Rote. Dalam peristiwa ini kontrolur Enkelaar menganiaya 318 rakyat Della. Peristiwa ini berhasil dibongkar dan atas desakan *Timorsch Verbond*, *Officier van Justitie* Mr. Jonkman mengunjungi Rote untuk menyelesaikan peristiwa Della. Soleman Gangge pemuka masyarakat Della yang dihukum dan dibuang ke Sumbawa dibebaskan dan dikembalikan ke Rote.

Dengan situasi yang menguntungkan dan adanya sambutan dari masyarakat, *Timorsch Verbond* mengadakan kongres yang kedua di Kupang pada tahun 1932. Konggres berlangsung dari 18 sampai 22 Juni 1932 yang dihadiri oleh utusan cabang-cabang dan utusan organisasi lainnya. Dalam kongres ini diundang pula Bung Karno selaku utusan PPPKI. Namun berhubung suatu halangan Ir. Soekarno tidak jadi datang dan diwakili oleh Soedjono, promotor PBI (Pergerakan Bangsa Indonesia) dari Bangil sebagai wakil PPPKI.

Kongres ini walaupun dirintangi oleh pemerintah Belanda (Residen) dan Perserikatan Timor tetapi dapat berlangsung dan mendapat sambutan masyarakat. Pemuda-pemuda sangat aktif dalam membantu Panitia Konggres di bawah pimpinan *Majelis Pertimbangan*: S.Poeroe, B.Navesaf dan kawan-kawan yang mendapat dukungan kuat dari tokoh terkemuka dan berpengaruh yakni A.H.Koroh dari kerajaan Amarasi. Simpati rakyat nampak jelas dalam penjemputan terhadap utusan-utusan pengurus besar Surabaya dan utusan PPPKI, utusan dari Makasar, Sumbawa, Flores, Sumba ketika mereka tiba di Kupang. Mereka disambut dengan barisan Kepanduan Bangsa Indonesia di bawah pimpinan Suprpto sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.⁴⁶⁾

46). J.S. Amalo, informan no. 28, Of:bobo Kupang.

Dari Konggres *Timorsch Verbond*, baik dalam rapat tertutup maupun dalam rapat-rapat umum sudah dibicarakan soal-soal politik yang tegas-tegas menghendaki Indonesia Merdeka. Diputuskan juga dalam Konggres tersebut bahwa partai *Timorsch Verbond* menjadi anggota dari PPPKI. Hal ini membawa akibat bahwa *Timorsch Verbond* dianggap semakin berbahaya, oleh karena itu perlu dihalang-halangi kegiatannya.⁴⁷⁾

Nampaknya nasib yang pernah dialami *Timorsch Verbond* sesudah Konggres pertama terulang pada Konggres kedua. Akibatnya terjadi perpecahan dalam tubuh *Timorsch Verbond* dan tekanan-tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, *Timorsch Verbond* mengalami kemerosotan dan kelumpuhan.

Usaha J.J.Bakker dan S.J.LouwoE sebagai pengurus besar di Surabaya untuk menggiatkan kembali partai *Timorsch Verbond* sia-sia. Seluruh cabang kecuali cabang Surabaya, Kupang dan Majelis Pertimbangan di Kupang, tidak ada suaranya lagi. Akhirnya atas usaha S.Peroe, Ketua Majelis Pertimbangan di Kupang, mengadakan perjalanan untuk menyelidiki keadaan partai di Surabaya. Kemudian diusulkan kedudukan pengurus besar dipindahkan ke tangan pengurus cabang di Makasar. Hal ini mendapat sambutan dari beberapa cabang *Timorsch Verbond* antara lain cabang Kupang, Camplong, SoE, Atambua, Sabu, Makasar dan Tanjung Periuk.

5. Interaksi dengan Sumpah Pemuda

Dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dilakukan oleh para pemuda yang tergabung dalam berbagai perkumpulan mempunyai pengaruh yang besar. Semangat persatuan satu nusa, satu bangsa satu bahasa, tersebar ke berbagai pelosok. Demikian pula lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih.

Bagi daerah Nusa Tenggara Timur pengaruh Sumpah Pemuda, nampak pada waktu Konggres II Partai *Timorsch Verbond* di Kupang. Rombongan utusan disambut dengan lagu Indonesia Raya dan lambaian merah putih. Para pemuda dalam Kepanduan Bangsa Indonesia memakai dasi merah putih di bawah pimpinan Suprpto. Demikian pula keputusan Konggres yang menyatakan keinginan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia.

47). I.H.Doko, *Ibid*, 1974, hal. 68.

Organisasi-organisasi kepemudaan di daerah timbul di berbagai tempat. Pemuda-pemuda dari Nusa Tenggara Timur pada tahun 1933 mendirikan *de Timorsche Jongeren* yang dipimpin oleh H.Johannes mahasiswa THS Bandung dan dibantu oleh S.K.Tibuludji, Ch.F.Ndaumanu, I.H.Doko dan J.H.A.Toele, yang keempatnya adalah murid *Hollands Islandse Kweekschool* di Bandung. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan seluruh pelajar yang berasal dari keresidenan Timor yang sedang menuntut ilmu di kota-kota besar di seluruh tanah air. Pada tahun 1929 di Sumba berdiri *Persatuan Pemuda Kristen Immanuel* dan *Persatuan Pemuda Kristen Ingatlah Chalikmu Pada Masa Mudamu*. Pada tahun 1930 berdiri *Persatuan Pemuda Kristen Samuel*. Sedang atas inisiatif J.E.Tatengkeng pada tahun 1936 diadakan Konferensi Pemuda Kristen seluruh Sumba di Payeti. Dalam Konggres ini dibentuk *Bond Pemuda Kristen* dengan nama *Persekutuan Persatuan Pemuda Kristen Sumba* (P3KS). Persatuan ini mempunyai pers yang bernama *Pembaharuan*. Pada tahun 1930 berdiri pula *Christelijke Schoolvereeniging Sumba*.

Di Timor berdiri pula Persatuan Pemuda di bawah pimpinan Stephens Ndoen dengan nama *Christelijke Jongeren Vereniging*.

6. Kegiatan masyarakat pada berbagai kehidupan.

Seperti diuraikan dalam Bab III C sebelumnya, bahwa kegiatan masyarakat pada berbagai kehidupan di Nusa Tenggara Timur ada yang mengalami berbagai kemajuan. Dengan adanya politik asosiasi pemerintah Belanda maka pendidikan sangat berkembang. Sekolah-sekolah rakyat dibuka di berbagai daerah. Lembaga-lembaga swasta di Nusa Tenggara Timur adalah Zending dan Missi mendapat kelonggaran untuk meningkatkan pendidikan dan penyebaran agama. Sekolah-sekolah tidak terbatas pada *Volkschool* saja, tetapi juga *Standaard School*, *Normaal Cursus*, bahkan HIS dan Sekolah Theologia.

Di samping kepercayaan asli masih hidup subur, agama Kristen Protestan berkembang di daerah Timor, Rote, Sabu, Sumba dan Alor. Agama Katolik di Flores dan Timor, telah diuraikan dalam uraian terdahulu.

Dalam bidang ekonomi kehidupan penduduk tetap bergantung pada pertanian ladang yang selalu berpindah dengan kebiasaan membakar padang, menebang hutan tetap berlaku. Dengan alat-alat yang sangat sederhana penduduk melaksanakan

pertanian mereka yang umumnya berlangsung setahun sekali. Tanaman pokok adalah jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan Jewawut.

Suatu perubahan yang terjadi di bidang peternakan yakni dengan dimasukkannya ternak sapi ke Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah kolonial Belanda, karena sebelumnya ternak yang terkenal hanya babi, kerbau, kuda, kambing dan unggas.

Di Sumba tahun 1913 dimasukkan 60 ekor sapi Angola yang terdiri dari 56 betina dan 4 ekor jantan dari India. Sebelumnya telah pernah dimasukkan sapi Bali dan Australia tetapi kurang berhasil. Sedang di Timor sapi Bali dimasukkan tahun 1912 dan di Flores dimasukkan sapi Madura kira-kira tahun 1917.⁴⁸⁾ Pada tahun 1925 di Ende dibuka percetakan Arnoldus dan berkembang dengan pesat. Bahkan pada tahun 1929 telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 70 orang tenaga. Percetakan ini menerbitkan pula surat kabar *Bintang Timur* dengan oplag 3500 eksemplar setebal 16 halaman.

Dalam bidang perdagangan daerah NTT sangat terbatas dan berkembang hanya di daerah pantai. Hasil utama yang diperdagangkan adalah hasil hutan berupa kayu cendana, *casia vera*, lilin, madu dan hasil laut seperti batu lola dan ternak. Sistem pasar sebagai pusat jual beli hanya berkembang di berbagai pusat pemerintah dan sangat terbatas. Di Flores terdapat daerah perdagangan dan tanpa pasar, daerah perdagangan dengan pasar tertutup tanpa jaringan pasar serta beberapa daerah dengan jaringan kecil seperti Ende dengan Maumere.

Di Sumba keadaannya lebih terbatas lagi, sedang di Timor mempunyai jaringan pasar yang lebih banyak, karena adanya lalu lintas perdagangan yang dilakukan penduduk berbagai kerajaan dan pada waktu itu tumbuh pula berbagai jaringan pasar baru yang merupakan penghubung antara jaringan pasar lama. Ternyata di Pulau kecil Adonara, ditinjau dari segi lalu lintas pasar lebih maju dari daerah-daerah lain.⁴⁹⁾

Dengan berkembangnya pendidikan dan agama Kristen dan Katolik di NTT juga memberikan pengaruh besar dalam bidang seni budaya tradisional.

Upacara-upacara keagamaan agama Kristen dan Katolik, bahasa Melayu, bahasa Belanda mulai berkembang. Bangunan-

48). Dinas Peternakan Daerah NTT: *Sejarah Peternakan di NTT*: 1976, hal 4 – 12.

49). D.H. Burger: *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, Jilid II, 1971, hal: 108 – 114.

bangunan gereja, rumah bentuk persegi, berlantai tanah (tidak berpanggung), musik dan lagu-lagu barat, dansa mengalami perkembangan. Di Kupang sebagai pusat pemerintahan dan di Larantuka berkembang *bahasa Melayu Kupang* yang merupakan perkembangan bahasa Melayu dengan mendapat pengaruh kuat dari bahasa Ambon dan Belanda, misalnya kata-kata *beta*, *sondey*, *nyong*, *nona* dan sebagainya.

BAB : IV

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 - 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA TAHUN ± 1930.

1. Politik keras terhadap gerakan non koperasi.

Politik keras terhadap gerakan non koperasi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda terutama ditujukan kepada organisasi politik *Timorsch Verbond*. Mengingat anggota-anggota dan pengurus *Timorsch Verbond* kebanyakan adalah pegawai, maka untuk melemahkan gerakan *Timorsch Verbond* yang dianggap berbahaya dengan cara melakukan ancaman kepada para anggota dan pengurus *Timorsch Verbond*. Bagi pegawai dilarang aktif dan ikut gerakan ini dengan sanksi : Barang siapa yang tidak mematuhi diancam hukuman pecat dari jabatan, dipindahkan dan diturunkan jabatannya". Salah seorang tokoh *Timorsch Verbond* yang kena tindakan ini adalah pendeta M.H. Pello. Demi kepentingan perjuangan *Timorsch Verbond*, karena larangan tersebut terpaksa mengorbankan pangkatnya sebagai pendeta Protestan. Akibat larangan-larangan tersebut gerakan *Timorsch Verbond* menjadi lumpuh.

Dengan dibuangnya Ir. Soekarno ke Ende membawa pengaruh juga bagi gerakan di daerah. Banyak kaum pergerakan yang secara sembunyi-sembunyi memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan kontak dengan Ir. Soekarno yang dibuang ke Ende. Walaupun pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan keras karena dikhawatirkan pengaruh gerakan non koperasi meluas, tetapi kaum pergerakan tidak kekurangan akal. Di antaranya dari Kupang N. Saduk OEmatan pergi ke Ende secara sembunyi-sembunyi belajar politik pada Ir. Soekarno.

Setiap ada kesempatan dipergunakan oleh Ir. Soekarno untuk memberi kesadaran politik, misalnya taktik dalam menghadapi para pengawal, selalu diajak berceritera tentang pahlawan-pahlawan dari daerah tempat asal pengawal untuk membangkitkan kesadaran nasional. Juga pertemuan-pertemuan yang terselubung, misalnya main sandiwara dan berkebun selalu dipergunakan Ir. Soekarno untuk memberikan kesadaran politik.

Partai *Timorsch Verbond* yang lumpuh berusaha diaktifkan

kembali dengan memindahkan pengurus besarnya ke Makasar. Pada tahun 1933 pengurus besar dibentuk di Makasar di bawah pimpinan Ketuanya L. Here Wila. Pengurus besar ini tidak dapat berbuat banyak karena pada tahun 1934 pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang larangan berapat (*Vergader Verbond*), sehingga makin melumpuhkan kegiatan gerakan perjuangan *Timorsch Verbond*.

Pada tahun 1930 seorang tokoh perjuangan dari Padang bernama Ahmad Datu Batuah dibuang ke Kalabahi, Alor karena terlibat dalam perlawanan menentang Belanda. Ia termasuk anggota PSII aliran kiri. Pada tahun 1930 H. Dasing dalam rangka pendirian PSII di Alor berkonsultasi dengan pemimpin PSII di Makasar. Pada tahun 1932 berdirilah ranting PSII.

Dulolong dengan Ketuanya Umar Bara Pa, wakil ketua H. Dasing dan sekretaris Lensu Nal. Karena melakukan propaganda perjuangan, maka Umar Bara Pa akan ditangkap tetapi dapat lolos, sedang yang ditangkap kalipang dan dipenjarakan 3 bulan.

2. Undang-undang sekolah swasta (*Wilde Scholen Ordonnantie*)

Sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagian besar adalah sekolah swasta yakni sekolah-sekolah yang diusahakan oleh Misi Katolik dan Zending. Di samping itu terdapat pula sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi politik sedang sekolah-sekolah negeri sangat sedikit dan terbatas pada *Europeesche Lagere School* (ELS) dan *Schakels school*. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta yang ditangani Zending dibiayai oleh swapraja sedang pengelolaannya oleh gereja. Di samping itu juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Misi Katolik di Flores dan Timor.

Sekolah-sekolah yang terkena undang-undang sekolah swasta terutama adalah yang diselenggarakan oleh organisasi politik, khususnya yang digiatkan oleh *Timorsch Verbond* yakni *Timorsch Scholen* semacam HIS yang pertama kali didirikan tahun 1925.

Pada sekolah ini seperti halnya Taman Siswa ditanamkan rasa kesadaran nasional di daerah kepada murid-muridnya. Tokoh-tokoh *Timorsch School* yang cukup berani adalah Suprpto dan R.W. Kuparman. Sebagai salah satu bukti keberanian Suprpto antara lain pada waktu peringatan Hari Ulang Tahun Ratu Belanda Wilhelmina pada tanggal 31 Agustus 1929, ia memimpin murid-muridnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan meng-

gunakan tongkat dirigen yang berbendera merah putih. Tindakan nya ini menyebabkan ia sering ke luar masuk penjara, demikian pula halnya yang dialami R.W. Kuparman.

Di antara mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Timor adalah Sejarah Indonesia, Bahasa Indonesia, Sejarah Pergerakan dan kemudian sesudah Sumpah Pemuda diajarkan pula lagu Indonesia Raya.

Belanda memandang Sekolah Timor tersebut dapat mengurangi kewibawaan pemerintah Hindia Belanda, sehingga dikenakan Undang-undang sekolah swasta. Guru-gurunya yang dianggap berbahaya dikenakan *schorsing* dan pemecatan.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Bayangan depresi ekonomi dunia yang sedang berkecamuk melanda seluruh dunia, mempunyai pengaruh yang sangat luas. Hal ini dirasakan pula di Indonesia dan daerah-daerah. Rakyat merasa tertekan dalam soal ekonomi terutama dalam hasil-hasil perdagangan. Rakyat diwajibkan menyerahkan barang-barang perdagangan kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah seperti halnya, kayu Cendana, kayu merah dan lilin. Rakyat dilarang langsung membawa hasilnya ke pelabuhan-pelabuhan yang biasa dikunjungi kapal-kapal. Pada masa ini dirasakan juga adanya kesulitan mendapatkan uang dan bahan makanan.

Di bidang pendidikan terpaksa banyak sekolah-sekolah ditutup, sedang sekolah yang didirikan oleh Missi Katolik mengalami kesulitan mendapatkan bantuan keuangan. Para misionaris yang berkebangsaan Jerman tidak lagi bisa mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Jerman. Pengiriman uang ke luar negeri dibatasi maksimal sebesar 50 DM sedang ijin untuk Missi tetap ditolak. Bantuan pemerintah Hindia Belanda dihentikan. Keadaan yang menyedihkan ini mengakibatkan banyak sekolah dan asrama yang ditutup. Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka penghematan anggaran melakukan tindakan terhadap guru-guru tertentu yaitu dengan mengenakan *wachtgeld* semacam uang tunggu, dihentikan untuk sementara, terutama bagi guru-guru yang berjiwa nasionalis.

J.W. Amalo yang menentang adanya kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, membakar ijasahnya untuk protes. Tetapi akibatnya dia dikenakan hukuman tidak naik gaji dalam 2 kali 6

bulan.⁵⁰⁾

C. INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN PARTAI / ORGANISASI

Pada tahun 1937 di Kupang dibentuk *Partai Perserikatan Kebangsaan Timor* (PKT) oleh beberapa bekas tokoh *De Timorsch Jongeren* yakni I.H. Doko sebagai ketua dan Ch. F. Daumanu sebagai sekretaris. Tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya adalah mempertinggi derajat kaum dan bangsa. Namun dalam praktek, partai ini turut aktif dalam urusan politik pemerintahan. Usaha Perserikatan Kebangsaan Timor terutama ditujukan untuk mempersatukan kembali kaum Timor yang telah terpecah-belah oleh pertentangan yang mendalam antara partai-partai politik yang lama yakni *Timorsch Verbond* dan perserikatan Timor. Melalui beberapa polemik yang cukup hangat antara pemimpin Perserikatan Kebangsaan Timor, *Timorsch Verbond* dan Perserikatan Timor, akhirnya berhasil memperoleh saling pengertian. Bahkan *Timorsch Verbond* menyerahkan pada Perserikatan Kebangsaan Timor untuk melanjutkan perjuangan *Timorsch Verbond*. Perserikatan Kebangsaan Timor pada mulanya disambut baik oleh Partai Perserikatan Timor dan pemerintah Kolonial Belanda. Ketika Perserikatan Kebangsaan Timor memulai melakukan berbagai aksi antara lain aksi Indonesia Berparlemen, aksi mendapatkan keanggotaan *Volksraad* untuk seorang kaum Timor yang dikenal sebagai seorang tokoh perjuangan dengan mencalonkan terlebih dahulu A. Koroh yang telah diturunkan oleh Pemerintah dari kedudukannya sebagai raja Amarasi karena dianggap berkepala batu, calon kedua ialah Dr. W.Z. Johannes. Dengan aksi tersebut Perserikatan Kebangsaan Timor dianggap atau dipap merah. D. Adoe yang sangat aktif mendukung aksi tersebut kena hukuman jabatan dan dipindahkan ke Bima.

Perserikatan Kebangsaan Timor melaksanakan pula taktik perjuangan untuk memberi kesadaran nasional dengan mementaskan sandiwara *Koko Sonbai*, yang mengisahkan perjuangan rakyat di Timor yang gagah berani atas perlakuan tidak adil dan kekejaman pemerintah kolonial Belanda.

Akibatnya Perserikatan Kebangsaan Timor semakin dicurigai dan diawasi serta I.H. Doko sebagai guru sekolah mendapat peringatan keras dan diancam tindakan kepolisian dan pe-

mecatan dari jabatannya. Nampaknya aksi tuntutan tentang keanggotaan *Volksraad* dan parlemen dari Perserikatan Kebangsaan Timor menunjukkan akan perhatian kaum pergerakan terhadap kejadian-kejadian di Jawa, seperti terbentuknya *Volksraad* yang anggotanya ada dari golongan bumi putra yang diangkat. Demikian juga peristiwa dalam *Volksraad* tentang adanya Petisi Sutardjo, dimana diusulkan adanya perubahan susunan ketatanegaraan bahwa pulau Jawa dijadikan satu provinsi, sedangkan daerah-daerah di luar pulau Jawa dijadikan Kelompok daerah (*groeps gemeenschappen*) yang bersifat otonom dan berdasarkan demokrasi. Sifat dualisme dalam pemerintah daerah (*hinnenlands bestuur*) dihapus. Gubernur jenderal diangkat oleh raja dan mempunyai kekebalan. Direktur departemen mempunyai tanggung jawab kepada Gubernur Jenderal *Volksraad* dijadikan Parlemen yang sesungguhnya, *Raad van Indie* anggota-anggota biasa dan seorang *Vice President* diangkat oleh raja, di samping itu ketua dan wakil ketua *Volksraad* sebagai anggota mempunyai hak suara. Dibentuknya *Dewan Kerajaan* sebagai badan tertinggi antara Negeri Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kedua daerah dengan satu pemimpin yang pimpinan mana bukan seorang Menteri atau direktur atau salah seorang dari ketua parlemen. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul dan cita-citanya adalah untuk Indonesia. Terhadap orang-orang asing yang dilahirkan di sini diadakan seleksi yang ketat. Petisi Soetardjo tersebut menimbulkan reaksi berbagai pihak termasuk kalangan pergerakan. Hanya saja pengaruh dan hubungannya dengan keadaan di Nusa Tenggara Timur kurang begitu nampak.

Di Nusa Tenggara Timur seperti telah dikemukakan dalam uraian terdahulu pada tahun 1930 terdapat seorang tokoh PSII yang berhaluan kiri dari Padang, bernama Ahmad Datu Batuah yang dibuang ke Kalabahi (Alor) karena terlibat dalam perlawanan di Sumatera Barat.

Pada tahun 1930 H. Dasing dalam rangka pendirian PSII di Alor berkonsultasi dengan pimpinan PSII di Makasar. Pada tahun 1932 berdiri PSII di Dulolong dengan ketuanya Umar Bara Pa, wakil ketua H. Dasing dan Lensu Mal sebagai sekretaris. Karena PSII di Alor melakukan propaganda perjuangan, maka Umar Bara Pa akan ditangkap tetapi berhasil lolos. Hanya seorang anggota bernama Kalipang ditangkap dan dipenjarakan

selama 3 bulan. Di Barnusa berdiri pula PSII. Akibat perpecahan PSII pada tahun 1933 maka PSII *afdeeling* Makasar melepaskan diri dari pusat dan mendirikan *Ladjnah Muktamar*, pada tahun 1834. Partai Sarikat Islam Indonesia (L.M. Parsi) dipimpin oleh M. Jusuf Samah. Dan kejadian tersebut diikuti oleh PSII di Alor menjadi cabang L.M. Parsi Makasar. Kemudian berkembang cabang-cabang di beberapa tempat lainnya di Dulo-long, Barnusa, Kalabahi, Lawabang, Lewalu, Kalijahi, Lanloki, P. Kura, Bagang, Baelong, Marico, untuk mengkoordinasi cabang-cabang dibentuk *gedelegeerd* dibawah pimpinan Abdul Rahman Daeng Mataram.⁵¹⁾ Pada tahun 1940 L.M. Parsi di Alor menjadi PSII kembali setelah L.M. Parsi di Makasar bersatu kembali dengan PSII Pusat.

Dengan perkembangan PSII yang pesat di Alor menimbulkan reaksi golongan kolot pada tahun 1936 dengan jalan mendirikan *Asyiratal Mustaqim* (A.M.) yang anggotanya terdiri atas para bangsawan dan pemuka masyarakat. Perkumpulan ini digunakan oleh Belanda untuk membendung pengaruh PSII, tetapi gagal. Pada tahun 1937 berdiri pula organisasi Muhammadiyah di Alor.

Di samping hubungan-hubungan di atas terdapat hubungan dengan Taman Siswa dalam hal penyediaan guru dari sekolah yang diperjuangkan *Timorsch Verbond*, misalnya Suprpto dan R.W. Kuparman, serta aksi J.W. Amalo membakar ijazah menentang pembatasan biaya pendidikan.

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia dan rakyat di daerah menjelang Perang Dunia ke II

Perjuangan rakyat Indonesia, menjelang Perang dunia II makin meningkat dalam usahanya untuk memperoleh kebebasan dan mendapatkan hak-hak yang lebih luas untuk menuju kepada kemerdekaan. Perjuangan partai-partai politik meningkat hingga terbentuk Gapi (Gabungan Partai Indonesia) dengan tuntutananya Indonesia Berparlemen.

51) M. Magang : Sejarah Pergerakan Rakyat di Kabupaten Alor, FKSI Undana, 1972, hal : 40 - 41.

Pemerintah Hindia Belanda menyadari makin gentingnya situasi politik dunia, maka selalu mengusahakan agar situasi di Indonesia dalam keadaan tenang dan aman. Usaha untuk menentramkan situasi yang makin meningkat, tuntutan bangsa Indonesia tersebut mendapat tanggapan, akan dipertimbangkan.

Di Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Hindia Belanda melihat situasi politik dunia yang makin genting, berusaha menjaga ketentraman rakyatnya dengan jalan : kepada partai politik dilarang mengadakan tindakan yang bersifat menentang Pemerintah. Perserikatan Kebangsaan Timor yang pimpinannya terdiri dari pegawai negeri diancam akan dipecat apabila bertindak menentang pemerintah.

Di Sumba, Flores pemerintah membujuk pemuda-pemuda setempat untuk masuk menjadi polisi atau tentara untuk menjaga pertahanan daerah, apabila nanti terjadi perang sewaktu-waktu. Sedang dalam bidang ekonomi, pemerintah menjanjikan kepada raja untuk peningkatan dalam penanaman bahan makanan. Sawah-sawah dan kebun-kebun yang baru akan dibuka dan diperbanyak. Pembuatan irigasi pun akan ditingkatkan.

Di Sumba dibangun irigasi baru yang pembiayaannya dari bantuan Ratu Belanda (Wilhelmina), terletak di Mangili Sumba Timur dan Mamboro di Sumba Barat.

Instansi pemerintah untuk mengawasi bidang perekonomian juga ditingkatkan. Maka dibentuk Dinas Pertanian, Dinas Kewanan dan Dinas Kehutanan. Meskipun demikian kehidupan rakyat nampak bertambah susah, karena kebutuhan hidup makin sulit dan usaha untuk memperoleh uang juga makin sulit.

Pada masa ini masyarakat di daerah NTT pada umumnya masih terbagi dalam lapisan masyarakat tradisional yaitu golongan bangsawan, rakyat dan budak, walaupun batas strata sosialnya makin kurang jelas. Akan tetapi kemudian timbul gabungan baru yaitu orang-orang Belanda yang merupakan golongan tertinggi, serta golongan para pegawai pemerintah yang kehidupan sehari-harinya mempunyai corak tersendiri. Di samping itu masih ada golongan rohaniawan yang di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat merupakan kelompok tersendiri, antara lain para rohaniawan dalam agama Katolik.

2. Keadaan masyarakat

- a. Keadaan ekonomi penduduk di Nusa Tenggara Timur

sampai dengan berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini memang merupakan suatu bukti bahwa sebenarnya kekuasaan Hindia Belanda tidaklah berkepentingan memajukan perekonomian penduduk. Penduduk di Nusa Tenggara Timur tetap hidup secara tradisional pada pertanian perladangan berpindah-pindah sebagai mata pencaharian pokok. Dalam sistem perladangan ini dalam satu tahun hanya sekali ada kegiatan bertani. Alat-alat yang sangat sederhana dengan bentuk sepotong kayu yang disebut *tugal (digging stick)*, sedangkan bajak dan cangkul belum dikenal di dalam sistem pertanian rakyat. Dengan demikian hasil pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok dengan hasil berupa jagung, jewawut, umbi-umbian dan kacang-kacangan sangat rendah. Hasil-hasil ini adalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Suatu hal yang agak berkembang dengan dimasukkannya sapi maka makin hari semakin berkembang dan sapi menggeser kedudukan ternak kerbau dan kuda. Namun pemilikan ternak-ternak ini belum bersifat pribadi tetapi masih merupakan milik suku atau keluarga. Sapi, kuda dan kerbau merupakan status simbol dan lebih banyak terpusat pemilikannya pada para bangsawan. Di bidang perdagangan dengan hasil yang tidak seberapa yakni kayu cendana, kayu merah, kulit kayu, lilin, madu dan hasil laut. Keadaan ekonomi penduduk tetap sangat menyedihkan dan sering timbul kekurangan makan.

b. Dalam bidang sosial pada waktu itu penguasa kolonial Belanda merupakan golongan kelas satu. Sedangkan secara tradisional dikenal adanya golongan bangsawan yang terdiri dari raja, keluarga raja dan penguasa tradisional seperti fettor, kapitan, golongan rakyat biasa dan hamba sahaya. Walaupun perbudakan telah dilarang, tetapi secara tradisional golongan ini tetap ada. Dengan meluasnya pendidikan maka timbul pula golongan pelajar yang pada umumnya terdiri dari para pegawai dan pendeta yang merupakan golongan terhormat tersendiri di luar sistem tradisional dan banyak berperan dalam pergerakan.

c. Dalam bidang pendidikan sejak awal abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat. Sekolah-sekolah rakyat (*Volk-school*) telah tersebar di berbagai tempat, *standaardschool*, *Normaal Cursus*, HIS, bahkan juga sekolah Theologia dan sekolah pertukangan yang kebanyakan diselenggarakan oleh Misi Katolik

dan Zending.

Sekolah pertukangan telah berdiri di Ende sejak tahun 1936. Di Sikka Flores telah terdapat 45 sekolah rakyat dengan 120 orang guru yang melayani murid 3.773 murid laki-laki dan 3.051 murid wanita.⁵²⁾ Di Leda lero telah berdiri sekolah Seminari Tinggi yang diasuh oleh lima orang guru besar dengan mahasiswa sebanyak 13 orang. Di daerah Larantuka Flores sekolah-sekolah rakyat telah memiliki murid-murid yang terdiri dari 4.435 murid laki-laki dan 2.648 murid wanita. Di Manggarai pada tahun 1937 telah ada 52 sekolah rakyat kemudian tahun 1939 menjadi 54 buah, tahun 1940 menjadi 55 buah dan tahun 1941 menjadi 51 buah sekolah. Di Ende di samping sekolah pertukangan, pada tahun 1940 telah ada 34 buah sekolah rakyat, pada tahun 1936 di Todabelu terdapat sebuah Seminari Menengah dengan 100 orang siswa. Pada waktu itu di seluruh Flores terdapat empat Seminari Menengah yakni Hokeng, Lela, Todabelu dan Kisol.

Pada tahun 1938 di Sumba terdapat 70 sekolah rakyat, dua standardschool, dua HIS, sebuah sekolah kemasyarakatan dan sebuah *Normaalleergang*. Pada tahun 1942, di Sumba telah ada 12 SD Katolik dengan 920 murid, 35 SD subsidi yang diselenggarakan Zending dengan 69 guru dan 3.682 orang murid. Di samping itu terdapat sebuah sekolah Guru dengan 18 siswa.

Di Timor pada tahun 1936 dibuka sebuah Sekolah Theologia di SoE sebagai ganti yang di Kupang yang ditutup tahun 1931. Di samping itu sekolah-sekolah rakyat yang telah ada pada periode 1900 - 1928 seperti telah diuraikan, semakin berkembang pula. Pada tahun 1930 telah ada 118 buah sekolah rakyat, kemudian pada tahun 1938 terdapat 130 sekolah yang ditangani Zending di Timor dan kepulauannya.

d. Perkembangan agama Katolik, Protestan dan Islam semakin pesat, terutama agama Katolik yang berpusat di Flores. Kalau pada tahun 1913 telah berdiri Prefektur Apostolik Nusa Tenggara, tidak termasuk Flores maka pada tahun 1914 Flores sudah masuk Prefektur Apostolik Nusa Tenggara pusat kedudukannya di Ende. Pada tahun 1922 Prefektur Apostolik Ende menjadi *Vikariat Apostolik*. Pada tahun 1930 berdiri Vikariat Apostolik Atambua di Timor.⁵³⁾

53) Ibid, 36, hal. 1094.

Di Manggarai daerah Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1939 telah bekerja 14 orang misionaris dengan melayani 8 buah *stasi* dengan jumlah pemeluk agama Katolik 65.592 orang yang pada tahun 1940 berkembang menjadi 11 stasi dengan 69.743 orang Katolik.

Di Sikka pada tahun 1937 sebanyak 7.300 orang menerima *komuni*, dan pada tahun 1940 terdapat 80.000 orang Katolik. Sedangkan di Larantuka pada tahun 1940 terdapat 17 orang Imam, 9 bruder, 66 buah gereja dan 100 tempat ibadah yang dapat menampung 69.000 orang Katolik. Akibat Perang Dunia ke II pada tahun 1940. empat orang Imam dan tiga orang bruder Jerman ditawan.

Pada tahun 1935 diadakan *synode* di Ndona, Ende yang dihadiri oleh 30 imam dari seluruh vikariat di Nusa Tenggara untuk membicarakan program Missi dan pendidikan dalam asrama dan lain-lain. Sampai tahun 1942 di seluruh Flores terdapat ± 300.000 orang Katolik.

Di Sumba pada tahun 1936 terdapat 147 orang Katolik, yang pada tahun 1937 menjadi 3.241, tahun 1939 menjadi 357 orang dan 1942 menjadi 3.000 orang.

Pada tahun 1936 agama Katolik di Timor berkembang terutama di wilayah Belu dan Timor Tengah Utara, dengan jumlah umat Katolik sebanyak 42.000 orang dan Timor menjadi Vikariat sendiri, dengan bimbingan 19 imam, 3 bruder dan 12 suster ⁵⁴⁾

Pembinaan agama Kristen Protestan, pada masa ini ditangani oleh *Indische Kerk*. Seperti telah dikemukakan bahwa pada tahun 1925 di seluruh keresidenan Timor terdapat satu *Predikant Voorzitter* berkedudukan di Kupang yang membawahi 7 wilayah yakni Kupang dengan 8.721 umat Kristen, Campleng, Kapn dengan 500 orang, Baa Rote dan Sabu 32.724 orang, Kalabahi, Wanreli dan Serwaru. Di Kupang terdapat dua jenis jemaat berbahasa Belanda dengan 1.330 orang dan jemaat berbahasa Melayu 1.850 orang. ⁵⁵⁾

Predikant dari tahun 1934 - 1941 adalah Dr. Locher, kemudian digantikan oleh I.H. Enklaar. Pada tahun 1930 terdapat 162 jemaat dengan 80.295 anggota jemaat yang dilayani oleh

54) *Ibid*, hal. 1308

55) F.L. Cooley; *op. Cit*, hal. 47

440 tenaga penuh, 82 vikaris, 115 guru jemaat, 238 guru injil dan 5 utusan Zending yang tersebar di lima klasis atau bagian ⁵⁶⁾ Pada tahun 1938 jemaat menjadi 185 buah dengan klasis (bagian) yang dilayani 280 tenaga penuh, 3 pendeta Indonesia, 64 vikaris, 208 guru injil dan 5 utusan Zending. ⁵⁷⁾

Sedangkan agama Islam berkembang di sekitar pantai teluk Kupang, Waingapu, Ende, Manggarai, Maumere, Flores Timur, Solor dan Alor. Pada masa ini telah terdapat organisasi-organisasi berdasarkan agama Islam misalnya PSII, Muhammadiyah, *Asyiratal Mustaqiem*. Hanya sampai seberapa jumlah umat Islam belum diketahui namun umat Islam di daerah NTT merupakan minoritas.

e. Dalam bidang kebudayaan, kebudayaan lama tetap berkembang dan tetap berakar di kalangan penduduk desa. Tari-tarian yang berhubungan dengan perang, panen, peminangan, pergaulan tetap berkembang, terutama dilakukan pada saat upacara adat dan pesta panen serta daur hidup.

Demikian pula dengan syair-syair adat yang menceritakan kisah nenek moyang dan tata aturan adat tetap berlangsung, walaupun dengan berkembangnya agama Katolik, Kristen Protestan dan Islam. Banyak di antara penduduk yang memeluk agama Katolik, Kristen, Islam yang menjalankan ibadah berdasarkan agama tersebut, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka masih tetap terikat pada adat dan menjalankan upacara-upacara adat.

Seni ikat yang erat hubungan dengan adat tetap berkembang dan hampir setiap penduduk mengerjakan sebab dalam kehidupan mereka seni ikat yang berupa sarung, selimut, selendang berkaitan dengan adat. Demikian pula agama-agama baru tidak menghilangkan bahkan mendorong berkembangnya seni ikat.

f. Dalam bidang seni bangunan, bentuk bangunan tradisional tetap berlangsung, misalnya rumah adat, rumah **tinggal** yang pada umumnya berbentuk panggung kecuali di daerah Dawan. Pada rumah-rumah tradisional terdapat rumah **samping** yang berfungsi sebagai tempat berlindung dalam arti fisik juga merupakan tempat berlindung dalam arti rohani karena adanya kepercayaan bahwa rumah merupakan tempat suci, terutama

56) *Ibid*, hal. 221

57) *Ibid*, hal. 221

tiang agung yang sering dilambangkan sebagai nenek moyang laki-laki dan wanita seperti rumah-rumah di Timor. Demikian pula dalam rumah selalu ada bagian-bagian tersuci, tempat keramat, tempat upacara dan menyembah benda keramat serta arwah nenek moyang. Rumah bukanlah benda mati tetapi mempunyai kehidupan, oleh karena itu perlu diupacarakan. Hal ini nampak jelas di kalangan suku Sabu yang percaya bahwa rumah mempunyai nafas maka sebelum diupacarakan rumah tidak hidup.

Di samping rumah tradisional, akibat adanya pengaruh dari luar berkembang pula seni bangunan baru model rumah persegi, dari tembok, beratap seng atau sirap, terutama bangunan gereja, mesjid, kantor pemerintah dan rumah-rumah di kota serta beberapa rumah bangsawan. Namun demikian secara umum seni bangunan tradisional masih tetap bertahan.

Dengan berkembangnya agama-agama dan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, maka tersebar pula bahasa Belanda, Melayu dan kesenian Barat, seperti dansa, musik dan sandiwara.

3. Sikap masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda

Keadaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur menjelang keruntuhan pemerintah Kolonial Belanda, tidak banyak mengalami perubahan. Masyarakat desa tetap terikat pada sistem tradisional di bawah pimpinan Ketua suku yang terkelompok dalam beberapa pemerintahan raja-raja kecil. Pengaruh kekuasaan Belanda sebetulnya tidak begitu terasa sampai ke desa-desa, yang dirasakan berat bagi rakyat adalah rupa-rupa pajak yang harus dibayar. Pada umumnya eksploitasi ekonomi melalui perkebunan-perkebunan, perusahaan-perusahaan hampir tidak dikenal di Nusa Tenggara Timur. Campur tangan dari pemerintah Belanda hanya sampai pada pemerintahan raja-raja yang menandatangani kontrak dan tunduk kepada raja. Sedang pemerintahan raja-raja ke dalam tetap berlangsung. Kecuali beberapa kejadian penting terjadi penindasan misalnya peristiwa di Della (Rote), Karuni Sumba dan Adonara. Situasi masyarakat cukup tenang, hal ini juga berkaitan dengan peranan agama Kristen Protestan yang berkembang di Timor dan Sumba serta agama Katolik di Flores dan Timor. Dalam hal ini kurang dirasakan pertentangan-pertentangan seperti di wilayah Indonesia bagian barat. Apalagi bila diingat bahwa penyebaran agama Kristen Protestan dan

Katolik adalah sejalan dengan politik asosiasi yang berkembang pada awal abad ke-20. Dengan melalui perkembangan agama tersebut diharapkan berkembang pula cara berpikir seperti Belanda. Di antara kaum pergerakan sendiri tidak banyak mengalami kemajuan. Hal ini dapat dimengerti, bahwa kaum pergerakan pada umumnya adalah para pegawai, sehingga pada waktu diadakan larangan dan ancaman bagi pegawai untuk aktif di bidang politik, maka praktis pergerakan menjadi lumpuh.

4. Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di daerah pada saat terakhir.

Keadaan pemerintah Hindia Belanda di daerah tidak banyak mengalami perubahan sampai saat kedatangan tentara Jepang, Nusa Tenggara Timur berada di bawah satu kekuasaan residen yang berkedudukan di Kupang yang mengendalikan pemerintahan Keresidenan Timor dan daerah takluknya. Residen yang berkuasa pada waktu itu adalah residen C.W. Schuller. Di bawah residen terdapat tiga asisten residen yang masing-masing berkedudukan di Kupang untuk daerah *afdeeling* Timor dan kepulauannya, di Ende untuk *afdeeling* Flores dan di Raba Bima untuk *afdeeling* Sumba Sumbawa, yang semula berkedudukan di Waingapu tetapi semenjak tahun 1935 pindah ke Raba.

Tiap *afdeeling* yang diperintah oleh asisten residen membawahi *onder-afdeeling* yang diperintah oleh kontrolur atau *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB) dan *Gezaghebber*.

Kontrolur dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh *Bestuur Assistent*. Barulah di bawah pejabat-pejabat tersebut para raja dari swapraja-swapraja yang telah menandatangani *korte verklaring* menyatakan tunduk pada pemerintah kolonial Belanda dan menjadi bawahan Belanda. Di bawah raja-raja ini tetap berlangsung sistem pemerintahan tradisional, di mana beberapa bekas raja ada yang diturunkan menjadi raja bantu, fetor dan kemudian juga temukung atau kapitan.

Pada waktu menjelang kedatangan tentara Jepang, dalam keresidenan Timor dan daerah takluknya yang meliputi wilayah pulau Flores, Sumba, Sumbawa, Timor dan kepulauannya terdiri dari tiga *afdeeling*, 15 *onder-afdeeling* dan 48 swapraja (di antaranya 4 swapraja di Sumbawa). Flores terdiri 9 swapraja yakni Ende Lio, Larantuka, Adonara, Sikka, Ngada, Riung, Nage, Keo dan Manggarai. Sumba terdapat 16 swapraja yakni

Kanatang, Lewa, Waijewa, Kambera, Tabundung, Melolo, Rendi Mangili, Waijelu, Masukarera, Laora, Kodi, Lauli, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, Anakalang, Wanokaka dan Lamboya. Timor terdiri 19 swapraja yakni Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Rote, Sabu, Mollo, Amanuban, Amanatun, Miomaffo, Biboki, Insana, Belu, Alor, Barnusa, Pantar. Matahari Naik, Kolana, Batulolong, dan Pureman.

Adapun tokoh-tokoh pemerintahan kolonial Belanda di antaranya di Sumba yang menjabat sebagai *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* atau kontrolur menjelang kedatangan Jepang adalah F.F.H. Plas dan yang menjadi *Militair Commandant* ialah Letnan Schuddesbeurs.

Di Alor Pantar Kontrolur H.J. van Gallen yang menjabat dari 1938 sampai 1942 menggantikan R. Rynders. *Bestuur Assistent* adalah B. Abdullah 1940 - 1946 menggantikan H.S. Giri. Di Timor Tengah Selatan yang menjadi pejabat dari tahun 1936 - 1941 adalah Waids dan kemudian Reintjes, di Timor Tengah Utara dari tahun 1938 - 1940 adalah Vanderk Win kemudian H.G. Schulte Nordholt. Di Ende yang menjabat asisten residen adalah Israil dan yang menjabat kontrolur adalah Bryne.

Adapun raja-raja dari swapraja menjelang keruntuhan pemerintah kolonial Belanda di antaranya adalah di Kupang N. Nisoni, swapraja Fatuleu N. Nisoni, di Amarasi raja H. Koroh, swapraja Amfoang ialah L. Manoch, raja dari swapraja Amanuban Pae Nope, swapraja Amanatun ialah Kolo Banonaek, swapraja Mollo ialah N. Sonbai, Raja Kolana ialah M. Makunimau, Raja Batulolong B. Lau Hola, Raja Kui ialah Baa La K mangngi, Alor Pantar adalah Oe Watang Nampira.

Raja Ende ialah Arusbusman, Raja Lio ialah Pius Rasi Wangge. Raja kerajaan Kodi ialah Dera Wula, raja kerajaan Mamboro ialah T. Umbu Tunggu Mili, Raja kerajaan Wewewa ialah Mbulu Engge, Raja Lauli ialah Saba Ora, Raja Wanokaka ialah Guling Manyoba, Raja Lamboya ialah Eda Bera, Raja Angkalang ialah Umbu Sappi Pateduku, raja kerajaan Umbu Ratu Nggay adalah Umbu Sakala Maramba Jawa, raja kerajaan/swapraja Kanatang ialah Umbu i Haru, raja swapraja Laura ialah Rua Kaka, sedangkan swapraja Tabundung diperintah Umbuna i Kadunda. Kerajaan Lewa Kambera menjelang kedatangan Jepang diperintah oleh Umbu Nggaba Hungu Rihieti, raja swapraja Masu Karera ialah Umbu Bala Ngiku, raja kerajaan/swapraja Waijelu ialah

Umbu Jawa Nggaja. Raja swapraja Rendi Mangili ialah Umbu Hapu Hambandina dan raja swapraja Umalulu ialah Umbu Hina Janggakadu.

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

1. Propaganda Jepang yang terasa di Daerah

Berita berlangsungnya Perang Dunia ke II, dapat diikuti oleh penduduk Nusa Tenggara Timur melalui siaran radio (Nitron). Terutama tokoh-tokoh partai politik selalu mengikuti perkembangan politik dunia yang sedang hangat pada masa itu. Propaganda Jepang yang terkenal adalah Jepang pembebas Asia dari penjajahan, Asia untuk bangsa Asia, Jepang adalah saudara tua, yang dapat didengar dari radio siaran Jepang.

Umumnya berita tersebut diterima sebagai titik terang bagi perjuangan pembebasan dari penindasan pemerintah Belanda, seperti yang diusahakan oleh Partai Politik, misalnya Partai Kebangsaan Timor. Akan tetapi karena adanya larangan kegiatan politik, maka keadaan di Nusa Tenggara Timur tampaknya tenang-tenang saja. Pemerintah Belanda terlalu percaya akan kekuatan pertahanan Sekutu.

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, pertahanan pihak Sekutu dipusatkan di Timor, sehingga Timor mempunyai arti yang sangat penting bagi Sekutu karena merupakan pintu terdepan ke arah Australia bagi musuh. Oleh karena itu sebelum perang, secara rahasia tentara Australia sudah mempersiapkan diri. Mereka mula-mula mengirimkan 4 orang, kemudian 6 dan 9 orang yang menyamar sebagai orang sipil ke Kupang untuk mempersiapkan pertahanan. Pusat pertahanan Sekutu dipusatkan di OESau dan Babau.

Pada tanggal 14 Desember 1941 secara resmi tentara Sekutu mendarat di Timor untuk memperkuat pertahanan dengan kekuatan satu brigade di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Veal. Di daerah Nusa Tenggara Timur pemerintah kolonial Belanda dengan keras menjaga keamanan dan membujuk pemuda-pemuda untuk masuk polisi untuk menjaga pertahanan. Namun kebanyakan raja-raja dan rakyat banyak yang tidak mengetahui propaganda Jepang.

2. Waktu kedatangan Jepang

Jauh sebelum merebut daerah Nusa Tenggara Timur, Jepang telah menyebarkan mata-matanya. Di antara mereka ada yang menyamar sebagai pedagang Cina dan mendirikan toko obat di Kupang sejak tahun 1932.

Nusa Tenggara Timur dan khususnya pulau Timor mempunyai arti sangat penting bagi Jepang, karena letaknya yang strategis maka merupakan kunci bagi batu loncatan ke Australia. Oleh karena itu rencana penyerahan telah dipersiapkan jauh sebelumnya untuk memperoleh informasi dan menyusun strategi selain menyusupkan mata-mata yang menyamar sebagai penjual obat juga terdapat pedagang kain berbangsa Jepang. Mereka ke luar masuk kampung menjual kain dengan harga yang sangat murah sampai ke daerah pedalaman.

Kedatangan pasukan Jepang di wilayah Nusa Tenggara Timur, di berbagai daerah tidak serempak. Di pulau Timor, pendaratan dilakukan di tiga tempat, yakni Atapupu (Belu), Kolbano (daerah Timor Tengah Selatan bagian pantai selatan) dan di dekat Kupang, pasukan Jepang mulai mendarat pada tanggal 19 Pebruari 1942 di Batulesa (pantai selatan) di ujung pulau Timor bagian barat. Pendaratan ini nampaknya tidak diperhitungkan oleh pasukan Belanda dan Sekutu. Oleh karena itu pada waktu pendaratan tidak mendapat perlawanan. Pasukan pendarat ini kemudian menyusup sebagian ke Amarasi, Neiluli, OEsapa, Babau, OEsao dan sebagian menuju kota Kupang lewat Sunlili, Manulai, Mantasi, Air Mata dengan rencana akan mengepung kota Kupang sebagai pusat pemerintah Belanda.

Penyerangan pasukan Jepang lewat laut ini kemudian didukung juga oleh pasukan payung pada tanggal 20 Pebruari 1942. Penerjunan pasukan payung dilakukan di Penfui, Babau, OEsao, karena tempat-tempat penerjunan tersebut merupakan pusat pertahanan Sekutu, terdiri dari pasukan Australia maka terjadilah pertempuran yang sengit. Pertempuran tidak lagi berlaku dalam jarak jauh, tetapi jarak dekat bahkan berhadapan muka. Meskipun pasukan Australia memberikan perlawanan yang gigih, dengan kubu-kubu pertahanannya, namun karena kekuatan tidak seimbang, maka pasukan Australia mengundurkan diri ke Camplong dan pedalaman pulau Timor.

Pada tanggal 20 Pebruari 1942 itu juga Jepang dapat mema-

suki kota Kupang yang telah kosong. Pasukan Jepang dengan mudah masuk kota Kupang dari jurusan Mentasi, Bakunase, Baun dan Penfui di bawah pimpinan *Mayor Hayakawa*. Pendaratan pasukan Jepang tersebut seperti telah dikemukakan, di luar perhitungan Belanda. Pertahanan Belanda dipersiapkan di sepanjang pantai dari Tenau, Kupang, OEsapa dan OEsao, sebab berdasarkan perhitungan mereka daerah pantai di tempat tersebut sangat strategis untuk pendaratan, karena terletak di teluk yang tenang dan menghadap laut Sabu. Dengan demikian Jepang mendarat di bagian belakang pertahanan Belanda lewat pantai selatan yang tidak dijaga.

Ketika terdengar berita pendaratan pasukan Jepang, maka segera diadakan penghancuran semua peralatan dan gedung-gedung, kemudian semua pembesar pemerintah kolonial Belanda dan stafnya melarikan diri ke arah pedalaman yakni SoE.

Di Rote pendaratan pasukan Jepang terjadi pada bulan Mei 1942 di kota Baa dan Pepela. Sedangkan di daerah Flores, pasukan Jepang mula-mula mendarat di bagian barat yakni di Roo (Manggarai) pada tanggal 13 Mei 1942. Pendaratan di Manggarai ini dilakukan juga di pantai Mborong bagian selatan labuhan Bajo (di bagian pantai barat). Pasukan-pasukan Jepang tersebut dengan cepat menguasai daerah-daerah karena tidak mendapat perlawanan yang berarti daerah pihak sekutu.

Dari Manggarai, pasukan Jepang bergerak ke arah timur menuju Ngada dan Ende. Ende sebagai pusat pemerintahan Belanda di Flores pada tanggal 15 Pebruari mendapat pemboman dari pesawat-pesawat pembom Jepang. Kemudian pada tanggal 15 Mei 1942 dengan kekuatan tiga kapal perang yang didukung pesawat udara, pasukan Jepang mendarat di Ende. Ternyata pendaratan ini tidak mendapat perlawanan yang berarti karena Belanda melarikan diri ke daerah pedalaman atau menyerah. Pertahanan Belanda memang lemah karena sebagian besar pasukannya ditarik ke Kupang untuk memperkuat pertahanan di Kupang sebelum Jepang mendarat.

Di Sumba Jepang mendarat lewat Waingapu pada tanggal 14 Mei 1942 yang sebelumnya didahului dengan pemboman di pusat pertahanan Belanda pada tanggal 1 April 1942. Dalam pendaratan di Sumba ini pun pasukan Jepang tidak mendapat perlawanan yang berarti. Baik di Flores dan Sumba, segera setelah pasukan Jepang mendarat mendapat sambutan dari rakyat. Pejabat-pejabat pemerintahan berkulit putih dan pastor-pastor

serta pendeta ditangkap dan diinternir ke Makasar (Ujung Pandang).

Pasukan-pasukan pendaratan Jepang yang merebut daerah Nusa Tenggara Timur dari kekuasaan pemerintah Belanda dan pasukan Sekutu adalah pasukan Angkatan Laut dari Armada Selatan kedua Jepang. Pendaratan pasukan Jepang disambut dengan gembira oleh penduduk dan tokoh-tokoh masyarakat dan kaum perjuangan.

3. Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintah Hindia Belanda

Ketika Jepang merebut pusat-pusat pemerintahan pada umumnya tidak mendapat perlawanan yang berarti. Bahkan pusat pemerintahan di Kupang dan pada beberapa tempat telah kosong karena ditinggalkan oleh penguasa Belanda yang terdiri dari orang-orang kulit putih melarikan diri ke Kapan, SoE. Sedangkan penguasa-penguasa yang terdiri dari Indo Belanda melarikan diri ke Amarasi. Adapun bekas pejabat-pejabat pemerintahan yang terdiri dari orang-orang Indonesia, tetap tinggal di tempat. Para bekas polisi dan tentara menanggalkan seragamnya dan berpakaian sipil.

Bagi bekas penguasa kolonial Belanda yang berupa orang kulit putih, segera ditangkap atau menyerahkan diri, kemudian diinternir oleh Jepang, di antaranya ke Makasar. Namun ada juga beberapa bekas penguasa Belanda yang mengundurkan diri dapat lolos dari kepungan pasukan Jepang dan mengundurkan diri ke Australia bersama pasukan Sekutu. Bagi para bekas pejabat pemerintahan bangsa Indonesia tidak dilakukan tindakan apa-apa bahkan dipakai kembali oleh Jepang untuk menjalankan pemerintahannya.

Memang sikap Jepang pada awalnya sangat baik dan berusaha menarik hati bangsa Indonesia. Melalui rapat-rapat dikeluarkan janji-janji yang menarik sebagai saudara tua, pembebas dan sebagainya. Untuk melaksanakan pemerintahan dan ketertiban, setelah Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah di samping menangkap pejabat-pejabat berbangsa Belanda yang kemudian diinternir, Jepang mengumumkan bahwa untuk menjalankan pemerintahan lagi, diwajibkan kepada pegawai-pegawai pemerintahan Belanda untuk mendaftarkan diri kembali. Seruan Jepang tersebut mendapat sambutan baik. Semua bekas pejabat

pemerintahan Belanda baik pegawai kantor, guru-guru bangsa Indonesia mendaftarkan diri dan ditempatkan kembali. Banyak pula bekas-bekas pasukan KNIL Belanda yang menjadi *Heiho*.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang diduduki, pasukan Angkatan Laut Jepang (Kaigun) membentuk pemerintahan. Pendudukan sejak bulan Juni 1942 yang dipegang oleh Kaigun.

Untuk wilayah Indonesia bagian Timur dibentuk pemerintahan setingkat propinsi yang disebut *Minseifu* yang berkedudukan di Makasar. Di bawah *Minseifu* terdapat *Minseibu* setingkat keresidenan. Seterusnya *Ken* setingkat *afdeeling* dan *bunken* setingkat *onder afdeeling* sedangkan raja swapraja adalah tingkat *suco*.

Minseibu berdasarkan sumber tertulis berada di tiga tempat yakni Kalimantan, Sulawesi dan Seram.⁵⁸⁾ Sedangkan dari hasil data informan di Nusa Tenggara Timur ketiga *Minseibu* tersebut adalah Maluku, Sulawesi dan Timor. Untuk daerah Timor sendiri kemudian dimasukkan ke dalam *Syu Sunda Shu* pada tahun 1944 setelah terbentuk struktur baru. Daerah Nusa Tenggara Timur sendiri kemudian terdiri dari tiga *Ken* yakni *Sumba Ken*, *Flores Ken*, dan *Timor Ken*.

Kepala dari *Minseibu* adalah *Minseibu Cokan*, sedangkan kepala *Ken* adalah *Ken Kanrikan* dan kepala *bunken* adalah *Bunken Kanrikan*. Setelah Jepang menguasai Nusa Tenggara Timur yang merupakan bekas wilayah keresidenan Timor dan daerah takluknya, membentuk pemerintahan *Minseibu* yang berkedudukan di Kupang dengan kantornya di Airnona. Sebagai kepala *Minseibu* atau *Minseibu Cokan* yang pertama adalah Mr. Woda seorang mayor Angkatan Laut yang kemudian digantikan oleh Mr. Yuasa.

Dalam pemerintahan ini memiliki empat bagian yakni bagian umum dikepalai oleh F. Runtuwene bekas *Hoofd Commies* pada kantor residen Timor; bagian ekonomi dikepalai oleh Drh. G. Sihombing; bagian sosial penerangan dikepalai oleh C. Frans, bekas *Commies redaktur* pada kantor residen di Kupang; dan bagian keamanan dikepalai oleh S. Abdurachman bekas *Bes-tuur Assistent*.

Mengingat pentingnya posisi Nusa Tenggara Timur, maka

58) Sartono Kartodirdjo *et al*, op. cit, hal. 8

terdapat pembesar-pembesar militer yang berada di NTT, diantaranya di Flores pernah berkedudukan Admiral Fukuda, Kapten Tasuku Sato.⁵⁹⁾ Jepang giat membuat pusat-pusat pertahanan termasuk gua-gua pertahanan seperti di Baumata dekat Penfui Kupang, bunker-bunker pertahanan yang tersebar di mana-mana di tempat yang strategis dan lapangan-lapangan terbang, di antaranya di Mbay Flores dan Belu.

4. Sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia

Kedatangan Jepang dengan semboyan-semboyan sebagai pembebas Asia Jepang Indonesia sama-sama, Jepang saudara tua disambut dengan gembira oleh penduduk dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Memang pada mulanya Jepang bersikap manis dan berusaha menarik hati orang-orang Indonesia bekas pegawai pemerintahan Belanda dengan cara mengangkat mereka menjadi pegawai pada pemerintahan Jepang. Demikian juga raja-raja tetap memegang kekuasaan di daerahnya.

Namun beberapa waktu kemudian makin nampak sifat fasisnya yaitu Jepang menuntut pada raja-raja untuk disediakan wanita-wanita muda, untuk kepentingan pasukan Jepang. Dengan cepat hal ini tersiar dan menimbulkan kegelisahan dikalangan penduduk. Agar tidak mengambil resiko kehilangan anak gadisnya orang-orang tua yang memiliki gadis-gadis cepat-cepat mengawinkan anak-anak mereka atau pura-pura mengawinkan anaknya.

Jepang membentuk barisan *Heiho* yang merupakan pembantu prajurit untuk memperkuat pasukan. Anggota *Heiho* ini terdiri dari pemuda-pemuda ataupun bekas tentara dan polisi pada zaman Belanda. Pasukan *Heiho* ini tidak terbatas dari wilayah Nusa Tenggara Timur saja. Banyak didatangkan *Heiho* dari tempat-tempat lain dari wilayah Indonesia bagian Barat. Di Sumba terdapat ribuan *Heiho* dari wilayah Indonesia bagian barat yang sedianya akan dikirimkan ke Irian tetapi tertahan oleh blokade Sekutu.

Untuk membangun pusat-pusat pertahanan baik di Flores Sumba dan Timor, Jepang mengerahkan pekerja paksa yang dikenal dengan *romusya*. Tenaga-tenaga tersebut diambil dari penduduk laki-laki dewasa secara paksa. Mereka jumlahnya ribuan,

59) Mark Tennien and Captain Tasuku Sato, *Iremember Flores*, 1957, hal. 112

siang malam harus bekerja keras dengan jaminan yang sangat minim. Banyak dari *romusya* mati kelaparan atau kena penyakit yang berjangkit akibat fisik yang lemah karena kurang makan dan siksaan. Para *romusya* ini dikerahkan mengerjakan lobang-lobang perlindungan berupa bunker-bunker beton ataupun guha-guha. Di samping itu juga pembuatan lapangan-lapangan terbang untuk pertahanan seperti di Mbay Flores, Belu dan Sumba. Banyak istri yang kehilangan suami, anak kehilangan ayah dan gadis kehilangan pacar akibat tidak kembali karena korban kekejaman Jepang dalam pengerahan *romusya*.

Di samping itu bagi rakyat umum laki-laki dan wanita dikenakan juga kerja bakti *Kinrohosi* dalam rangka membuat jalan. Untuk meluaskan pengaruhnya, Jepang memerintahkan agar sekolah-sekolah mengajarkan bahasa Jepang. Murid-murid harus melakukan senam tiap pagi (*taiso*) dan menghormati *Tenno Heika* dengan membungkukkan badan kearah Tokio. Propaganda lewat suar kabar dan penerbitan digalakkan.

Di Kupang diterbitkan surat kabar bernama *Timor Syeiho*, sedangkan di Ende diterbitkan buku *Nippon Co* sebanyak 150.000 eksemplar dan disebar ke segenap sekolah rakyat. Di samping itu Jepang juga menciptakan lagu-lagu untuk mempengaruhi rakyat agar tetap memberikan dukungan. Lagu-lagu tersebut antara lain : "Awaslah Inggris dan Amerika", juga diajarkan lagu *Kuniga Yoewa*, *Umiyokaka*, *Kimio Bete* dan *O Tete*, Sunai dan lain-lain.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan Jepang, diadakan pembukaan sawah baru. Di Timor telah dibuka sawah-sawah baru dengan mengerahkan tenaga penduduk di desa OEsao, Babau dan Bakunase. Di daerah Ende, Flores : telah dibuka pula sawah-sawah baru di Nua Bosi, Nanga dan Tenda. Sawah-sawah ini ditanami pula sayur mayur. Sedangkan di Maurele telah dibuka perkebunan kapas. Untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pertanian diadakan sekolah atau kursus pertanian yang lamanya 6 bulan bertempat di Kupang. Sekolah ini dipimpin oleh Ch. N. Ndaumanu seorang guru dan bekas sekretaris Perserikatan Kebangsaan Timor.

Di samping tindakan-tindakan di atas, pemerintah Jepang mengadakan mobilisasi pemuda demi pertahanan, dan membentuk *Seinendan*. Barisan pemuda ini bertugas membantu menjaga ketertiban masyarakat dan sosial, misalnya memadamkan

kebakaran, merawat kecelakaan dan lain-lain.

Di Kupang *Seinendan* dibentuk pada tanggal 18 April 1943 dipimpin oleh seorang Jepang bernama Tonita sebagai *Daidanco*, sedangkan wakilnya (*Fuku Danco*) I.H. Doko, sebagai *Cu Danco* ialah P. Latumahina dan *Syo Danco* Umar Said Badjideh. Pembentukan *Seinendan* meluas sampai ke daerah-daerah, di Timor Tengah Selatan terdapat di SoE, Niki-Niki, Kolbano dan Bera; di Timor Tengah Utara terdapat di Kefa, Insana, NoEmuti dan Biboki. Sedangkan di Ende Flores, untuk para pemuda dibentuk *Danco Seinendan* dan untuk pemuda-pemudi dibentuk *Yosi Seinendan*. Sikap Jepang semakin kejam dan sewenang-wenang. Siksaan-siksaan dan hukuman dikenakan kepada penduduk yang membuat kesalahan atau pun dicurigai. Lebih-lebih dengan melalui Polisi Militer Angkatan Darat yang disebut *Kempetai*, polisi Militer Angkatan Laut *Tekketai* dan polisi rahasia khusus yang disebut *Otori*. Walaupun resminya yang menguasai wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Angkatan Laut Jepang dari Armada Selatan bagian ke dua, tetapi kemudian didatangkan pula Angkatan Darat.

Korban-korban kekejaman Jepang di antaranya ialah tokoh pergerakan bernama C. Frans yang menjabat bagian sosial penerangan dari *Minseibu* dibunuh oleh *Otori* karena dituduh sebagai mata-mata Sekutu. C. Frans diculik dari rumahnya dan dibawa ke kapal kemudian dibunuh serta mayatnya ditenggelamkan di laut. Demikian pula F. Dimu Djami sebagai lawan politik C. Frans akhirnya dibunuh juga oleh Jepang setelah pembunuhan C. Frans dilakukan.

Pada waktu Jepang menduduki wilayah Nusa Tenggara Timur, semua petugas agama yang berkulit putih yakni Pendeta Protestan dan para Pastor, Bruder dan Suster ditangkap dan diinternir. Hal ini mengakibatkan keadaan pelayanan kerokhaniaan agak terhalang. Hal ini terutama sangat dirasakan oleh pihak gereja Kristen Protestan. Bahkan dengan tindakannya yang semena-mena beberapa Pendeta menjadi korban, misalnya Pendeta Riwu dan Pendeta Dikuanan di Alor. Mereka dibunuh Jepang atas laporan rekan-rekan sendiri, walaupun maksud laporan tidaklah untuk mencelakakan kawan, hanya sekedar mengadu.

Di kalangan penduduk pemeluk agama Katolik masih agak lebih baik nasibnya, walaupun imam-imam kulit putih ditang-

kap. Hal ini disebabkan pemerintah pendudukan Jepang mendatangkan juga pastor kebangsaan Jepang untuk menggantikannya. Di antara tenaga-tenaga pengganti yang dikirim Jepang adalah uskup Nagasaki, Mgr. Paulus Jamaguchi Pr, *Administrator Apostolik Hiroshima*, Mgr. Aloysius Ogihara S.J. dan dua orang imam sekuler, yakni Mikhael Iwanaga dan Filipus Kiyono.⁶⁰⁾

5. Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang

Waktu Jepang belum lama menduduki daerah Nusa Tenggara Timur, rakyat dan para pemimpin pergerakan menyambut dengan gembira kedatangan Jepang. Apalagi Jepang bersikap manis dan berjanji muluk-muluk. Oleh karena itu bekas-bekas pegawai pemerintah Belanda dan tentara serta polisi menyambut seruan Jepang untuk melaporkan diri serta ikut membantu menjalankan roda pemerintahan.

Beberapa tokoh masyarakat duduk dalam unsur pimpinan pemerintahan. Di antaranya kepala bagian umum *Menseibu* dipegang oleh F. Runtuwene, kepala bagian ekonomi oleh Drh. Sihombing, bagian sosial penerangan oleh C.Frans dan bagian keamanan oleh S. Abdurrachman. C.Frans setelah dibunuh, digantikan oleh I.H. Doko. Di samping itu pada waktu dibentuk *Seinendan*, I.H. Doko sebagai wakil pemimpin (*Fuku Danco*). P. Latumahina sebagai *Cu Danco* dan Umar Said Badjideh sebagai *Syo Danco*. Dengan duduknya pejabat-pejabat tersebut maka tokoh-tokoh masyarakat ataupun pergerakan mengetahui situasi pemerintahan serta kebijaksanaan Jepang. Dalam situasi tertentu dapat maju sebagai pembela dan perantara dari masyarakat. Di samping tokoh-tokoh tersebut sangat besar peranannya juga bagi kepentingan pergerakan rakyat adalah raja Amarsi H.A. Koroh dan raja Kupang, A.Nisoni. Nanti setelah terbentuknya *Syo Sunda Syu* A.H. Koroh dan I.H. Doko ditunjuk sebagai anggota *Syo Sunda Syukai Iin*.

Dengan kegiatan Jepang yang semakin lama semakin tidak bersahabat dan kejam, maka tokoh-tokoh masyarakat dan pergerakan mulai curiga dan sadar akan sikap Jepang yang sebenarnya. Pada waktu Jepang menuntut disediakan wanita muda, maka pemimpin-pemimpin masyarakat dan pergerakan mengajukan protes, misalnya pendeta M. Haba dan I.H. Doko atas nama masyarakat mengajukan protes. Tuntutan Jepang agar disediakan

60) *Ibid*, hal. 10.

wanita muda adalah bertentangan dengan kesuisaan dan agama. Demikian juga protes diajukan pada kantor *Minseibu* atas dikerahkan wanita-wanita untuk bekerja. Ternyata protes tersebut ditanggapi dengan baik. Menyadari betapa kuatnya Jepang dan sangat lemahnya kaum pergerakan dan masyarakat, maka segala kekecewaan dan kekejaman tidak sampai menimbulkan pemberontakan atau pun perlawanan. Rasa kecewa dan ketidaksetujuan dicetuskan dalam aksi-aksi yang lebih lunak dalam bentuk-bentuk tersamar, misalnya dengan protes dan memainkan sandiwara dengan cerita *Oom Elom* dan *Tante Babangka* di Kupang yang berisi sindiran pada Jepang. D. Adoe seorang anggota polisi membentuk band dengan nama *Harnois* yang merupakan singkatan dari Hancurkan Armada Nippon oleh Inggris dan Amerika.

Ternyata kekejaman Jepang makin menjadi-jadi. Lebih-lebih setelah Jepang mulai terpukul dalam pertempuran di mana-mana. Di Nusa Tenggara Timur blokade Sekutu telah menyulitkan kedudukan Jepang, misalnya 12 kapal yang dikirimkan dari Bali ke wilayah Nusa Tenggara Timur dengan membawa persediaan, tidak satu pun yang sampai di tempat tujuan karena habis ditenggelamkan oleh Sekutu. Ribuan *Heiho* yang akan dikirimkan ke Irian tertahan di pulau Sumba.

Menyadari akan pentingnya peranan wilayah Nusa Tenggara Timur bagi pertahanan Jepang, maka wilayah Nusa Tenggara Timur yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun) dari Armada Selatan bagian kedua, pertahanan-pertahanan di wilayah ini makin diperkuat. Tenaga-tenaga *romusya* yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur dan luar wilayah Nusa Tenggara Timur dikerahkan untuk membuat kubu-kubu pertahanan. Lebih-lebih dengan makin terdesaknya Jepang dan pemboman-pemboman Sekutu yang bertubi-tubi.

Pertahanan Jepang berpusat di beberapa tempat yang strategis di pulau Timor, Sumba dan Flores. Mengingat wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu front terdepan Jepang menghadapi Sekutu dan kunci batu loncatan ke Australia, maka walaupun secara resmi berada di bawah komando Angkatan Laut, tetapi kemudian diperkuat juga dengan Angkatan Darat dan Udara. Untuk membentuk pusat-pusat pertahanan, Jepang membuat lobang-lobang perlindungan (bunker beton), guha-guha yang besar dan dilengkapi dengan persenjataan be-

rat (Artileri) serta memperkuat atau pun membuat lapangan-lapangan terbang.

Pertahanan laut terutama dipusatkan di pulau Timor, Kapal-kapal Angkatan Laut beroperasi di sepanjang pantai Laut Timor dan teluk Kupang. Pusat komando pertahanan Angkatan Laut berada di OESapa dekat kota Kupang dan di bawah pimpinan seorang kolonel. Angkatan Darat di Timor, pusat komandonya di kota Kupang, sedangkan Angkatan Udara adalah di Penfui yang dipersiapkan untuk menggempur Australia. Di samping itu di Besikama di Belu Selatan ditempatkan pasukan berani mati.

Di Timor lubang-lubang pertahanan yang berupa bunker-bunker beton tersebar di pusat-pusat pertahanan Jepang di Bakunase, Penfui, OESapa dan beberapa daerah yang tersebar di pulau Timor yang strategis. Sedang pangkalan udara di Timor sebuah di Penfui dekat kota Kupang dan sebuah di Belu dekat perbatasan Timor Timur. Di atas Penfui menuju jalan ke arah Baumata terdapat guha besar yang menghadap ke laut di tempat yang strategis karena tinggi, tersembunyi yang dilengkapi dengan meriam-meriam artileri. Di Sumba pertahanan Jepang dipusatkan di Waingapu, Melolo, Waimangura, Waitabula. Di pusat-pusat pertahanan tersebut terdapat lubang-lubang perlindungan, juga terdapat dua lapangan terbang yakni di Waingapu dan di Waikabubak (satu di wilayah Sumba Timur dan satu di Sumba Barat). Pertahanan Jepang di Sumba di bawah komando seorang kolonel.

Di pulau Flores terdapat dua lapangan terbang Jepang yakni Mbay dan Maumere di Sikka. Pertahanan di Ende dipusatkan di Reworeke, Woloare dan Ndetu Kone. Bahkan di Flores terdapat seorang berpangkat Admiral yakni Admiral Fukuda.⁶⁰⁾ Dua kota penting bagi pertahanan Jepang di Flores adalah Ende dan Maumere.

60). Ibid, hal. 16

BAB: V

PENUTUP

Terjadinya pergerakan di Nusa Tenggara Timur tidaklah terlepas dari keadaan sebelum pergerakan di NTT dan situasi di luar NTT. Keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur pada abad ke-19, di **bidang** pemerintahan tidaklah mengalami banyak perubahan. Di **daerah** Nusa Tenggara Timur terdapat banyak sekali raja kecil yang memerintah. Di antara raja-raja kecil ini jarang ada hubungan **satu dengan** yang lain. Raja-raja ini memerintah kerajaannya dengan **cara** yang tradisional, di mana raja sebagai pemegang pucuk pemerintahan di daerahnya dibantu oleh beberapa pejabat adat.

Namun pada akhir abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda mulai memperluas kekuasaannya dengan pusat kedudukan di **Kupang**, dengan mengadakan kontrak-kontrak pendek, Raja-raja kehilangan kedaulatannya dan tunduk pada kekuasaannya Belanda.

Di bidang sosial budaya, pada akhir abad ke-19 sudah mulai berkembang beberapa pendidikan modern. Sekolah-sekolah ini didirikan sangat erat hubungannya dengan penyebaran agama Kristen dan Katolik. Guna memperlancar penyebaran agama Kristen dan Katolik yang telah masuk di Nusa Tenggara Timur pada abad ke-17, maka perluasan pendidikan sekolah sangat diperluas. Oleh karena itu Misi Katolik dan Zending aktif mendirikan sekolah-sekolah di samping menyebarkan agama. Misi Katolik lebih banyak aktifitasnya di P. Flores. Sedangkan Zending lebih aktif di P. Timor, Rote Sabu, Sumba dan Alor. Agama Islam yang masuk ke wilayah NTT pada abad ke - 16, berkembang terutama di daerah-daerah pantai, yakni pantai-pantai di P. Flores, Sumba dan Timor.

Walaupun agama-agama Kristen, Katolik dan Islam berkembang, sistem kepercayaan asli masih tetap hidup di kalangan penduduk desa. Kepercayaan asli yang merupakan kepercayaan pada arwah nenek moyang dan dewa-dewa masih kuat berpengaruh.

Di bidang kehidupan seni budaya baik dalam bidang seni tari, seni suara, musik, bangunan, seni ikat, serta sistem kemasyarakatan, adalah tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya mem-

punyai kaitan yang erat dengan adat suku-suku yang ada di daerah NTT. Peranan kepala suku dan pejabat adat sangat besar. Pengaruh dari luar nampak di bidang seni bangunan terutama bangunan keagamaan, pengenalan beberapa alat musik Barat dan cara kehidupan Barat di kota-kota. Namun demikian kehidupan ekonomi tradisional yang bertumpu pada pertanian perladangan berpindah dan ternak dengan cara-cara yang sederhana tetap berkembang. Perkebunan-perkebunan seperti di wilayah Indonesia bagian barat tidak dikenal di NTT. Perdagangan sangat terbatas sekali pada hasil hutan, ternak dan hasil laut. NTT kurang memungkinkan menjadi sasaran eksploitasi ekonomi Belanda, karena kondisi alamnya.

Pada periode awal abad ke-20, terutama periode tahun 1900-1928 pemerintah Kolonial Belanda telah mengaktifkan pelaksanaan perluasan kekuasaan dan pasifikasi dengan kontrak-kontrak pendek. Seluruh raja-raja di NTT telah mengadakan kontrak dan tunduk pada pemerintah Belanda. Pada masa ini telah berhasil dibentuk Keresidenan Timor dan daerah takluknya dengan seorang residen yang berkedudukan di Kupang. Wilayahnya meliputi daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur dan Sumbawa. Ada tiga *afdeeling* pada masa ini yakni *Afdeeling* Timor dan kepulauannya, *Afdeeling* Flores dan *Afdeeling* Sumbawa-Sumba yang masing-masing berada di bawah asisten residen. Tiap *afdeeling* terdiri dari *onder-afdeeling* yang dipimpin oleh seorang Kontrolur. Pada masa ini terdapat 15 *onder-afdeeling* dan 48 swapraja di keresidenan Timor.

Walaupun Belanda berhasil melaksanakan politiknya, tetapi mereka telah mengalami perlawanan-perlawanan di daerah-daerah. Perlawanan-perlawanan ini bahkan masih terjadi sampai tahun 1925. Di antara perlawanan-perlawanan ini adalah Perang Kolbano, Perang Niki-Niki, Perang Babuin, Perang Fatilo, Perang Lejo, Perang Watuapi, Perang Kananggar, Perang Lambanapu dan sebagainya. Perlawanan-perlawanan tersebut adalah sebagai reaksi perluasan kekuasaan dan campur tangan Belanda di daerah NTT.

Suatu hal yang sangat berkembang pada masa ini adalah pendidikan sekolah rakyat dan agama. Dengan berkembangnya pendidikan memungkinkan anak-anak belajar dan ada yang dikirim ke Jawa atau Makasar. Dari mereka ini nantinya banyak yang bergerak dalam pergerakan nasional.

Organisasi pergerakan yang menonjol adalah *Timorsch Verbond* yang didirikan di Makasar pada tahun 1933, yang kemudian cabang-cabangnya berkembang di berbagai daerah termasuk di NTT. Di samping itu juga terdapat organisasi *Kerapatan Timor Evolutie*, *Perserikatan Timor*, *Perserikatan Kebangsaan Timor*, *Timorsch Jongeren*, *Serikat Rakyat* dan *Partai Serikat Islam Indonesia*. Organisasi-organisasi pergerakan semula lebih merupakan organisasi sosial yang kemudian bergerak pula di bidang politik. Pada umumnya pergerakan-pergerakan di NTT adalah bersifat kooperasi kecuali *Timorsch Verbond*, *Perserikatan Kebangsaan Timor* dan *Serikat Rakyat*. Namun sikap non kooperasinya tidak mutlak. Hal ini disebabkan karena aktivis-aktivisnya adalah pegawai.

Bila terjadi larangan pegawai aktif dalam pergerakan maka aktivitas pergerakan lumpuh. Memang situasi di NTT kurang memungkinkan aktivitas pergerakan yang bersifat keras. Di samping sebagian besar pimpinan pergerakan pegawai, juga latar belakang pendidikan dan agama yang erat hubungannya dengan Belanda, terutama dalam politik asosiasinya, sehingga di beberapa daerah bahkan organisasi politik dan pergerakan baru ada pada masa Jepang atau sesudahnya, misalnya di Flores.

Adapun dalam hal hubungan dengan daerah lain, di Alor terdapat organisasi PSII sebagai cabang dari Makasar, *Timorsch Verbond* mengadakan kontrak dengan PPPKI dan menjadi anggota PPPKI, serta kontak dengan Taman Siswa. Serikat Rakyat yang dipelopori Christian Pandie merencanakan perlawanan tetapi keburu ditangkap, sedangkan yang nampak agak menonjol dalam pergerakan yakni aksi *Timorsch Verbond* untuk membongkar kekejaman beberapa kontrolur Belanda di Karuni, Sabu dan Flores Timur.

Organisasi pemuda, kewanitaan dan kepanduan sangat terbatas sekali, karena memang penguasaan Belanda di daerah NTT belum berlangsung lama (dalam arti di seluruh NTT), daerah NTT bukanlah merupakan daerah obyek ekonomi Belanda, serta pengaruh sistem pendidikan dan agama yang disebarkan mempunyai kaitan erat dengan pemerintah Belanda. Kondisi yang demikian memang kurang memungkinkan timbulnya pergerakan seperti di wilayah Indonesia bagian barat.

Daerah NTT adalah sangat penting dalam arti politik dan strategis Belanda, karena itu pada waktu menjelang Jepang me-

lakukan serangan terhadap pasukan Sekutu telah memperkuat diri di Timor dengan kekuatan satu brigade. Namun wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang banyak itu sangat menyulitkan pertahanan Belanda, lebih-lebih dengan kekuatan tenaga yang terbatas. Oleh karena itu pulau Timor yang mendapat perhatian, yang merupakan kunci ke arah Australia atau pertahanan terbelakang dari Sekutu. Ternyata pada waktu Jepang melakukan penyerangan, hampir tidak mengalami perlawanan dari Belanda. Hanya pasukan Sekutu yang terdiri dari pasukan Australia melakukan perlawanan hebat di sekitar Kupang dan OEsao. Namun akhirnya terpuak juga. Kekuatan Belanda pada umumnya tidak melakukan perlawanan, menyerah atau melarikan diri ke Australia.

Kedatangan Jepang dengan propaganda yang menarik sangat menggembirakan penduduk, namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Kekejaman-kekejaman Jepang semakin merajalela. Lebih-lebih untuk kepentingan pertahanan Jepang maka *Heiho*, *Romusya Seinendan*, perlu dikerahkan. NTT merupakan salah satu front terdepan bagi Jepang dan merupakan batu loncatan ke Australia NTT yang berada di bawah kekuasaan Kaigun (Angkatan Laut) untuk melancarkan penguasaannya membentuk pemerintahan yang di NTT merupakan *Minseibu* dengan pusatnya di Kupang yang berada di bawah *Minseifu* di Makasar. Kemudian merupakan bagian dari *Syo Sunda Kecil*. Dalam pemerintahan dan kegiatan lain ikut aktif beberapa tokoh dari NTT, di antaranya C. Frans, I.H. Doko, Runtuwene, H.O.S. Badjideh dan H. Koroh.

Pada masa Jepang tidak terjadi perlawanan, walaupun kekejaman Jepang sangat terasa, tetapi dihadapi dengan kepala dingin dan taktik pendekatan yang luwes untuk menghindarkan atau memperlunak kekejaman Jepang. Namun demikian dua tokoh telah menjadi korban Jepang juga yakni C. Frans dan F. Dimu Djami yang dibunuh oleh Jepang. Walaupun dengan perbedaan keadaan antara NTT dengan daerah lain namun situasi pada zaman pergerakan di NTT dan aktivitas pergerakan merupakan suatu bagian dari Pergerakan Nasional yang mempunyai nilai dalam rangka peletakan dasar kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR KATA

A

- Abdul Rahman Daeeng Mataram
Abdurahim
Abdulrahman, S.
Abubakar, Syarif
Aceh
Adonara
Adoe, D
Afdeeling
Ahmad Datu Batuah
Ainan
Airmata
Airnona
Akeerman, W
Alibasyah
Alor
Alphen, J.J. van
Algadri
Ama Mbiri Kalimbang
Amabi OEfeto
Amaf
Amalo, J. W.
Amanatun
Amanuban

Chijs, van der
Christelijke Jongeren Vereniging
Christelijke 'School' Vereniging
Sumba
Christian Pandie
Christoffel, H
Cipinang
Copu
Couvreur
Cu Danco

Amarasi
Ambon
Amerika
Amfoang
Amir Bahren
Amnanu, Leo
Amtiran, M
Anakalang
Anaklangu
Api
Aplal
Arab
Arnoldus (percetakan)
Artileri
Asyiratal Mustaqim
Atambua
Atapupu
Atimelang
Atupas
Azzad, Muhammad

Digul
Dijk, kapten
Dijkman
Dikuanan, pendeta
Dili
Dimu Jami, F
Djabi, N
Doko, I.H
Dompu
Don Lorenzo
Donselaar
Dua NggaE

D

Daalen, avan
Daeng Hema
Daidanco
Danco seinendan
Dannen berger, kontrolur
Dasing, H
Dawan
Dedi, Umbu Langu
Della (Rote)
Dengka
Depresi
Dewa Wula
Desentralisasi
Dewan Hindia
Dewan Kerajaan
Dewan Kolonial
Dewan Lokal
Dewan Rakyat
Frans, C
Fuku Danco
Fukuda, Admiral
Funay

G

Gakeler, A. Dr
Gandakusuma, A.M
Gapi
Gewali Nuha
Gezaghebber
Goa
Gouvernement Onderwijzers
Groothuis, Dr

H

H.I.S
Haba, M

E

E.L.S
Ende
Enkelaar, kontrolur
Enkelaar, H
Enos Wadu
Esser, residen

F

Fasis
Fatuleu
Fetor
Flores
Forck, Jenderal
Hindia Belanda
Hirosima
Hokeng
Hollands Inlandse School
Kweekschool
Hoofd Commies

I

I Landu Welang
India
Indie Weerbaar
Indische Kerk
Indische Staatsblad
Indonesia Berparlemen
Indonesia Merdeka
Indonesia Raya, lagu
Inggris
Injil baru
Insana

Haing
Hayakawa, mayor
Hamzah Bahren
Harneno
Harnois
Heiho
Helpers
Herewila, L
Hina Andumara
Jangga Mblolu
Jawa
Jawa Barat
Jepang
Jerman
Jesuit, missionaris
Johannes, Dr, W,Z
Johannes, J
Jonkman, Mr
Josi Seinendan

K

Kaigun
Kakadupa
Kalabahi
Kalimantan
Kalimbang, Ama Mbiri
Kalipang
Kambaniru
Kanggar
Kanatang
Kanda, Mbagido Reja
Kapan
Kapitan
Kapunduk
Karuni
Katolik
K.B.I
Kedu Mato

Irian
Islam
Israel,
Iwanaga, Mikhael

J

Jakarta
Jamaguchi, Paulus
Jami, K
Kefa
Kempeitai
Ken
Kepa Biu
Kepanduan
Kepercayaan
Kerapatan Timor Evolusi
Kijtenbelt, Dr. R.W.F
Kimio Dete
Kinrohosi
Kisol
Kiyono, Filipus
KNIL
Kodi
Kolana
Kolbano
Kooperasi
Koroh, A
Koroh, H.A
Koroh, Rasi
Korte verklaring
Kraayvanger
Kraeng Beo Ame Enggong
Kraeng Motang Rua
Kraeng Wanggur
Kristen
Kui
Kupang
Kuparman, R.W.
Kura, pulau

L

Labuah Bajo
Lainyanyar
Laiskodat, J
Lamahala, (Flotim)
Lambanapu
Lambert
Lamboya
Landu
landurang
Lanloki
Larantuka
Latumahina, P
Lauli
Laura
Lawabang
Le Grand
Ledalero
Lela
Lensu Nal
Lewa Kambera
Lise
Locher, Dr
Lohayong
Lomblen
Louwo, E. SJ
Luwalu

M

Madura (sapi)
Mafefa
Mahlafu Neno Bahkasi
Mahu Karera
Makasar
Maluku
Manafe, Tallo
Manggarai
Mangili

Mantasi
Manulai
Mapatih Gajah Mada
Marico
Marsose
Masyumi
Masu Karera
Mate, Kedu
Maubesi
Maumere
Mbangido Rijakanda
Mbay
Mborong
Mehanusa
Melayu
Melolo
Meno
Mengko Medewong
Meo
Meomaffo
Merah putih
Mesjid
Mete Umbu Pati
Metz, G
Middelkoop. Dr. P
Minseibu
Minseifu
Missi
Misionaris
MoE, M.B
Mollo
Mamboro
Mosalaki
Motang Rua
Muhammadiyah
Musik
Muti Banunaek

N

N

Nagasaki
 Naktimu NoE Bone
 Nanga
 Napu
 Nausaf, B
 Nausaf Saduk OEmatan
 Ndaumanu, Ch. F
 Ndetu Kone
 Ndoen, Stephens
 Ndora
 Neewe, de
 Nederland
 Neiluli
 NoE muti
 Ngada
 Nicks, J.J.
 Niki-Niki
 Ninulak
 Nipa Do
 Nippon Go
 Nisnoni, A
 Nisnoni, Bastian
 NoE Bena
 NoE Benu
 NoE Bone
 NoE Bukung
 NoE Liu
 No Elmina
 NoE Mete
 NoE Muti
 Normal Cursus
 Noyen, Mgr. P
 Nua Bosi
 Nusa Kambangan
 Nusa Tenggara Timur (NTT)

O

O Tete

OEkusi
 OElolok
 OEmatan
 OEnale
 OEsapa
 OEsao
 OEtasi
 Ogihara, Mgr. Aloysius
 Onder afdeeling
 Oom Klom
 Otori

P

Padang
 Padeangu, Baju
 Palembang
 Pandingara, Umbu
 Pantar
 Papkat
 Pariti
 Parsi
 Pati, Mete, Umbu
 Payoti
 P.B.I.
 P.D.II
 Pella, D.S
 Pello, M.H
 Pello, Tom
 Pembaharuan (Pers)
 Pendidikan
 Penfui
 Perang Dunia I
 Perdagangan
 Pergerakan Nasional
 Pers
 Persatuan Pemuda Kristen
 Imanuel
 Persatuan Pemuda Kristen
 Samuel

Perserikatan Kebangsaan

Timor

Perserikatan Timor

Piry, C

Pewarta Timor

Poeroe, S

Portugis

Poru, N

PPPKI

P3K. S

P.K.I

P.K.T

P.S.I.I.

Predikant voorzetter

Prefektur Apostolik

Protestan

Pua Nate

Puu Ine Ame

R

Raad van Indie

Rasi Wangge, Pius

Rato Loghe Kandua

Rato Ndimu

Reku Landurang

Rendi Mangili

Reo

Residen

Reworeke

Ria Bewa

Riwu, pendeta

Romusya

Rote

Rowa

Runtuwene, F

Ruteng

S

Sabu

Saduk OEmatan

Sandiwara

Saragouw Letnan

Saramoni Umbu Pembu

Sarikat Islam

Sarikat Timor

Saymina

Sawahlunto

Schakelschool

Schweten

Sinendan

Sekolah

Sekutu

Semau

Seminari Tinggi

Seram

Serikat Rakyat

Serui

Sihombing, Drh, G

Sikka

Singapura

Sinkhuize, Dr

Sjoo Sunda Shu

Sjoo Sunda Shunkai Iin

Societas Verbi Devini

SoE

Soejono

Solor

Sonbai, Koko

Sonbal Sobe

Spander, G.D

Standaard school

Steiff, letnan

Steyl

Suco

Sukun

Sulawesi

Suluh Timor

Sumatra

Sumba

Sumbawa
Sumpah Pemuda
Sunai
Sumili
Surabaya
Surya Mataram
Sutardjo, petisi
Swapraja
Sylnode

T

Tabenu
Tabundung
Tadu Moli
Tafiniman
Tahukemtasi
Taito
Taman siswa
Tambesi Manleon
Tanarea
Tanof
Tanof, B.H
Tanyo, S,W
Tanjung Periuk
Taralandu
Tasuku Salo
Tatengkeng,J.E
Tekkeitai
Tenau
Tenda
Tenganang
Tenno Heika
Theologia (sekolah)
Termanu
Tiluludji,S.K
Tilnom, E.
Timor
Timorsch Jongeren
Timorsch school
Timor Sjeiko
Timorsch Verbond

Tobe
Todabelu
Toelle, J.H.A
Tokio
Toko Kemajuan Timor
Tokono
Tonita
TTS
Tu Tego Tega Medo
Tunbada
Tunggu Maramba

U

Uis Neno
Umalulu
Umar Bara Pa
Umbu Biditan
Umbu Hai Relangu Hodambiwa
Umbu Hana Hunggawati
Umbu Maramba
Umbu Nai Keba
Umbu Nai Lalu
Umbu Nai Tahu
Umbu Ndawa Hawula
Umbu Ndilu Danguramba
Umbu Nggaba Landupraingu
Umbu Ngilu Beku
Umbu Ngilu Dedi
Umbu ,Pandingan
Umbu Pombu Saramone
Umbu Rarameha
Umbu Tentu Tabawan
Umbu Tunggu
Umbu Tunggu Wuku
Umbu Tunggu Jana Karemin-
Jawa
Ume Kase
Upacara
Usif
Usif Mone

Usif Nanan
Usletu

V

Vikariat Apostolik
Vilkneuwe
Visser, predikant voorzitter
Volkschool
Volksraad
Vyzlaar

W

Waal Malefyt, de
Waikabubak
Wajewa
Wajelu
Waimangura
Waingapu
Waitabula
Wake
Wanokaka
Wanreli
Watuapi
Watulade
Wawuli
Wewewa
Wewiku, Wehali
Wilde Scholen ordonnantie
Wilhelmina
Wiri Mbulu
Woda, Mr
Woloare
Wonakaka

Y

Yuasa, Mr
Jusuf Samah

Z

Zelfbestuur
Regelen
Zending

DAFTAR BACAAN

- Adams M.J, *Structural Aspects of Village Art*, American Anthropologist Journal of the American Anthropological Association, vol. F. 5, No. 1, 1973
- Burger, Prof. Dr. D.H., Prof Dr. M. Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970
- Cooley, Dr. F.L., *Benih yang tumbuh*, jilid II, 1976, Arnoldus Ende
- Dhesi Beo, F., *Sejarah Perkembangan Persekolahan di Ngada*, Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1971.
- Doko, I.H., *Nusa Tenggara Timur Dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Masa Baru Bandung, 1974.
- Fox, Dr. J. *Harvest of the Palm, Ecological Change in Eastern Indonesia*, Harvard University Press, Cambridge Massachusats and London England, 1977.
- Gerang Mau. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Alor Pantar*, Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1972.
- Gordon, Jr. B.A, M.A., Yohn. L., *The History of Manggarai (West Flores /Indonesia)*, with Emphasis of Economie Transformatian in the 20 th Century, Harvard University, Cambridge, Mass U.S.A., 1971.
- Hemo, D., *Sejarah Perlawanan Kraeng Motang Rua Melawan Belanda di Manggarai* Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana Kupang, 1978.
- Inspeksi Land Use N.T.T., *Laporan Inventarisasi Lad Sue N.T.T.*, 1969.
- Kana, Ch., *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor*, Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1969.
- Kapita, Umbu H., *Sejarah Perkembangan Ketentaraan di Daswati II Sumba Timur*, Waingapu 1962 (tak diterbitkan).
- , *Sumba Di. Dalam Jangkauan Jaman*, B.P.K. Gunung Mulia, Jakarta, 1976.

- Mardjuki Magang., *Sejarah Pergerakan Rakyat di Kabupaten Alor*, Skripsi jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Kupang, 1972.
- Mark Tenmen, T. Sato., *I Remember Flores*, Parrar Strausse and Cudaky, New York, 1957.
- Middedelingen van de Afdeeling Bestuurzaken der Buitengewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuur*, Seri A, No. 3, Landsdrukkerij, Weltevreden, 1929.
- Monografi Nusa Tenggara Timur Daerah Timor, Rote, Sabu*, Jilid I, II., Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Dep. P dan K., 1975.
- Nedholt, H.G., Schulte., *The Political System of Atoni of Timor*, The Hague Martinus Nijhoof., 1971
- Nyoko, P., *Kabupaten Sumba Timur (Suatu Studie Histories)*, Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1969.
- Parera, A.D.M., *Sejarah Politik Pemerintahan Asli di Timor, Percana*, Kupang, 1971.
- Patunru, A.R., Daeng, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulsetra, Makasar, 1967.
- Pitay, F., *Sejarah Perang Kolbano*, Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1972.
- Sartono Kartodirdjo, Prof, Dr. et al, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V dan VI*, Dep P dan K, Pt. Grafitas, Jakarta, 1975.
- Sastrodirhardjo, R.S., *Beberapa catatan Tentang Daerah Sumba*, Jawatan Pertanian Rakyat, Bag. Publikasi Dokumentasi, Jakarta, 1957.
- , *Beberapa Catatan Tentang Daerah Timor*, Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, Bag. Publikasi Dokumentasi Jakarta, 1957.
- Sejarah Gereja Katolik Indonesia*. Jilid 2,3 a, dan 3 b, Arnoldus Ende, 1974.
- Syakban D. Belang, *Sejarah Perkembangan Agama Islam di Kabupaten Alor*, Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1972.

Tuewodo, L.M., *Sejarah Perlawanan Rakyat Watuapi Terhadap Belanda 1916 - 1917*, Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang 1976.

DAFTAR INFORMAN

1. Markus Fernandez, 65 tahun , Kopeta Ende.
2. Gedeon Bulu, 72 tahun, Sumba.
3. D.D.Dobo 66 tahun, Wewewa Timur.
4. OE. H. Kapita, 70 tahun, Waingapu.
5. Paulus Muda, 64 tahun , Ende.
6. H.O.S. Badjideh, 52 tahun, Kupang.
7. A. Nosnoni, 72 tahun, Kupang.
8. A. Salo, 73 tahun, Kampung Baru, T.T.U.
9. J. Petrus, 78 tahun, kampung Baru, T.T.U.
10. M. Mella, 70 tahun, Kecamatan Mollo Selatan.
11. Gasper Fius, 80 tahun, No Emuti.
12. M.A. Daniel, 57 tahun, Tumveno.
13. A.H.T. Nope, 60 tahun, Kecamatan kota SoE, T.T.S.
14. L.L.D. Banunaek, 70 tahun, OEkamusa, T.T.S.
15. I.H.Doko, 63 tahun, Kupang.
16. Ch. F. Ndaumanu, 65 tahun, Kupang.
17. Sadu Naiusaf OEmatan, 78 tahun, Kupang.
18. Ayub Hermanus, 68 tahun, Kupang.
19. N.D.Dillak B.A., 63 tahun, Kupang.
20. P. Cornelisen svd, ± 80 tahun, Ende.
21. Leo Misa, 55 tahun Ende.
22. Linus Nama Netan, 50 tahun, Kupang.
23. Riwu Ga, 61 tahun Ende.
24. Pari, 81 tahun, Ende.
25. Ratu Carvallo, 81 tahun, Ende.
26. Hendrikus Meke, 65 tahun, Reworeke.
27. P. Piet. Petu svd, ± 55 tahun, Pastor Cathedral Ende.
28. J.S. Amalo, 65 tahun, Kupang.

002135.5
G3.2
Ket